

KESEMPATAN MENDAPATKAN PENDIDIKAN

Dr. Hj. Khairiah, M.Pd

**KESEMPATAN MENDAPATKAN
PENDIDIKAN DALAM KAJIAN
TINGKAT PENDIDIKAN DAN
PENDAPATAN KELUARGA**

KESEMPATAN MENDAPATKAN PENDIDIKAN
DALAM KAJIAN TINGKAT PENDIDIKAN
DAN PENDAPATAN KELUARGA

Penulis

Dr. Hj. Khairiah, M.Pd

Rancang Sampul

Haytami el Jaid

Tata Aksara Isi

Dim@swids

Cetakan I: Juli 2018

Penerbit

PUSTAKA PELAJAR

(Anggota IKAPI)

Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167

Telp. 0274 381542, Faks. 0274 383083

E-mail: pustakapelajar@yahoo.com

ISBN: Dalam Proses

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur hanya kehadirat Allah SWT saya sampaikan atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga buku kesempatan mendapatkan pendidikan dalam kajian tingkat pendidikan dan pendapatan keluarga dapat diselesaikan.

Buku ini hadir untuk memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan tentang pentingnya pendidikan dan pendapatan keluarga terhadap kesempatan mendapatkan pendidikan anak dalam membangun masa depan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan hadirnya buku ini, diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan dan menjadi model dan strategi pendidikan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Namun demikian dalam penulisan buku ini, penulis menyadari sepenuhnya, bahwa mungkin dalam penulisan buku ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya buku ini.

Dengan selesainya buku ini, penulis menyampaikan terimakasih, apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan begitu banyak bantuan, bimbingan, pengarahan, dorongan, semangat, motivasi dan membuka wawasan, saran, masukan dan kritikan sehingga buku ini dapat diselesaikan, diantaranya:

1. Menteri Agama RI, H. Lukman Hakim Saifuddin yang telah memberikan inspirasi dan wawasan dari sejumlah pertemuan yang diikuti mengenai pentingnya pendidikan dalam pengembangan masa depan bangsa dan Negara Indonesia.
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Prof. Dr. H.Nur Syam, M.Si dan Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA yang telah memberikan morivasi dan wawasan tentang pentingnya pendidikan melalui kebijakan pembangunan nasional, peluang dan kesempatan mendapatkan pendidikan bagi anak-anak bangsa Indonesia.
3. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M. Ag, MH, selaku Rektor Instatitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah membuka wawasan dan kebijakannya dalam membuka kesempatan mendapatkan pendidikan bagi generasi penerus bangsa.
4. Ayahanda H. Muhammad H. Ali (almarhum) dan Ibunda Hj. Musanah berkah doanya sehingga selesainya buku kesempatan mendapatkan pendidikan dalam kajian tingkat pendidikan dan

pendapatan keluarga.

5. Suami tercinta Drs. H. Syarifuddin, MS dan anak-anak tersayang Firdaus Muttaqin, ST, MT, Syauqas Rahmatillah dan Fitria Qadriani.

Bengkulu, 13 Januari 2018

Penulis

Dr. Hj. Khairiah, M.Pd

KATA SAMBUTAN

Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, MH
(Rektor IAIN Bengkulu)

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan hidayah, petunjuk, kekuatan dan pertolonganNya sehingga bisa memberikan kata sambutan ini, dan shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad saw yang telah membawa kita umatnya kepada agama yang benar yang diridhai Allah SWT.

Dalam kesempatan ini, saya selaku Rektor IAIN Bengkulu, menyambut baik hadirnya karya saudara Dr. Hj. Khairiah, M.Pd yang berjudul kesempatan mendapatkan pendidikan dalam kajian tingkat pendidikan dan pendapatan keluarga, dengan harapan dapat memberikan orientasi pemahaman terhadap keluarga tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak, karena pendidikan merupakan kunci kemajuan. Dan pendidikan juga merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Maju tidaknya

seseorang ditentukan oleh pendidikannya. Maju tidaknya suatu Negara dipengaruhi oleh pendidikan, sehingga suatu bangsa dapat diukur maju atau mundurnya melalui pendidikan. Mengingat pendidikan diawali dari keluarga, maka proses mencetak sumber daya manusia yang berkualitas baik dari segi spiritual, intelegensi maupun skill dipengaruhi oleh keluarga. Dan keluarga mempengaruhi kesempatan anak mendapatkan pendidikan.

Akhirnya saya berharap kehadiran buku ini dapat memberikan wawasan kepada keluarga dalam mengupayakan kesempatan mendapatkan pendidikan bagi anak anaknya yang merupakan generasi penerus penentu kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

Bengkulu, Januari 2018

Rektor



Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, MH

DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMAKASIH v

KATA SAMBUTAN ix

DAFTAR ISI xi

BAB I

PENDAHULUAN — 1

- A. Latar Belakang — 1
- B. Rumusan Masalah — 6
- C. Tujuan Pembahasan — 6
- D. Metode Pembahasan — 6
- E. Sistematika Pembahasan — 7

BAB II

KONSEP DAN DASAR-DASAR PENDIDIKAN

DALAM KAJIAN TEORITIK — 9

- A. Pengertian Pendidikan — 11
- B. Hakikat Pendidikan — 14
- C. Tujuan Pendidikan — 21
- D. Fungsi Pendidikan — 29

- E. Sasaran Pendidikan — 31
- F. Proses Pendidikan — 32
- G. Komponen Pendidikan — 36
- H. Landasan Pendidikan — 43
- I. Azas Pendidikan — 59
- J. Aliran Pendidikan — 73
- K. Teori dan Pilar Pendidikan — 84
- L. Pilar-pilar Pendidikan — 88
- M. Lingkungan Pendidikan — 91
- N. Sistem Pendidikan Nasional — 101
- O. Kelembagaan dan Pengelolaan Pendidikan Nasional — 108

BAB III

KONSEP PENDAPATAN KELUARGA DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSAAN PENDIDIKAN — 123

- A. Pendapatan Keluarga — 123
- B. Jenis Pendapatan — 141
- C. Fungsi Pendapatan — 146
- D. Peran Pendapatan Keluarga Pada Proses Pendidikan — 149

BAB IV

PENTINGNYA PENDIDIKAN DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROSES PELAKSANAANNYA — 155

- A. Pentingnya Pendidikan — 155
- B. Faktor yang Mempengaruhi Proses Pelaksanaan Pendidikan — 162
- C. Faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan — 169

- D. Permasalahan Pendidikan — 180
- E. Faktor Yang Mempengaruhi Berkembangnya Masalah Pendidikan — 185
- F. Solusi Pendidikan di Indonesia — 188

BAB V

PENUTUP — 191

- A. Kesimpulan — 191
- B. Saran-saran — 192

DAFTAR PUSTAKA — 193

DAFTAR RIWAYAT HIDUP — 205

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Negara Republik Indonesia adalah seperti yang termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yaitu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.¹ Selanjutnya pemerintah Indonesia berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian ditegaskan lagi dalam pasal 31 Undang-undang Dasar 1945. Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran.²

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Ketetapan MPR No. II/MPR/1993 dikemukakan bahwa

¹ MPR RI., GBHN TAP MPR No. II/MPR/1988, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1988), hlm. 1

² MPR RI., *Ibid.*, hlm. 7

pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.³ Menurut M. Arifin pendidikan merupakan kunci kemajuan. Dan pendidikan menjadi tumpuan kemajuan perkembangan hidup.⁴ Dalam rangka memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan, perlu dilanjutkan usaha penyediaan fasilitas pendidikan untuk menampung anak-anak usia sekolah. Usaha tersebut perlu menjangkau pula kelompok masyarakat kurang mampu, cacat ataupun karena bertempat tinggal yang jauh terpencil kurang dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan yang tersedia agar mereka pun mendapatkan kesempatan belajar dan kesempatan meningkatkan keterampilan.⁵

Besarnya perhatian dan keikutsertaan pemerintah dalam usaha mewujudkan dan meningkatkan ataupun memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak. Pendidikan dapat dilalui dengan beberapa jenjang sesuai dengan pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia 1989 yaitu jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.⁶ Proses pendidikan dasar, pendidikan menengah dan

³ MPR RI., *GBHN TAP MPR No. II/MPR/1983*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1983), h. 91

⁴ M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam, Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 3

⁵ MPR RI., *Ibid.*, h. 91

⁶ Undang-undang RI No. II Taun 1989, *Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: PT. Intan Parawira), h. 13

pendidikan tinggi, membutuhkan partisipasi keluarga, karena keluarga merupakan lingkungan tempat anak menghabiskan waktu dan faktor pendukung dan pengaruh terpenting bagi perkembangan kecerdasan anak.

Pengaruh keluarga ini berkaitan pula dengan masalah pendapatan. Dengan pendapatan keluarga yang memadai anak lebih berkesempatan mendapatkan fasilitas belajar yang lebih baik. Mulai dari alat tulis hingga pemilihan sekolah dan sebaliknya dengan tingkat pendapatan yang kurang memadai, anak kurang mendapatkan fasilitas belajar yang baik dan nutrisi yang baik pula. Tidak hanya itu, biasanya pihak sekolah (pendidikan) tidak memberi keringanan biaya untuk orang miskin atau berpenghasilan rendah. Dengan demikian orang yang tingkat pendapatannya kurang biasanya mendapat tekanan untuk memenuhi semua kebutuhan anak yang semakin hari semakin berat untuk dipenuhi. Itulah sebabnya keluarga merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan anak. Pada saat ini, semakin banyak keluarga yang tingkat pendapatannya rendah makin terlindas. Seharusnya pemerintah, pemerintah daerah, sekolah/madrasah harus memikirkan untuk memberi kesempatan bagi orang miskin untuk mendapatkan pendidikan yang layak, sesuai cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan manusia seutuhnya yang bermartabat dan berperadaban.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas, mungkin hanya tinggal harapan karena di lapangan

menunjukkan bahwa data Kantor Statistik Propinsi Bengkulu, jumlah penduduk akhir tahun 1990 tercatat sebanyak 1,178,951 jiwa. Penduduk yang berumur 10 tahun sebanyak 157,826 jiwa, dari jumlah itu yang masih buta huruf sebanyak 4,435 jiwa.⁷

Masih banyak penduduk umur 10 tahun ke atas yang buta huruf, ini bukan merupakan masalah yang timbul di Propinsi Bengkulu saja, tetapi merupakan masalah nasional. Anak-anak yang tidak sekolah dan putus sekolah disebabkan oleh berbagai faktor terutama tingkat pendidikan keluarga, hal ini bisa terjadi dikarenakan tidak paham dan tidak adanya saling pengertian dari keluarga untuk mengusahakan anaknya mendapatkan kesempatan mendapatkan pendidikan dan tingkat pendapatan keluarga.

Dengan rendahnya tingkat pendapatan keluarga mengakibatkan banyaknya tuntutan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga yang belum dapat dipenuhi. Sehingga kesempatan anak untuk mendapatkan pendidikan sangat kecil sekali, disamping itu kurangnya motivasi, dorongan dari keluarga disebabkan oleh ketidapkahaman keluarga tentang arti dan tujuan pendidikan itu sendiri, sehingga mengakibatkan kesempatan anak untuk mendapatkan pendidikan sangat kecil.

Untuk memecahkan masalah kecilnya kesempatan anak untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana dipaparkan di atas, maka terlebih dahulu perlu

⁷ Kantor Statistik Propinsi Bengkulu, *Penduduk Usia Tunggal Propinsi Bengkulu*, (Bengkulu: 1990), h. 6

diketahui secara teoritik akademik faktor atau variabel yang mempengaruhi kesempatan anak mendapatkan pendidikan. Sesuai Sumardi menyebutkan tingkat pendapatan keluarga merupakan salah satu kondisi dari aspek keluarga yang berpengaruh besar terhadap motivasi.⁸ Termasuk motivasi untuk menyekolahkan anak. Menurut Sayuti kemakmuran masyarakat saling berpengaruh oleh besarnya pendapatan dan konsumsi dari masyarakat sendiri, pendapatan yang rendah dapat menyebabkan masyarakat dibawah garis kemiskinan. Kemakmuran suatu keluarga ditentukan oleh pendapatan keluarga.⁹

Menurut penelitian Khairiah menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan keluarga terhadap kesempatan anak untuk mendapatkan pendidikan¹⁰

Dengan demikian buku kesempatan mendapatkan pendidikan dalam kajian tingkat pendidikan dan pendapatan keluarga ini dapat dikatakan cukup problematis dan aktual. Dikatakan problematis karena dalam memberi serta menciptakan kesempatan mendapatkan pendidikan bagi anak menyangkut berbagai faktor kondisi masyarakat terutama keluarga. Dikatakan aktual karena hal ini masih terdapat diberbagai lapisan

⁸ Sumardi Surya Brata.1991. *Metode Penelitian*. Jakarta: CV. Rajawali, h. 94

⁹ Sayuti, jAMIL. *Pengantar Ekonomi Makro*. (Jakarta: Proyek Perkembangan Penelitian, 1989), h. 16

¹⁰ Khairiah, *Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pendapatan Keluarga Terhadap Kesempatan Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Desa Transmigrasi Harapan Makmur Bengkulu*, aN-Nizom, Jurnal Penelitian Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 3, No. 2 Agustus 2018. ISSN 2528-2344, (Bengkulu: Pascasarjanan IAIN Bengkulu, 2018), h. 159

masyarakat, sehingga buku ini sesuai dan mempunyai nilai strategis guna mengetahui kemungkinan penciptaan kesempatan mendapatkan pendidikan bagi anak.

B. Rumusan Masalah

Buku ini adalah kajian eksplanatif dan eksploratif terhadap kajian kesempatan anak mendapatkan pendidikan ditinjau dari tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan keluarga, dengan pokok masalah kajian sebagai berikut; *Pertama*, Bagaimana tingkat pendidikan keluarga berpengaruh terhadap kesempatan anak mendapatkan pendidikan? *Kedua*, Bagaimana tingkat pendapatan keluarga berpengaruh terhadap kesempatan anak mendapatkan pendidikan?

C. Tujuan Pembahasan

Buku ini hendak mengkaji secara reflektif analitis tentang kesempatan mendapatkan pendidikan ditinjau dari tingkat pendidikan keluarga dan tingkat pendapatan keluarga dengan tujuan sebagai berikut; *Pertama*, untuk mengetahui tentang pengaruh tingkat pendidikan keluarga terhadap kesempatan anak mendapatkan pendidikan; *Kedua*, untuk mengetahui tentang pengaruh tingkat pendapatan keluarga terhadap kesempatan anak mendapatkan pendidikan.

D. Metode Pembahasan

Metode pembahasan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat eksplanatif dan eksploratif terhadap kesempatan anak mendapatkan

pendidikan ditinjau dari tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan keluarga, oleh sebab itu, sumber utama penulisan ini adalah sumber data tertulis berupa buku, artikel, jurnal, majalah, surat kabar dan publikasi ilmiah, baik dari media cetak maupun elektronik. Sedangkan sumber data sekundernya adalah data-data lapangan baik berupa wawancara maupun observasi lapangan.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika buku ini meliputi pembahasan sebagai berikut: Bab pertama terdiri dari pendahuluan yang menjelaskan masalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pembahasan, metode pembahasan dan sistematika pembahasan. Bab kedua terdiri dari konsep dan dasar-dasar pendidikan pendidikan dalam kajian teoritik. Bab ketiga terdiri dari pentingnya pendidikan. Bab keempat konsep pendapatan keluarga dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan. Pada bagian akhir dalam bab keenam memuat penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KONSEP DAN DASAR-DASAR PENDIDIKAN DALAM KAJIAN TEORITIK

Dalam bab ini membahas tentang konsep dan dasar-dasar pendidikan dalam kajian teoritik. Pendidikan merupakan proses membentuk sosok individu sebagai sumber daya manusia yang berperan besar dalam proses pembangunan berbangsa dan bernegara. Oleh karena peran pendidikan sangat penting sebab pendidikan merupakan kunci utama untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.¹ Maka penyelenggaraan pendidikan perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius dari berbagai pihak demi optimalisasi pencapaian tujuan yang diinginkan.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama sangat menyadari

¹ Sintong Silaban (ed.). *Pendidikan Indonesia Dalam Pandangan Lima Belas Tokoh Pendidikan Swasta*, Bagian IV, (Jakarta: Dasamedia Utama, 1993), h., 65

tentang kenyataan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, seperti rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan. Khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang merata. Sebagian sekolah/madrasah, terutama di kota-kota, menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun sebagian lainnya masih memprihatinkan.²

Winarno Surakhmad menyebutkan rendahnya mutu pendidikan pada dewasa ini bertolak dari asumsi yang salah. Kita menyadari bahwa kita tidak maju-maju, bahkan mengalami *setback*. Seperti hasil pelajaran di sekolah khususnya, semakin merosot mutunya. Bahkan pendidikan kita berada dalam alur yang buntu dan kebuntuan ini adalah musuh dari kemajuan, tidak ada pendidikan yang buntu dapat menghasilkan kemajuan.³ Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas, langkah yang diambil sebagai satu kebijakan adalah melakukan reorientasi penyelenggaraan pendidikan yaitu dari manajemen peningkatan mutu berbasis pusat menuju manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Konsep ini mengandalkan pemberian otonomi yang luas kepada sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan. Partisipasi aktif masyarakat dalam pen-

² Departemen Pendidikan Nasional. 2000. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, h. 3

³ Winarno Surakhmad, "Guru dan Mutu", *Majalah Pendidikan Koridor*, Edisi 3, Depdiknas Propinsi Jawa barat, Bandung, h., 43

didikan dikembalikan kepada kebutuhan keluarga, masyarakat dan pemerintah daerah.

A. Pengertian Pendidikan.

Pendidikan merupakan proses mencerdaskan, membangun dan memanusiakan manusia seutuhnya. Sejalan dengan konsep pendidikan dalam perspektif Islam yaitu *tarbiyyah*. Penekanannya adalah pada proses internalisasi nilai-nilai dan pesan-pesan Ilahiyah untuk mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa.⁴

Menurut Jhon Dewey, pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional kearah alam dan sesama manusia.⁵ Branata, menyebutkan pendidikan adalah usaha yang sengaja diadakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu anak dalam perkembangannya mencapai kedewasaannya.⁶

Ki Hajar Dewantara menyebutkan konsep pendidikan adalah sebagai daya upaya untuk memberikan tuntunan pada segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin yang setinggi-tingginya.⁷ Muri Yusuf menyebutkan pendidikan adalah suatu proses penyesuaian terus

⁴ Departemen Agama RI, *Mukaddimah AL-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid 10 Juz 28-29-30*, edisi disempurnakan, tidak diperjualbelikan, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), h. 719

⁵ Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, (Semarang: Rineka Cipta, 1991), h. 69

⁶ Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ibid.*, h. 69

⁷ Muri Yusuf, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 24

menerus pada setiap fase yang menambah kecakapan di dalam pertumbuhan seseorang.⁸

Ahmad D. Marimba menyebutkan pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian utama.⁹ Mc. Donald memberikan rumusan tentang pendidikan *is a process or an activity which is directed at producing desirable in the behavior of human beings*.¹⁰ Pendidikan adalah suatu proses atau kegiatan yang bertujuan menghasilkan perubahan tingkah laku manusia.

Selanjutnya Winarno Surakhmad menyebutkan pendidikan dalam pengertian pengajaran adalah satu usaha yang bersifat sadar tujuan dengan sistematis terarah pada perubahan tingkah laku, menuju kepada kedewasaan anak didik. Perubahan itu menunjuk pada suatu proses yang harus dilalui. Tanpa proses itu perubahan tidak mungkin terjadi, tanpa proses itu tujuan tak dapat dicapai.¹¹ Dan proses yang dimaksud di sini adalah proses pendidikan.

Ikhsan menyebutkan pendidikan merupakan interaksi pendidik (guru) dengan siswa (peserta didik). Interaksi yang dimaksud yaitu saling mempengaruhi antara pendidik dengan peserta didik¹². Ramayulis,

⁸ Muri Yusuf, *Ibid.*, h. 24

⁹ Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Cetakan II Al Maarif, 1964), h.19

¹⁰ Mc. Donald, *Education Psychology*, (San Francisco: Wadsworth Publishing Company, Inc. 1995) h.4-6

¹¹ Winarno Surakhmad. *Metodologi pengajaran Nasional*, (Bandung: Jemmars, 1979), h. 13

¹² Ikhsan, Fuad. *Dasar-dasar Kependidikan*. (Jakarta: Rineka Citra, 2003), h.3.

pendidikan merupakan segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan¹³.

Menurut Suryadharma Ali pendidikan merupakan elemen fundamental bagi setiap reformasi sosial. Pendidikan menjadi tulang punggung bagi proses perubahan sosial, tidak saja pada level individual tapi juga kehidupan komunal yang lebih besar.¹⁴ Sedangkan pengertian pendidikan dari sudut pandang kebudayaan, Darji Darmodiharjo menjelaskan pendidikan merupakan kebudayaan yang mengarah kepada peradaban. Kebudayaan dalam arti luas adalah wujud perpaduan dari logika (pikiran), etika (kemauan), estetika (perasaan) dan praktika (karya) yang merupakan sistem nilai dan ide vital (gagasan) penting yang dihayati oleh sekelompok manusia (masyarakat) tertentu dalam kurun waktu tertentu pula.¹⁵

Satu pengertian lain yang cukup esensi untuk dapat memahami pengertian pendidikan, dikemukakan oleh Max Muller seperti dikemukakan kembali oleh B.S. Mardiatmadja yaitu pendidikan adalah proses yang terorganisir untuk membantu agar seseorang mencapai bentuk dirinya yang benar sebagai manusia.¹⁶

¹³ Ramayulis. *Ilmu Pendidikan Islam*. Cet. IV; (Jakarta: Kalam Mulia, 2004), h. 1

¹⁴ Suryadharma Ali, *Paradigma Al-Qur'an, Reformasi Epistemologi Keilmuan Islam*, (Malang, UIN MALIKI PRESS, 2013), h. 21

¹⁵ Darji Darmodiharjo. *Peranan Guru Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Dalam Analisis Pendidikan*, (Jakarta: Depdikbud, 1982), h., 34

¹⁶ Mardiatmadja, B.S., *Tantangan Dunia Pendidikan*, Yogyakarta: Kanisius, 1986, h. 39

Pendidikan dalam pengertian yang luas meliputi semua perbuatan atau semua usaha dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuannya, pengalamannya, serta kecakapannya kepada generasi muda, sebagai usaha untuk menyiapkan mereka agar dapat memenuhi fungsi hidupnya, baik jasmani maupun rohani.¹⁷

Dari beberapa konsep tersebut di atas maka dapat disimpulkan pendidikan merupakan proses bimbingan, usaha terorganisir yang diberikan kepada seseorang yang merupakan suatu proses pengalaman yang terus menerus, untuk mengembangkan kemampuan, kecakapan, kecerdasan, kebudayaan, kepribadian yang memenuhi fungsi hidupnya sebagai manusia paripurna yang berperadaban di masa datang.

B. Hakikat Pendidikan

Hakikat pendidikan menurut para ahli memberikan batasan tertentu tentang hakikat pendidikan sesuai sudut pandang masing-masing seperti Langeveld mendefinisikan pendidikan sebagai setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan pada anak tertuju pada pendewasaan, atau membantu anak agar cukup cakap untuk melaksanakan tugas hidupnya.¹⁸ John Dewey menyebutkan pendidikan sebagai proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia.¹⁹ Muhajir, pendidikan diistilahkan sebagai *to*

¹⁷ Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 92.

¹⁸ Langeveld, M.J, *Pedagogik Teoritis dan Sistematis*, Alih Bahasa Firmansyah, (Bandung: Jemmars, 1980)

¹⁹ John Dewey, *Experience And Education*, *Terjemahan*, (Bandung:

educate yang berarti memperbaiki moral dan melatih intelektual.²⁰ Mulyahardjo, pendidikan adalah hidup, pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup, pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hidup.²¹

Ki Hajar Dewantara menyebutkan pendidikan sebagai tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak.²² Maksudnya pendidikan menuntun segala kekuatan pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional menegaskan pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang.²³ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menunjukkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, untuk

Teraju, 2004)

²⁰ Muhajir, Noeng, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial, Tiori Pendidikan, Pelaku Sosial Kreatif*, (Yogyakarta: Raka Sarasins, 2000), h. 20

²¹ Mulyahardjo, Radja, *Pengantar Pendidikan Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-Dasar Pendidikan Pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.3

²² Dewantara, Ki Hajar, *Bagian Pertama Pendidikan*, (Yogyakarta: MLTS, 1977)

²³ UU Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pendidikan Nasional, (Jakarta: Depdikbud, 1989)

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.²⁴

Syaifullah hakikat pendidikan diartikan sebagai kupasan secara konseptual terhadap kenyataan kehidupan manusia baik disadari maupun tidak, manusia telah melaksanakan pendidikan mulai dari keberadaan manusia pada zaman primitif sampai zaman modern, bahkan selama masih ada kehidupan manusia di dunia, pendidikan tetap berlangsung.²⁵ Hakikat pendidikan menurut Suyitno, mengungkapkan bahwa pendidikan yaitu upaya memanusiaikan manusia.²⁶ Dengan demikian makna pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaannya.

Robandi menjelaskan, hidup adalah pendidikan dan pendidikan adalah hidup (*life is education, education is life*).²⁷ Artinya pendidikan merupakan segala pengalaman hidup yang memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan hidup individu berlangsung sepanjang hayat.

²⁴ UU Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Depdiknas, 1989)

²⁵ Saifullah, Ali, *Antra Filsafat dan Pendidikan*. (Surabaya: Usaha Offset Printing, 2004)

²⁶ Suyitno. *Landasan Filosofis Pendidikan Dasar. Modul Perkuliahan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia*. (Jakarta: UPI, 2009), h. 4 Tidak diterbitkan.

²⁷ Robandi, Bambang. *Landasan Pendidikan. Modul Perkuliahan Fakultas Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia, 2005), h. 4.

Hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dalam Rohimin, pendidikan sebagai upaya memajukan budi pekerti dan pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan karakter dan batin), pikiran (*intellect*) dan tubuh anak. Ki Hajar Dewantara menanamkan konsep pendidikan yang utuh yakni *ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani*.²⁸ Maksudnya pendidikan pada hakikatnya mampu menjadi teladan, menjaga keseimbangan dan mendorong serta memotivasi peserta didik, sehingga dapat memajukan kesempurnaan hidupnya.

Kosasih Djahiri menyebutkan hakikat pendidikan merupakan upaya yang terorganisir, berencana dan berlangsung kontinyu (terus menerus sepanjang hayat) kearah membina anak didik menjadi insan paripurna, dewasa dan berbudaya (*civilized*).²⁹ Dengan demikian hakikat pendidikan berlangsung secara terus menerus sepanjang hayat, mulai dari buaian sampai keliang kubur.

Hakikat Pendidikan menurut Islam ada 3 (tiga) pengertian yaitu: 1) Ta³lim artinya memberikan pembinaan/ pengarahan atau proses pemberian bekal pengetahuan. (Ilmu pengetahuan); 2) Tarbiyah artinya

²⁸ Rohimin dkk. (2009). Hakikat Pendidikan. *Makalah Mata Kuliah Pendidikan Nilai*, (Jakarta: Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2009). h. 4.

²⁹ Djahiri, A. Kosasih, *Pendekatan broadfield (METODOLOGI PENGAJARAN)*, (Jakarta : Depdikbud, 1980), h. 3

pengajaran atau proses pembinaan dan pengarahan bagi pembentukan kepribadian dan sikap mental; 3) Ta'dib artinya proses pembinaan dan pengarahan bagi pembentukan kepribadian dan sikap mental dan proses pembinaan terhadap sikap moral dan estetika dalam kehidupan yang lebih mengacu pada peningkatan martabat manusia.

Beberapa asumsi dasar yang berkaitan dengan hakikat pendidikan sebagai berikut: 1) Pendidikan merupakan proses interaksi manusia yang ditandai oleh keseimbangan antara kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidik; 2) Pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkungan hidup yang mengalami perubahan yang semakin pesat; 3) Pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan masyarakat; 4) Pendidikan berlangsung seumur hidup; dan 5) Pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembentukan manusia seutuhnya.

Menurut Rohimin, dkk., Hakikat pendidikan yaitu usaha untuk mengubah perilaku tiap anggota masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai yang disepakati berdasarkan agama, filsafat, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan.³⁰ Paula Freire, hakikat pendidikan adalah kemampuan untuk mendidik diri sendiri. Dalam konteks ajaran agama Islam, hakikat pendidikan adalah mengembalikan fitrah

³⁰ Rohimin dkk. *Hakikat Pendidikan. Makalah Mata Kuliah Pendidikan Nilai*, (Jakarta: Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2011). h. 8.

manusia dengan tuntunan Al-Quran dan hadist.³¹ Alfred North White head mendefinisi pendidikan, menekankan segi keterampilan menggunakan pengetahuan.³²

Tilaar, menggolongkan hakikat pendidikan ke dalam dua kelompok besar yaitu pendekatan reduksionisme dan pendekatan holistik integratif.³³

1. Pendekatan reduksionisme

Teori-teori yang dihasilkan dari pendekatan reduksionisme banyak dipaparkan dalam ilmu pendidikan. Berbagai pendekatan reduksionisme tersebut antara lain;

- a. Pendekatan pedagogis. Pendekatan ini melahirkan *child centered education*, yaitu bahwa pendidikan berpusat kepada kepentingan anak, sehingga cenderung melupakan bahwa anak juga anggota masyarakat;
- b. Pendekatan filosofis. Pendekatan ini melahirkan ilmu pendidikan yang memandang anak sebagai titik tolak proses pendidikan. Nilai-nilai anak yang khas, perkembangan etis dan religi anak dianggap suatu yang harus dihormati dalam pendidikan;
- c. Pendekatan religius. Pendekatan ini melahirkan pemikiran bahwa pendidikan adalah proses mengatur peserta didik menjadi manusia yang religius sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan mempersiapkan peserta didik untuk hidup

³¹ Rohimin dkk. h. 8.

³² Ahmad Tafsir, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002, hal. 6

³³ Tilaar, H. A. R., *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 18 - 32

sesuai dengan kodratnya;

- d. Pendekatan psikologis. Pendekatan ini cenderung mempersempit pendidikan sebagai proses belajar mengajar dan menuntun penguasaan ilmu dan spesialisasi dari tenaga medis;
 - e. Pendekatan negativis. Memandang pendidikan sebagai upaya mengembangkan kepribadian dan membudayakan manusia;
 - f. Pendekatan sosiologis. Memandang peserta didik sebagai anggota masyarakat, oleh karena itu hakikat pendidikan merupakan keperluan untuk hidup bersama dalam masyarakat.³⁴
2. Pendekatan holistik integratif

Hakikat pendidikan menurut pendekatan holistik integratif adalah proses untuk mengembangkan eksistensi peserta didik dalam bermasyarakat, berbudaya dan dalam tata kehidupan lokal, nasional, maupun global.

Dengan demikian peran pendidikan sangat penting dan strategis bagi pembangunan sumberdaya manusia, berbangsa dan bernegara, ditinjau dari sudut hakikat pendidikan baik pendekatan reduksionisme maupun pendekatan holistik integratif, yang muaranya untuk mengubah perilaku tiap anggota masyarakat agar memiliki kemampuan dan mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang disepakati berdasarkan agama, filsafat, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan.

³⁴ Tilaar, H. A. R., *Ibid.*, h. 18 - 32

C. Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan dimaknai berbeda-beda dikalangan para ahli, antara lain ada yang menyebut dengan istilah pencapaian kedewasaan jasmani dan rohani. Maksud pencapaian kedewasaan mencapai manusia seutuhnya yang bertakwa, cerdas, terampil, berbudi pekerti luhur, berkepribadian dan tumbuh semangat kebangsaan dan cinta tanah air, serta bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Menurut Nur Syam, pendidikan di Indonesia bertujuan untuk mengembangkan manusia Indonesia yang memiliki kemampuan vokasional yang baik dan juga memiliki karakter dan kepribadian Indonesia yang luhur.³⁵ Imam Suprayogo menyebutkan pendidikan bertujuan mengantarkan anak didik menjadi manusia seutuhnya.³⁶

Tujuan pendidikan nasional, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, Pendidikan nasional bertujuan untuk mecerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.³⁷

³⁵ Nur Syam, *Dari Bilik Birokrasi, Esai Agama, Pendidikan dan Birokrasi*, (Jakarta: PT. Senama Sejahtera Utama, 2014), h. 69

³⁶ Imam Suprayogo, *Pengembangan Pendidikan Karakter*, (Malang: UIN –Maliki Press, 2013), hal. 26, 27

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 1989 tentang

Tujuan pendidikan nasional merupakan tujuan ideal yang dalam proses upaya pencapaiannya dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan. Oleh karena itu, setiap institusional dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan Nasional telah menetapkan tujuan sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikannya. Dengan harapan *out put* pendidikan dimasa datang, memandang manusia bukan sebagai pekerja tetapi sebagai mitra kerja dengan keunggulannya. Ridono Aidad menyebutkan, seorang *leader* yang keluar dari persaingan global, harus dapat memandang manusia sebagai manusia, bukan pekerja.³⁸ Hal ini berdasarkan satu asumsi bahwa proses pendidikan yang sengaja dilaksanakan semata-mata bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, berkemampuan dan mandiri.

Tujuan Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila adalah meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cerdas dan terampil, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, agar dapat menumbuhkan manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bertanggungjawab atas pembangunan bangsa.³⁹ Tujuan pendidikan nasional merupakan tujuan ideal yang dalam proses upaya pencapaiannya dilaksanakan secara bertahap

Sistem Pendidikan Nasional, pasal 4

³⁸ Ridono Aidad, *Harapan dan Partisipasi masyarakat terhadap peningkatan kualitas pendidikan*, Makalah seminar : *School and Base Education*, 2000, h. 6

³⁹ MPR RI., *GBHN TAP MPR No. II/MPR/1983*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1983), h. 90

sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan.

Tujuan institusional seperti contoh pada jenjang pendidikan menengah umum, tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, nomor 29, menyebutkan bahwa: a) Meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian; b) Meningkatkan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya.⁴⁰

Mashuri menyebutkan tujuan pendidikan adalah membimbing warga Negara Indonesia menjadi manusia Pancasila yang berkepribadian, berkesadaran ketuhanan dan mampu membudayakan alam sekitarnya.⁴¹

E. Mulyana membagi tujuan pendidikan kedalam beberapa jenis yaitu; 1) Tujuan pendidikan secara makro adalah untuk membentuk organisasi pendidikan yang bersifat otonom sehingga mampu melakukan inovasi dalam pendidikan untuk menuju suatu lembaga yang beretika, selalu menggunakan nalar, berkemampuan berkomunikasi social yang positif dan memiliki sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan tangguh; 2) tujuan secara mikro adalah untuk membentuk manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika (beradab dan berwawasan budaya bangsa Indonesia), memiliki nalar (mampu, cakap, cerdas,

⁴⁰ Peraturan Pemerintah RI, No. 29 Tahun 1999, tentang Pendidikan Menengah, pasal 2

⁴¹ Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982), h. 116

kreatif, inovatif dan bertanggungjawab), berkemampuan komunikasi sosial (tertib dan sadar hukum, kooperatif dan kompetitif, demokratis dan berbadan sehat sehingga menjadi manusia mandiri).⁴²

Menurut Said Aqil Siraj, pendidikan berorientasi atau bertujuan pada kesempurnaan lahir dan batin, pada saatnya nanti, proses pendidikan mampu melahirkan pribadi yang mempunyai kepribadian yang paripurna.⁴³

Tujuan pendidikan menurut para ahli, pada hakekatnya tujuan pendidikan merupakan rumusan-rumusan dari berbagai harapan ataupun keinginan manusia.⁴⁴ Pendidikan di Indonesia bertujuan untuk membimbing warga Negara Indonesia, agar menjadi manusia Pancasila yang berkepribadian, berkesadaran kepada Tuhan dan mampu membudayakan alam sekitarnya, bukan hanya semata-mata tuntutan ekonomi, sebab banyak beranggapan bahwa pendidikan merupakan bekal agar nantinya bisa mendapatkan penghasilan yang layak. Sesuai Abu Ahmadi menyebutkan kecenderungan kaum terpelajar untuk menjadi pegawai negeri, maka pendidikan dianggap sebagai paspor untuk tidak melakukan pekerjaan yang mengotori tangan mereka.⁴⁵ Kecenderungan masyarakat/ peserta didik menganggap pendidikan semata-

⁴² E.Mulyana, *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakara Offset, 2004), h. 21

⁴³ Said Aqil Siraj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi Bukan Aspirasi*, (Banten: Pustaka Irvan, 2008), hal. 203

⁴⁴ Hilda Taba dalam Munzir Hitami, *Ibid*, hal. 32

⁴⁵ Abu Ahmadi, *Ibid.*, h. 117

mata untuk status kehidupan pada masa mendatang, tanpa memperhatikan dan melihat tujuan pokok dari pendidikan itu sendiri.

Proses tujuan pendidikan pada visi *macro*, merupakan upaya mewujudkan masyarakat madani sebagai bangsa dan masyarakat dengan tatanan sesuai dengan amanat proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat Indonesia yang memiliki sikap dan wawasan keimanan dan akhlak tinggi, kemerdekaan dan demokrasi, toleransi dan menjunjung hak azasi manusia dan punya pemahaman serta berwawasan global, sedangkan visi *mikro* pendidikan nasional adalah terwujudnya manusia Indonesia yang memiliki sikap dan wawasan keimanan dan akhlak tinggi, kemerdekaan dan demokrasi, toleransi dan menjunjung hak azasi manusia, saling pengertian dan berwawasan global.⁴⁶

Menurut pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. dalam pasal 3 (tiga) dikemukakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁴⁷ Oleh karena

⁴⁶ Peraturan Pemerintah RI, No. 29 Tahun 1999, tentang Pendidikan Menengah, pasal 2

⁴⁷ UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

itu tepat sekali dikatakan pada dasarnya pendidikan mempunyai dua tujuan besar yakni mengembangkan individu dan masyarakat, sesuai Lickona menyebutkan “*smart and good*”.⁴⁸ Berarti tujuan pendidikan untuk mengembangkan individu dan masyarakat agar cerdas dan baik.

Secara elaboratif Bloom, membagi menjadi tujuan pengembangan kognitif, afektif dan psikomotorik yakni pengembangan pengetahuan dan pengertian, nilai dan sikap dan keterampilan psikomotorik. Selanjutnya Bloom (dalam Suwarno, 2006) tujuan pendidikan dibedakan menjadi tiga bagian; 1) Domain kognitif, meliputi kemampuan yang diharapkan dapat tercapai setelah dilakukannya proses belajar mengajar. Kemampuan tersebut meliputi pengetahuan, pengertian, penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi, 2) Domain efektif, berupa kemampuan untuk menerima, menjawab, menilai, membentuk dan mengarakterisasi, 3) Domain psikomotorik, terdiri dari kemampuan persepsi, kesiapan dan respons terpimpin.⁴⁹

Langeveld, membedakan tujuan pendidikan ke dalam enam bagian; 1) Tujuan umum. Tujuan umum merupakan tujuan yang dicapai di akhir proses pendidikan, yaitu tercapainya kedewasaan jasmani dan rohani anak didik. Maksudnya kedewasaan jasmani adalah jika pertumbuhan jasmaniah sudah mencapai batas pertumbuhan maksimal, maka pertumbuhan

pasal 1 butir 1

⁴⁸ Lickona, Thomas, *Educating For Character, How Our Schools Can Teach Respect And Responsibility*, (New York: Bantam Books, 1992), h. 6

⁴⁹ Suwarno, Wiji, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2006), h. 35-36

jasmaniah tidak berlangsung lagi. Kedewasaan rohani adalah peserta didik sudah mampu menolong dirinya sendiri, mampu berdiri sendiri dan mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya; 2) Tujuan khusus. Tujuan khusus adalah tujuan tertentu yang hendak dicapai berdasarkan usia, jenis kelamin, sifat, bakat, intelegensi, lingkungan sosial budaya, tahap-tahap perkembangan dan tuntutan syarat pekerjaan; 3) Tujuan tidak lengkap, maksudnya tujuan yang menyangkut sebagai aspek manusia, misalnya tujuan khusus pembentukan kecerdasan saja, tanpa memperhatikan yang lainnya, jadi tujuan tidak lengkap ini bagian dari tujuan umum yang melengkapi perkembangan seluruh aspek kepribadian; 4) Tujuan sementara. Tujuan sementara adalah proses untuk mencapai tujuan umum tidak dapat dicapai secara sekaligus, karenanya perlu ditempuh setingkat demi setingkat, tingkatan demi tingkatan, diupayakan untuk mencapai tujuan akhir itulah yang dimaksud tujuan sementara; 5) Tujuan *intermedier*. Tujuan *intermedier* adalah tujuan perantara bagi tujuan lainnya yang pokok, misalnya anak dibiasakan untuk menyapu halaman, maksudnya agar kelak mempunyai rasa tanggung jawab; 6) Tujuan *incidental*. Tujuan *incidental* adalah tujuan yang dicapai pada saat-saat tertentu, yang sifatnya seketika dan spontan. Misalnya orang tua menegur anaknya untuk berbicara sopan.⁵⁰

Menurut Ghozali, tujuan pendidikan sesuai dengan

⁵⁰ Langeveld, M.J, *Pedagogik Teoritis dan Sistematis*, Alih Bahasa Firmansyah, (Bandung: Jemmars, 1980)

pandangan hidupnya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu sesuai dengan filsafatnya, yakni memberi petunjuk akhlak dan pembersihan jiwa dengan maksud dibalik itu membentuk individu yang ditandai dengan sifat utama dan takwa. Dengan ini pula keutamaan itu akan merata dalam masyarakat.⁵¹

Hujair AH. Sanaky menyebutkan tujuan menurut visi dan misi pendidikan Islam. Pendidikan Islam sebenarnya telah memiliki visi dan misi ideal, yaitu "*Rohmatan Lil 'Alamin*". Selain itu, konsep dasar filosofis pendidikan Islam lebih mendalam dan menyangkut persoalan hidup multi dimensional, yaitu pendidikan yang tidak terpisahkan dari tugas kekhilafahan manusia, atau lebih khusus sebagai penyiapan kader khalifah dalam rangka membangun kehidupan dunia yang makmur, dinamis, harmonis dan lestari seperti diisyaratkan Allah SWT dalam Al Qur'an. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang ideal, sebab visi dan misinya adalah "*Rohmatan Lil 'Alamin*", yaitu untuk membangun kehidupan dunia yang makmur, demokratis, adil, damai, taat hukum, dinamis dan harmonis.⁵²

Berdasarkan konsep tersebut di atas, maka dapat disintesis tujuan pendidikan adalah menjadi manusia seutuhnya, pencapaian kedewasaan jasmani dan rohani, dan meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manusia cerdas, baik dan terampil, mempertinggi budi pekerti yang luhur, memperkuat

⁵¹ Sulaiman, *Op Cit.*, h. 33

⁵² Hujair AH. Sanaky, *Paradigma Pendidikan Islam; Membangun Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Safiria Insania Press dan MSI, hal. 142

kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, agar dapat menumbuhkan manusia pembangunan yang mandiri serta bertanggungjawab atas pembangunan masyarakat dan bangsa.

D. Fungsi Pendidikan

Menurut pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan fungsi pendidikan adalah sebagai alat yang bertujuan untuk mengembangkan pribadi. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Batasannya sebagai berikut; 1) Pendidikan sebagai proses transformasi budaya, artinya sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi lainnya; 2) Pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi, artinya sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik dan terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Proses pembentukan pribadi meliputi dua sasaran yaitu pembentukan pribadi bagi mereka yang belum dewasa dan bagi mereka yang sudah dewasa atas usaha sendiri dan atau pendidikan diri sendiri; 3) Pendidikan sebagai proses penyiapan warga Negara, artinya sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga Negara yang baik; 4) Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja, artinya kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Pembekalan dasar berupa pembentukan sikap, pengetahuan, keterampilan kerja

pada calon luaran.

Fungsi pendidikan menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional menyebutkan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Horton dan Hunt menyebutkan fungsi pendidikan adalah sebagai berikut; 1) Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah; 2) Mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat; 3) Melestarikan kebudayaan; 4) Menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi; 5) Mengurangi pengendalian orang tua. Melalui pendidikan sekolah orang tua melimpahkan tugas dan wewenangnya dalam mendidik anak kepada sekolah; 6) Menyediakan sarana untuk pembangkangan. Sekolah memiliki potensi untuk menanamkan nilai pembangkangan di masyarakat. Hal ini tercermin dengan adanya perbedaan pandangan antara sekolah dan masyarakat tentang sesuatu hal, misalnya pendidikan seks dan sikap terbuka; 7) Mempertahankan system kelas sosial. Pendidikan sekolah diharapkan dapat mensosialisasikan kepada para anak didiknya untuk menerima perbedaan prestise, privilese dan status yang ada dalam masyarakat. Sekolah juga diharapkan menjadi saluran mobilitas siswa ke status sosial yang lebih tinggi atau paling tidak sesuai dengan status orang tuanya; 8) Memperpanjang masa remaja. Pendidikan sekolah dapat pula memperlambat masa

dewasa seseorang karena siswa masih tergantung secara ekonomi pada orang tuanya.⁵³

Menurut David Popenoe menyebutkan ada empat fungsi pendidikan sebagai berikut; 1) Transmisi (pemin-dahan) kebudayaan; 2) Memilih dan mengajarkan peranan sosial; 3) Menjamin integrasi sosial; 4) Sekolah mengajarkan corak kepribadian; 5) Sumber inovasi sosial.⁵⁴

Berdasarkan konsep tersebut di atas, maka dapat disintesisakan fungsi pendidikan adalah sebagai transformasi kebudayaan, proses pembentukan pribadi, penyiapan tenaga kerja, menjamin integrasi sosial dan peranan sosial, sumber inovasi serta untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

E. Sasaran Pendidikan

Muhammad Fadhil AL Djamaly dalam M. Arifin mengidentifikasi sasaran pendidikan yang digali dari sumber ajaran Al Quran meliputi empat pengembangan fungsi manusia yaitu; 1) Menyadarkan manusia secara individual pada posisi dan fungsinya di tengah makhluk lain, serta tentang tanggungjawab dalam kehidupannya. Dengan kesadarannya, manusia mampu berperan sebagai makhluk Allah SWT; 2) Menyadarkan fungsi

⁵³ Horton, Chaster, L. Hunt, *Sosiologi, Alih Bahasa*, (Jakarta: Erlangga, 1999)

⁵⁴ Popenoe, David, *Sociology*, (New York: Prentice Hall Inc, 1989)

manusia dalam hubungannya dengan masyarakat, serta tanggungjawabnya terhadap ketertiban masyarakat. Oleh karena itu manusia harus mengadakan interrelasi dan interaksi dengan sesamanya dalam kehidupan bermasyarakat; 3) Menyadarkan manusia terhadap Pencipta alam dan mendorongnya untuk beribadah kepadaNya; 4) Menyadarkan manusia tentang kedudukannya terhadap makhluk lain dan membawanya agar memahami hikmah Tuhan menciptakan makhluk lain, serta memberikan kemungkinan kepada manusia untuk mengambil manfaatnya.⁵⁵

Sasaran pendidikan untuk semua anak manusia. Dirjen UNESCO, Irina Bokova, mengatakan tercapai kemajuan yang besar dalam pendidikan global, dengan ditandatangani enam tekad global oleh 164 negara pada bulan April 2000 dengan tujuan meningkatkan pendidikan secara sistematis. Enam tekad tersebut yaitu: 1) Memperluas perawatan dan pendidikan dini; 2) Pendidikan dasar global; 3) Akses yang sama untuk belajar; 4) Melek huruf dewasa; 5) Kesetaraan gender; 6) Peningkatan kualitas pendidikan.

F. Proses Pendidikan

Proses pendidikan tidak terlepas dari kegiatan belajar mengajar. Ahmad Zayadi menyebutkan belajar dan pembelajaran bahwa belajar merupakan proses internal siswa dan pembelajaran merupakan kondisi eksternal belajar. Dari segi guru belajar merupakan akibat tindakan pembelajaran.⁵⁶

⁵⁵ M. Arifin, *Ibid.*, h. 33-34

⁵⁶ Dr. Ahmad Zayadi, M.Pd dan Abdul Majid, S.Ag, M.Pd. *Tadzkirah:*

Dalam lingkup pendidikan, belajar merupakan hal kompleks. Kompleksitas belajar dapat dipandang dari dua subjek yaitu siswa dan guru; 1) Siswa, proses belajar dialami sebagai suatu proses. Siswa mengalami proses mental dalam menghadapi bahan belajar. Bahan belajar itu sangat beragam, baik bahan-bahan yang dirancang dan disiapkan secara khusus oleh guru, ataupun bahan belajar yang ada di alam sekitar yang tidak dirancang secara khusus tapi bisa dimanfaatkan siswa; 2) Guru, proses belajar itu dapat diamati secara tidak langsung. Artinya proses belajar merupakan proses internal siswa dapat dipahami oleh guru. Proses belajar itu tampak lewat perilaku siswa dalam mempelajari bahan ajar. Perilaku belajar itu tampak pada perilaku hasil pembelajaran. Perilaku belajar itu merupakan respons siswa terhadap belajar dan pembelajaran yang dilakukan guru. Belajar pula dapat diartikan memahami sesuatu yang baru dan kemudian memaknainya dan mempraktekannya.

Menurut Usman aktivitas mengajar dan belajar itu memang berbeda tetapi tetap tidak dapat dipisahkan. Perbuatan belajar dari peserta didik terjadi sebagai akibat dari perbuatan mengajar atau mendidik dari seorang pendidik. Proses interaktif antara perbuatan mengajar pendidik dan perbuatan belajar peserta didik ini biasa disebut proses pembelajaran.⁵⁷

Selanjutnya Usman menyebutkan proses

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berdasarkan Pendekatan Kontekstual. (Surabaya: ELKAF, 2004), h. 7-9

⁵⁷Dr. Usman, MAg. *Filsafat Pendidikan.* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2003), h. 315

pembelajaran dalam Islam berlangsung antara pendidik dan peserta didik, diikat oleh sebuah jalinan kerjasama untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari nilai-nilai yang berpusat pada kebaikan dan kebenaran Islam. Dengan kata lain, proses pembelajarannya menjadi terpusat pada nilai (*value centered*). Ini berarti bahwa kegiatan mengajar dan membimbing yang dilakukan oleh pendidik dan aktivitas belajar yang dilakukan peserta didik berlangsung dalam pengendalian nilai-nilai Islam. Oleh karena itu proses pembelajaran dalam Islam tidak hanya terpusat pada pendidik dan atau peserta didik tetapi juga terpusat pada nilai.⁵⁸

Standar Proses pembelajaran dijabarkan dalam Permendikbud Nomor 65 tahun 2013, sebagai suatu kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan, ditingkat sekolah, seperti kriteria, pelaksanaan pembelajaran, pencapaian kompetensi lulusan. Standar proses tersebut merupakan suatu tahapan proses pembelajaran yang menjabarkan mengenai kriteria atau ukuran tertentu yang menjadi dasar penilaian atau penetapan, terkait pelaksanaan pembelajaran guna mencapai kompetensi lulusan.⁵⁹

Permendikbud Nomor 65 tahun 2013 mengamanatkan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan harus diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang

⁵⁸Dr. Usman, MAg. *Ibid.*, h.322-325

⁵⁹Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses Pembelajaran

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.⁶⁰ Kaitan dengan proses pendidikan, baik tingkat nasional maupun tingkat kelas dinilai sukses jika kompetensi lulusan yang ditargetkan tercapai dengan sempurna. Standar proses merupakan sebuah pedoman, tahapan langkah bagi para guru saat mereka memberikan pembelajaran dalam kelas, dengan harapan proses pendidikan yang berlangsung bisa efektif, efisien dan inovatif.

Pada saat inilah keahlian guru, sebagai ujung tombak suksesnya proses pendidikan dituntut memiliki keahlian dan kreativitas yang tinggi sehingga mampu mengemas proses pembelajaran sesuai dengan yang diamanatkan. Sehingga proses pembelajaran mampu menciptakan suasana seperti tahapan tersebut di atas, kualitas pendidikan di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sehingga proses pendidikan di Indonesia mampu menyaingi sistem pendidikan di beberapa negara maju lainnya. Maka dari itu, pada proses penerapan atau taktis pelaksanaan pembelajaran setiap satuan pendidikan dituntut untuk mampu melakukan perencanaan pembelajaran dengan baik, sehingga pelaksanaan proses pembelajaran dapat berjalan semaksimal mungkin, serta penilaian proses pembelajaran bisa diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan.

⁶⁰ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses Pembelajaran

G. Komponen Pendidikan

Komponen proses pendidikan sebagai berikut; 1) Tujuan pendidikan; 2) Peserta didik; 3) Pendidik; 4) Metode pendidikan; 5) Isi pendidikan/ materi pendidikan; 6) Lingkungan pendidikan; 7) Alat dan fasilitas pendidikan. Secara rinci dapat dibahas secara rinci sebagai berikut;

Pertama, tujuan pendidikan merupakan pencapaian kedewasaan jasmani dan rohani, artinya sebagai pencapaian kedewasaan mencapai manusia seutuhnya yang bertakwa, cerdas, terampil, berbudi pekerti luhur, berkepribadian dan tumbuh semangat kebangsaan dan cinta tanah air, serta bertanggungjawab atas pembangunan bangsa. Tujuan pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia, maksudnya untuk menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah yang selalu bertakwa kepadaNya dan dapat mencapai kehidupan yang berbahagia di dunia dan akhirat sesuai Q.S. Al-Dzariat:56; dan Q.S. ali Imran: 102).

Dalam konteks sosiologi pribadi yang bertakwa menjadi rahmatan lil 'alamin, baik dalam skala kecil maupun besar. Tujuan umum pendidikan Islam untuk mewujudkan manusia sebagai hamba Allah. Jadi menurut Islam, pendidikan haruslah menjadikan seluruh manusia yang menghambakan kepada Allah. Maksudnya menghambakan diri ialah beribadah kepada Allah. Islam menghendaki agar manusia dididik supaya ia mampu merealisasikan tujuan hidupnya sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah. Tujuan hidup manusia itu menurut Allah ialah beribadah

kepada Allah. Seperti dalam surat a Dzariyat ayat 56 : “*Dan Aku menciptakan Jin dan Manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada-Ku*”. Sebagian orang mengira ibadah itu terbatas pada menunaikan shalat, shaum pada bulan Ramadhan, mengeluarkan zakat, ibadah Haji serta mengucapkan syahadat. Tetapi sebenarnya ibadah itu mencakup semua amal, pikiran dan perasaan yang dihadapkan kepada Allah. Ibadah ialah jalan hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan serta segala yang dilakukan manusia berupa perkataan, perbuatan, perasaan, pemikiran yang disangkutkan dengan Allah dengan niat ibadah.

Kedua, peserta didik sangat menunjang dalam proses pendidikan, dengan perkembangan konsep pendidikan yang tidak hanya terbatas pada usia sekolah saja memberikan konsekuensi pada pengertian peserta didik. Secara etimologi peserta didik adalah anak didik yang mendapat pengajaran ilmu. Secara terminologi peserta didik adalah individu yang mengalami perubahan dan perkembangan serta sangat memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian sebagai bagian dari proses pendidikan. Dengan demikian peserta didik merupakan seorang individu yang sedang mengalami fase perubahan, perkembangan atau pertumbuhan baik segi fisik dan mental maupun dari fikiran. Sebagai individu yang sedang mengalami fase perubahan, perkembangan dan perubahan tentu saja peserta didik sangat memerlukan bantuan, bimbingan dan arahan untuk menuju kesempurnaan. Seperti waktu peserta didik berada pada usia balita, tentu

saja selalu mendapat bantuan dari orang tua ataupun saudara yang lebih tua. Dengan demikian peserta didik merupakan barang mentah yang harus diolah dan dibentuk sehingga menjadi suatu produk pendidikan. Hal demikian dapat disebutkan bahwa setiap peserta didik memiliki eksistensi atau kehadiran dalam sebuah lingkungan, seperti halnya sekolah, keluarga, pesantren bahkan dalam lingkungan masyarakat. Dalam proses ini peserta didik sangat banyak menerima bantuan yang mungkin tidak disadarinya, sebagai contoh seorang peserta didik mendapatkan pena untuk menulis yang dibeli dari sebuah toko. Dapat dibayangkan betapa banyak hal yang dilakukan orang lain dalam proses pembuatan dan pendistribusian pena tersebut, mulai pembuatan, penjualan sehingga sampai ke tangan seorang peserta didik.

Ketiga, pendidik merupakan salah satu komponen penting dalam pendidikan. Terdapat beberapa jenis pendidik dalam konsep pendidikan sebagai gejala kebudayaan, yang tidak terbatas pada pendidik di sekolah saja. Ditinjau dari lembaga pendidikan muncullah beberapa individu yang tergolong dalam pendidik. Guru sebagai pendidik dalam lembaga sekolah, orang tua sebagai pendidik dalam lingkungan keluarga dan pimpinan masyarakat baik formal maupun nonformal sebagai pendidik dilingkungan masyarakat. Dengan demikian dapat dikategorikan pendidik sebagai berikut; 1) orang dewasa, maksudnya orang dewasa disebut sebagai pendidik berdasarkan sifat umum kepribadian orang dewasa, 2) orang tua, maksudnya

orang tua merupakan pendidik yang kodrati dalam lingkungan keluarga. Ini berarti orang tua sebagai pendidik utama dan yang pertama yang berlandaskan pada hubungan cinta kasih bagi keluarga atau anak yang lahir di lingkungan keluarga mereka, 3) Guru/pendidik di sekolah/madrasah, maksudnya guru merupakan pendidik di sekolah yang secara langsung maupun tidak langsung mendapatkan tugas dari orang tua atau masyarakat untuk melaksanakan pendidikan. Karena itu kedudukan guru sebagai pendidik harus memenuhi persyaratan-persyaratan, baik persyaratan pribadi maupun persyaratan jabatan. Persyaratan pribadi maksudnya ketentuan yang terkait dengan nilai dari tingkahlaku yang dianut, kemampuan intelektual, sikap dan emosional. Sedangkan persyaratan jabatan (profesi) terkait pengetahuan yang dimiliki baik yang berhubungan dengan pesan yang ingin disampaikan maupun cara penyampaiannya dan memiliki filsafat pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan, 4) pemimpin masyarakat dan pemimpin agama, maksudnya peran pemimpin masyarakat menjadi pendidik berdasarkan pada aktifitas pemimpin dalam mengadakan pembinaan atau bimbingan kepada anggotayang dipimpin. Pemimpin keagamaan sebagai pendidik berdasarkan aktifitas pembinaan atau pengembangan sifat kerohanian manusia, yang didasarkan pada nilai-nilai keagamaan.

Keempat, metode pendidikan dalam interaksi pendidikan tidak terlepas dari metode atau cara pendidikan dilaksanakan, terdapat beberapa metode yang

dilakukan dalam mendidik; 1) metode diktatoran, metode ini bersumber dari teori empiris yang menyatakan bahwa perkembangan manusia semata-mata ditentukan oleh faktor luar manusia, metode ini menimbulkan sikap diktator dan otoriter, pendidik yang menentukan segalanya, 2) metode liberal, metode ini berasal dari teori naturalisme yang menyebutkan bahwa perkembangan manusia itu sebagian besar ditentukan oleh kekuatan dari dalam yang secara wajar ada pada diri manusia. Pandangan ini menimbulkan sikap bahwa pendidik jangan terlalu banyak ikut campur terhadap perkembangan anak. Membiarkan anak berkembang sesuai dengan kodratnya secara bebas, 3) metode demokratis, metode ini bersumber pada teori konvergensi yang mengatakan bahwa perkembangan manusia tergantung pada faktor dalam dan luar. Maksudnya pendidik dan peserta didik sama-sama penting dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan.

Kelima, isi/ materi pendidikan memiliki kaitan yang erat dengan tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan perlu disampaikan kepada peserta didik isi/ materi pendidikan yang disebut dengan kurikulum dalam pendidikan formal. Materi atau kurikulum yang disampaikan harus sesuai dengan tujuan pendidikan yang mengandung nilai dan pandangan hidup bangsa. Dan dalam menetapkan bahan/ materi harus dipertimbangkan karakter subjek didik dan fase perkembangannya. Serta harus disesuaikan dengan kemampuan peserta didik, menarik perhatian, minat, umur, bakat, jenis kelamin, latar belakang

dan pengalaman peserta didik. Menurut Hartoto guru harus memilih bahan/ materi yang perlu diberikan dan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut; 1) bahan/ materi harus sesuai dan menunjang tujuan yang perlu diberikan; 2) urgensi bahan yaitu penting untuk diketahui oleh peserta didik; 3) nilai praktis atau kegunaannya diartikan sebagai makna bahan itu bagi kehidupannya sehari-hari; 4) bahan tersebut merupakan bahan wajib, sesuai dengan tuntutan kurikulum; 5) bahan yang susah diperoleh sumbernya, perlu diupayakan untuk diberikan oleh guru. Untuk bahan yang mudah diperoleh sebaiknya ditugaskan untuk dipelajari, sedangkan guru hanya berbicara pokok-pokoknya saja.⁶¹

Keenam, Lingkungan pendidikan meliputi segala segi kehidupan atau kebudayaan. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa pendidikan sebagai gejala kebudayaan, yang tidak membatasi pendidikan pada sekolah saja. Lingkungan pendidikan merupakan segala sesuatu yang ada di sekeliling anak didik dan komponen-komponen pendidikan yang lain. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi termasuk kondisi masyarakat terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu. Seperti lingkungan tempat pendidikan berlangsung dan lingkungan tempat anak bergaul. Lingkungan ini kemudian secara khusus

⁶¹ <https://fatamorghana.wordpress.com/2009/04/16/isimateri-pendidikan/>

disebut sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan jenis dan tanggung jawab yang secara khusus menjadi bagian dari karakter lembaga tersebut. Pengertian lembaga pendidikan adalah organisasi atau kelompok manusia yang karena satu dan hal lain memikul tanggung jawab atas terlaksananya pendidikan. Badan pendidikan itu bertugas memberi pendidikan kepada si terdidik (Marimba, 1980). Secara umum fungsi lembaga-lembaga pendidikan adalah menciptakan situasi yang memungkinkan proses pendidikan dapat berlangsung sesuai tugas yang bebaskan kepadanya karena situasi lembaga pendidikan harus berbeda dengan situasi lembaga lain (Azra, 1998).

Ketujuh, Alat dan fasilitas pendidikan sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan, dengan adanya fasilitas pendidikan maka proses pendidikan berjalan dengan lancar, sehingga tujuan pendidikan mudah dicapai. Aspek utama yang harus mendapatkan perhatian dalam proses dan setiap pengelola pendidikan adalah mengenai fasilitas pendidikan. Sarana pendidikan umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang dalam proses pendidikan, seperti gedung, ruang belajar atau kelas, alat-alat atau media pendidikan seperti meja, kursi, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan fasilitas atau prasarana adalah yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti halaman, kebun atau taman sekolah, jalan menuju ke sekolah dan lainnya. Untuk mewujudkan pemerataan alat dan fasilitas pendidikan Presiden Joko

Widodo (Jokowi) pada tanggal 30 Desember 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 122 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang percepatan penyediaan infrastruktur prioritas. Infrastruktur pendidikan meliputi sarana pembelajaran, laboratorium, pusat pelatihan, pusat penelitian, sarana prasarana penelitian dan pengembangan, ruang praktik siswa, perpustakaan, fasilitas pendukung pembelajaran dan pelatihan.

H. Landasan Pendidikan

Landasan pendidikan merupakan unsur strategis dan sangat penting untuk mengembangkan pendidikan bagi individu, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Mengenai landasan pendidikan terdapat beragam istilah. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, landasan berarti sebagai alas, dasar atau tumpuan. Istilah landasan dikenal pula sebagai fundasi.⁶² Dengan demikian dapat dipahami landasan adalah alas atau dasar pijakan, titik tumpu atau titik tolak dari suatu hal, atau suatu fundasi tempat berdirinya sesuatu hal. Dan landasan pendidikan merupakan seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak, tempat berpijak atau panduan pada proses pendidikan.

Landasan pendidikan tersebut adalah landasan agama, filosofis, hukum, psikologis, sejarah, sosial budaya, sosiologis, ekonomi dan landasan ilmiah dan teknologi (IPTEK), memegang peranan penting dalam

⁶² Depdikbud. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal. 560

menentukan tujuan pendidikan serta mendorong pendidikan untuk menjemput masa depan.

1. Landasan Agama.

Landasan agama dalam duna pendidikan merupakan landasan strategis dan sangat penting. Yang paling mendasari dari landasan agama adalah karena landasan agama dicitakan oleh Allah SWT, berupa Firman Allah SWT (Al Qu'ran) dan AL Hadist berupa risalah (tuntunan) yang dibawa oleh Rasulullah yakni Nabi Muhammad SAW. Landasan agama diciptakan untuk umat manusia, berisikan tentang tuntunan, pedoman hidup manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Landasan agama juga sebagai rahmat bagi sekalian alam semesta.

Pendidikan memiliki kedudukan yang sangat mulia, secara substantifnya terdapat dalam Al Quran Surat Al Alaq ayat 1 – 5 sebagai berikut; 1) Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan; 2) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah; 3) Bacalah dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah; 4) yang mengajarkan manusia dengan perantara Kalam; 5) Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.⁶³

Dalam Al Qur'an Surat Al Mujadalah ayat 11. Allah SWT mengangkat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.⁶⁴ Maksudnya orang yang mempunyai

⁶³ Departemen Agama RI, *Mukadimah AL-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 10 Juz 28-29-30, edisi disempurnakan, tidak diperjualbelikan, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), h. 719

⁶⁴ Departemen Agama RI., *Ibid.*, h. 22

derajat yang paling tinggi disisi Allah SWT adalah orang yang beriman dan berilmu. Ilmu yang diamalkan sesuai dengan Allah SWT dan RasulNya.

Hadist Rasulullah Muhammad SAW, carilah ilmu dari buaian sampai keliang lahat.⁶⁵ Mencari ilmu diwajibkan bagi laki-laki dan perempuan. Telah aku tinggalkan 2 perkara yang jika engkau memegang teguh keduanya, engkau tidak akan tersesat, kedua perkara tersebut adalah Al Qur'an dan Al Hadist, barang siapa menginginkan kebahagiaan di dunia, maka dengan ilmu, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka dengan ilmu dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya (dunia dan akhirat) maka dengan ilmu (HR. Turmudzi).

⁶⁵ kitab hadis yang mencantumkan hadis tersebut, disebut "al-kutub al-sittah"-yaitu 6 kitab yang menghimpun hadis-hadis Rasulullah yang terdiri dari Shohih Bukhari dan Muslim, Sunan Abi Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i-maupun "al-kutub at-tis'ah"-yaitu 9 kitab induk hadis yang terdiri dari al-kutub as-sittah ditambah al-Muwatho Imam Malik, Musnad Imam Ahmad dan Sunan Ad-Darimy. Bahkan, bukan hanya di kitab-kitab hadis induk. Ungkapan yang diklaim sebagai hadis Nabi di atas sama sekali tidak terdapat pula dalam puluhan kita-kitab hadis lain yang mencakup berbagai kitab al-jawami', kitab-kitab sunan, musnad, al-majami', al-muwatho', kitab-kitab al-ilal was su'alat, sampai kitab-kitab muskyilat wa ghoroiubil hadis dan takhrij al-ahadits. Hal ini disimpulkan setelah dilakukan pencarian "searching" dan penelitian (takhrij) dengan bantuan Program al-Maktabah asy-Syamilah al-Ishdar 3.32. Hadis, atau ungkapan di atas, hanya ditemukan dalam Kitab Kasyf adz-Dzunun karya Musthofa bin Abdullah (1/52) tanpa penyebutan sanad periwayatannya. Juga Kitab Abjad al-'ilmi tulisan Muhammad Shiddiq Hasan Khan al-Qanuji yang juga tanpa menyebutkan sanadnya dan bahkan tanpa menyatakannya sebagai hadis Nabi SAW, tapi hanya menyebut "qiila" (maknya = "katanya atau dikatakan") dalam bentuk shighat tamridh (bentuk pasif dalam periwayatan hadis yang digunakan oleh ahli hadis untuk mengutip riwayat yang diragukan sumber dan validitasnya). Karena tidak adanya kitab hadis yang memuat hadis ini dengan sanad yang dapat diteliti, maka Syaikh Abdul Azis bin Abdullah bin Baz rahimahullah menilainya La ashla lahu (tidak ada sumbernya berupa sanad) (Arsip Multaqa Ahlil hadis-3, Al-Maktabah Asy-Syamilah).

Meskipun seringkali terjadi pertentangan antar agama dan filsafat, namun terdapat beberapa tokoh besar yang mengemukakan pandangan filosofis yang berpijak pada filsafat agama seperti Ibnu Sina atau Avicenna (980-1037), Al-Gazali (1058-1111) dan Ibnu Rush atau Averroes (1126-1198) dari agama Islam, st, Thomas Aquinas (1225-1274) dari agama Katolik yang dapat dianggap puncak skolastik Kristen dengan filsafat neothomisme Lao-tse dari Tacis China, Rabidranat tagore di India dan sebagainya.

Dalam UU RI No. 2 Tahun 1989 Pasal 10 Ayat 4 dinyatakan bahwa Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral dan nilai keterampilan.⁶⁶ Maksudnya bahwa agama merupakan suatu landasan pendidikan yang berakar dari keluarga.

Selanjutnya disamping sekolah dan keluarga, proses pendidikan juga dipengaruhi oleh berbagai kelompok sosial dalam masyarakat, seperti kelompok keagamaan, organisasi pemuda, pramuka, dll. Pendidikan sebagai usaha sadar yang sistematis selalu bertolak dari sejumlah landasan serta pengindahan sejumlah asas-asas tertentu. Landasan dan asas tersebut sangat penting, karena pendidikan merupakan pilar utama terhadap perkembangan manusia dan masyarakat.

2. Landasan Filosofis

Menurut Pirdata, filsafat telah ada sejak manusia

⁶⁶Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional

lahir, manusia adalah makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat sudah memiliki gambaran dan cita-cita yang mereka kejar dalam hidupnya, baik secara individu maupun secara kelompok.⁶⁷ Selanjutnya Pirdata menyebutkan filsafat pendidikan ialah hasil pemikiran dan perenungan secara mendalam sampai akar-akarnya mengenai pendidikan.⁶⁸ Maksudnya semakin berkembang budaya, adat istiadat suatu suku bangsa, serta norma, hukum yang berlaku dalam masyarakat maka semakin berkembang pendidikan, karena hal ini akan memotivasi masyarakat melakukan aspek-aspek tertentu pada pendidikan untuk memenuhi kebutuhan cita-cita mereka.

Landasan filosofis bersumber dari pandangan-pandangan dalam filsafat pendidikan, menyangkut keyakinan terhadap hakekat manusia, keyakinan tentang sumber nilai, hakekat pengetahuan dan tentang kehidupan yang lebih baik dijalankan. Aliran filsafat yang kita kenal sampai saat ini adalah Idealisme, Realisme, Perennialisme, Esensialisme, Pragmatisme dan Progresivisme dan Ekstensialisme.

Pertama, Esensialisme adalah mashab pendidikan yang mengutamakan pelajaran teoretik atau bahan ajar *esensial*, *kedua, Perennialisme* adalah aliran pendidikan yang megutamakan bahan ajaran konstan yakni kebenaran, keindahan, cinta kepada kebaikan universal, *ketiga, Pragmatisme* dan *Progresifme*. *Pragmatisme* adalah aliran filsafat yang memandang segala sesuatu

⁶⁷ Pirdata, Made, 2007 *Landasan Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta

⁶⁸ Pirdata, Made, *Ibid.*, h. 68

dari nilai kegunaan praktis, di bidang pendidikan, aliran ini melahirkan *progresivisme* yang menentang pendidikan tradisional, *keempat*, *Rekonstruksionisme* adalah mazhab filsafat pendidikan yang menempatkan sekolah/lembaga pendidikan sebagai pelopor perubahan masyarakat.

Pancasila sebagai Landasan Filosofis Sistem Pendidikan Nasional Pasal 2 UU RI No.2 Tahun 1989, pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sedangkan Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1978 tentang P4 menegaskan pula bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia dan dasar negara Indonesia.

3. Landasan Hukum (*Yuridis*)

Landasan hukum pendidikan adalah peraturan yang dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Landasan dalam hukum berarti melandasi atau mendasari atau titik tolak. Seperti landasan hukum seorang guru boleh mengajar dengan adanya keputusan tentang pengangkatannya sebagai guru. Yang melandasi guru menjadi guru adalah keputusan dan hak-haknya.

Undang-undang Pendidikan: *pertama*, Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal-pasal yang berhubungan dengan pendidikan dalam Undang Undang Dasar 1945 hanya 2 pasal, yaitu pasal 31 dan 32. Pasal 31 mengatur tentang pendidikan kewajiban pemerintah membiayai wajib belajar 9 tahun di SD dan SMP, anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD,

dan sistem pendidikan nasional. Sedangkan pasal 32 mengatur tentang kebudayaan.⁶⁹

Kedua, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang undang ini selain memuat pembaharuan visi dan misi pendidikan nasional, juga terdiri dari 77 Pasal yang mengatur tentang ketentuan umum(istilah-istilah terkait dalam dunia pendidikan), dasar, fungsi dan tujuan pendidikan nasional, prinsip penyelenggaraan pendidikan, hak dan kewajiban warga negara, orang tua dan masyarakat, peserta didik, jalur jenjang dan jenis pendidikan, bahasa pengantar, estandar nasional pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pendanaan pendidikan, pengelolaan pendidikan, peran serta masyarakat dalam pendidikan, evaluasi akreditasi dan sertifikasi, pendirian satuan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga negara lain, pengawasan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.⁷⁰

Ketiga, Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Undang-undang ini memuat 84 Pasal yang mengatur tentang ketentuan umum (istilah dalam undang-undang), kedudukan fungsi dan tujuan, prinsip profesionalitas, seluruh peraturan tentang guru dan dosen dari kualifikasi akademik, hak dan kewajiban sampai organisasi profesi dan kode etik, sanksi bagi guru dan dosen yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya, ketentuan peralihan

⁶⁹ Undang-undang Dasar 1945

⁷⁰ Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

dan ketentuan penutup.⁷¹

4. Landasan Psikologis

Psikologis merupakan ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia. Jiwa atau psikis dapat dikatakan inti dan kendali kehidupan manusia, yang selalu berada dan melekat pada diri manusia itu sendiri.

Kejiwaan merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan. Dalam upaya memenuhi kebutuhannya, manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Interaksi dengan lingkungannya itu menyebabkan manusia mengembangkan kemampuannya melalui proses belajar, semakin kuat motif sebagai upaya pemenuhan kebutuhan itu, semakin kuat pula proses belajar yang terjadi dan pada gilirannya semakin tinggi hasil belajar yang dapat dicapainya.

Abraham Maslow mengemukakan kategorisasi kebutuhan-kebutuhan menjadi enam kelompok, mulai dari yang paling sederhana dan mendasar yang meliputi: 1) Kebutuhan fisiologis; 2) Kebutuhan rasa aman; 3) Kebutuhan cinta dan pengakuan; 4) Kebutuhan harga diri (*esteem needs*); 5) Kebutuhan untuk aktualisasi diri; 6) Kebutuhan untuk mengetahui dan memahami.⁷²

Kajian psikologis yang erat hubungannya dengan pendidikan adalah yang berkaitan dengan kecerdasan, berpikir, dan belajar. Kecerdasan umum (*inteligensi*) ataupun kecerdasan dalam bidang tertentu (bakat) banyak dipengaruhi oleh kemampuan potensial yang

⁷¹ Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

⁷² Abraham, M. Maslow. (1996). *Motivasi dan Kepribadian I Teori Motivasi dan Pendekatan Hierarki Kebutuhan Manusia*. (Jakarta: PT.PBP, 1996)

hanya aktual apabila dikembangkan dalam situasi yang kondusif. Kecerdasan aktual terbentuk karena adanya pengalaman. Jean Piaget berpendapat bahwa kecerdasan merupakan internalisasi pengalaman. Indeks kecerdasan, yang sering dikenal dengan IQ, dapat diukur dengan tes-tes kecerdasan. Pengembangan kecerdasan itu terwujud dalam berbagai bentuk kemampuan berpikir, baik berpikir *konvergen* (memusat) dan *divergen* (memencar), maupun berpikir intuitif dan reflektif.⁷³

Perkembangan peserta didik sebagai landasan psikologi, salah satu aspek dari pengembangan manusia seutuhnya adalah yang berkaitan dengan perkembangan kepribadian, utamanya agar dapat diwujudkan kepribadian yang mantap dan mandiri. Meskipun terdapat variasi pendapat namun dapat dikemukakan beberapa prinsip umum perkembangan kepribadian. Disebut sebagai prinsip-prinsip umum karena: 1) Prinsip itu mungkin dirumuskan dengan variasi tertentu dalam berbagai teori kepribadian; 2) Prinsip itu tampak bervariasi pada kepribadian manusia tertentu (sebab kepribadian itu unik).

Salah satu prinsip perkembangan kepribadian ialah bahwa perkembangan kepribadian mencakup aspek behavioral maupun aspek motivasional: dengan perkembangan kepribadian, bukan hanya perubahan dari tingkah laku yang tampak tetapi juga perubahan dari mendorong tingkah laku itu. Prinsip kedua dari

⁷³ Piaget, Jean, & Barbel Inhelder, *Psikologi Anak*, Terj. Miftahul Jannah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cet. 1, 2010.

perkembangan kepribadian adalah bahwa kepribadian mengalami perkembangan yang menerus dan tidak terputus-putus meskipun pada suatu periode tertentu mengalami perkembangan yang menerus dibandingkan dengan periode yang lainnya.

5. Landasan Sejarah

Sejarah merupakan informasi lampau, yang mengandung kejadian, model, konsep, teori, praktik, moral, cita-cita, bentuk dan lain sebagainya. Informasi lampau terutama berkaitan dengan kebudayaan. Demikian juga dalam bidang pendidikan, para ahli pendidikan sebelum menekuni salah satu bidang pendidikan, terlebih dahulu mengkaji sejarah tentang pendidikan, baik yang bersifat lokal, nasional maupun internasional.

Landasan historis pendidikan Nasional Indonesia tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang sejak zaman kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit sampai datangnya bangsa lain yang menjajah serta menguasai bangsa Indonesia. Pada akhirnya bangsa Indonesia menemukan jati dirinya, yang di dalamnya tersimpul ciri khas, sifat dan karakter bangsa Indonesia yang berbeda dengan bangsa lain. Para pendiri negara kita merumuskan negara kita dalam suatu rumusan yang sederhana namun mendalam, meliputi 5 prinsip (lima sila) yang kemudian diberi nama Pancasila.

Secara historis nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan

menjadi dasar negara Indonesia secara objektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Sehingga asal nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri.

Konsekuensinya adalah Pancasila berkedudukan sebagai dasar filsafat negara serta ideologi bangsa dan negara, bukan sebagai suatu ideologi yang menguasai bangsa, namun justru nilai-nilai dari sila-sila Pancasila itu melekat dan berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri. Maka landasan sejarah merupakan landasan pendidikan, ditinjau historis Pendidikan Nasional Indonesia merupakan pandangan masa lalu atau pandangan retrospektif, seperti; kejadian, model, konsep, teori, praktik, moral, cita-cita bangsa masa lampau. Dengan demikian pandangan ini melahirkan studi-studi historis tentang proses perjalanan pendidikan nasional di Indonesia.

6. Landasan Kultural

Kebudayaan merupakan bagian hidup manusia yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Setiap kegiatan manusia hampir tidak pernah lepas dari unsur budaya, sebab sebagian besar dari kegiatan manusia dilakukan secara kelompok, baik kegiatan di rumah, di kantor, di perusahaan, di perkebunan, di bengkel, hampir semuanya dilakukan oleh lebih dari seorang. Ini berarti unsur budaya ada pada kegiatan-kegiatan tersebut, seperti membenahi rumah agar indah dan rapi merupakan unsur budaya dan alat untuk mengajarkan cara mengerjakan dengan baik juga merupakan suatu budaya.

Kebudayaan selalu terkait dengan pendidikan, utamanya belajar. Kebudayaan dalam arti luas dapat berwujud: 1) Ideal seperti ide, gagasan, nilai dan sebagainya; 2) Kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat, dan 3) Fisik yakni benda hasil karya manusia.

Baik kebudayaan yang berwujud ideal, kelakuan dan teknologi, dapat diwujudkan melalui proses pendidikan. Contoh dalam penggunaan bahasa, setiap masyarakat dapat dikatakan mengajarkan anak-anak mengatakan sesuatu, kapan hal itu dapat dikatakan bagaimana mengatakannya dan kepada siapa mengatakannya. Oleh sebab itu anak-anak harus diajarkan pola-pola tingkah laku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Kebudayaan Nasional sebagai landasan system pendidikan Nasional. Ini berarti pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia. Karena kebudayaan masyarakat Indonesia majemuk maka kebudayaan bangsa Indonesia lebih tepat disebut kebudayaan Nusantara. Puncak-puncak kebudayaan Nusantara itulah yang diterima secara nasional disebut kebudayaan Nasional.

Salah satu upaya penyesuaian pendidikan jalur sekolah dengan keragaman latar belakang sosial budaya di Indonesia adalah dengan memerlakukan muatan lokal di dalam kurikulum sekolah. Pelestarian dan pengembangan kekayaan yang unik dari setiap daerah itu melalui upaya pendidikan sebagai wujud dari kebhinekaan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Beberapa tahun terakhir, makin kuat pendapat bahwa pendidikan seharusnya diupayakan agar lebih menjamin adanya keterikatan antara peserta didik dengan lingkungannya. Sebagai contoh, muatan lokal dalam kurikulum tidak hanya sekedar meneruskan minat dan kemahiran yang ada di daerah tertentu tapi juga serentak memperbaiki/ meningkatkan sesuai dengan perkembangan iptek dan kebutuhan masyarakat.

7. Landasan Sosiologis

Kegiatan pendidikan merupakan suatu proses interaksi antara dua individu atau bahkan dua generasi, yang memungkinkan generasi muda memperkembangkan diri. Dengan meningkatkan sosiologi pada kegiatan pendidikan tersebut, maka lahirlah cabang pendidikan sosiologi.

Menurut Pidarta, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok dan struktur sosialnya.⁷⁴ Maksudnya hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dalam kelompok. Sosiologi pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial pendidikan yang meliputi 4 bidang: 1) Hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat; 2) Hubungan kemanusiaan disekolah; 3) Pengaruh sekolah pada prilaku anggotanya; 4) Sekolah dalam komunitas, mempelajari interaksi sekolah dengan kelompok sosial lain dalam satu komunitas.

⁷⁴ Pidarta, Made, *Landasan Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007)

Masyarakat mencakup sekelompok orang yang berinteraksi antar sesamanya, saling tergantung dan terikat oleh nilai dan norma yang dipatuhi bersama, serta pada umumnya bertempat tinggal disuatu wilayah tertentu dan adakalanya mereka memiliki hubungan darah atau memiliki kepentingan bersama. Masyarakat sebagai kesatuan hidup memiliki ciri utama antara lain: 1) Adanya interaksi antar warga-warganya; 2) Pola tingkah laku warganya diatur oleh adat istiadat, norma-norma, hukum, dan aturan-aturan yang khas; 3) Ada rasa identitas kuat yang mengikat pada warganya.

8. Landasan Ekonomi

Pada zaman pasca modern atau globalisasi sekarang ini, yang sebagian besar manusianya cenderung mengutamakan kesejahteraan materi dibanding kesejahteraan rohani, membuat ekonomi mendapat perhatian yang sangat besar. Oleh sebab itu ada kewajiban suatu lembaga pendidikan untuk memperbanyak sumber dana yang mungkin bisa digali adalah sebagai berikut: 1) Dari pemerintah dalam bentuk proyek pembangunan, penelitian bersaing, pertandingan karya ilmiah anak-anak, dan perlombaan-perlombaan lainnya; 2) Dari kerjasama dengan instansi lain, baik pemerintah, swasta, maupun dunia usaha. Kerjasama ini bisa dalam bentuk proyek penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan proyek pengembangan bersama; 3) Membentuk pajak pendidikan, dapat dimulai dari satu desa yang sudah mapan, satu daerah kecil, dan sebagainya; 4) Usaha lainnya seperti dana rutin, dana pembangunan dan dana bantuan masyarakat.

9. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pengetahuan (*knowledge*) adalah segala sesuatu yang diperoleh melalui berbagai cara pengindraan terhadap fakta, penalaran (rasio), intuisi dan wahyu. Dengan demikian, pengetahuan meliputi berbagai cabang ilmu (ilmu-ilmu sosial atau *social sciences*, dan ilmu-ilmu alam atau *natural sciences*), humaniora (seni, filsafat, bahasa, dan sebagainya) serta wahyu keagamaan atau yang sejenisnya. Dilihat dari segi tujuan pokoknya, sering pula dibedakan ilmu dasar (*basic science*) dan ilmu terapan (*applied science*). Hasil dari ilmu terapan itu harus dialih ragaman (ditransformasikan) menjadi bahan, alat, atau prosedur kerja kegiatan ini biasa disebut pengembangan (*development*). Tingkat lanjut dan hasil kegiatan pengembangan itulah yang disebut teknologi.

Landasan antologis dari ilmu berkaitan dengan objek yang ditelaah oleh ilmu adalah: yang ingin diketahui oleh ilmu, hubungannya dengan daya tangkap manusia. Objek ilmu itu selalu berkaitan dengan pengalaman manusia yang dapat dikomunikasikan kepada orang lain.

Landasan epistemologi dari ilmu berkaitan dengan segenap proses untuk memperoleh pengetahuan ilmiah, yakni Prosedurnya, usaha yang harus diperhatikan agar memperoleh kebenaran, Cara/teknik/sarana yang dapat membantu mendapatkannya. Seperti iptek itu sendiri, metode keilmuan juga mengalami perkembangan sebagai akumulasi pendapat manusia yang kini dikenal sebagai Model Induktif-Hipotetiko-Deduktif.

Landasan aksiologis dari ilmu berkaitan dengan manfaat atau kegunaan pengetahuan ilmiah yaitu: untuk apa pengetahuan ilmiah itu dipergunakan? Bagaimana kaitannya dengan nilai-nilai moral? Ilmu telah berjasa mengubah wajah dunia dalam berbagai bidang serta memajukan kesejahteraan manusia.

Perkembangan Iptek sebagai landasan ilmiah menurut Titaraharja, menyatakan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki kaitan yang sangat erat. Iptek menjadi bagian utama dalam isi pembelajaran, dengan kata lain bahwa pendidikan berperan sangat penting dalam pewarisan dan pengembangan Iptek.⁷⁵ Iptek merupakan salah satu hasil dari usaha manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, yang telah dimulai pada permulaan kehidupan manusia. Masa lampau, manusia purba senantiasa menghadapi kekuasaan alam yang mendominasi kehidupan. Berkat perkembangan iptek, hubungan kekuasaan antara manusia dan alam itu dapat dikatakan terbalik. Alam kini di bawah kekuasaan manusia.

Pada setiap perkembangan Iptek hendaknya harus diakomodasi oleh pendidikan dengan segera memasukkan hasil pengembangan Iptek ke dalam bahan ajar. Dengan perkembangan Iptek dan kebutuhan masyarakat yang makin kompleks, maka pendidikan dengan segala aspeknya mau tidak mau mangakomodasi perkembangan itu, baik perkembangan Iptek maupun perkembangan masyarakat. Konsekuensi

⁷⁵ Tirtarahardja, Umar dan S.L. La Sulo, *Pengantar Pendidikan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).

perkembangan pendidikan menyebabkan penataan kelembagaan, pemantapan struktur organisasi dan mekanisme kerja serta pemantapan pengelolaan haruslah dilakukan dengan memanfaatkan Iptek, karena kebutuhan pendidikan yang sangat mendesak, maka banyak teknologi dari berbagai bidang ilmu segera diadopsi ke dalam penyelenggaraan pendidikan, atau kemajuan segera dimanfaatkan oleh penyelenggara pendidikan.

I. Azas Pendidikan

Asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Khusus di Indonesia, terdapat sejumlah asas yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan itu. Asas-asas tersebut antara lain;

1. Asas Tut wuri Handayani

Asas tut wuri handayani merupakan inti dari asas yang menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak mengatur dirinya sendiri (*zelf-veschikkingsrecht*) dengan mengingat tertibnya persatuan dalam peri kehidupan umum. Asas Tut Wuri Handayani merupakan gagasan yang mula-mula dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Tut Wuri Handayani mengandung arti pendidik dengan kewibawaan yang dimiliki mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, tidak menarik-narik dari depan, membiarkan anak mencari jalan sendiri dan jika anak

melakukan kesalahan baru pendidik membantunya.⁷⁶

Sebagai asas pertama, Tut Wuri Handayani merupakan inti dari sistem among perguruan, di mana guru memperoleh sebutan pamong yang berdiri di belakang dengan semboyan tut wuri handayani. Asas yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara ini kemudian dikembangkan oleh Drs. R.M.P. Sostrokartono (fisuf dan ahli bahasa) dengan menambahkan dua semboyan lagi, yaitu Ing Ngarso Sung Sung Tulodo dan Ing Madyo Mangun Karso (Raka Joni, et. Al., 1985:38; Wawasan kependidikan Guru, 1982: 93). Kini ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan asas yaitu: Ing Ngarso Sung Tulodo (jika di depan memberi contoh), Ing Madyo Mangun Karso (jika ditengah-tengah memberi dukungan dan semangat), dan Tut Wuri Handayani (jika di belakang memberi dorongan). Semboyan lainnya, sebagai bagian tak terpisahkan dari tut wuri handayani, pada hakikatnya bertolak dari wawasan tentang anak yang sama, yakni tidak ada unsur perintah, paksaan atau hukuman, tidak ada campur tangan yang dapat mengurangi kebebasan anak untuk berjalan sendiri dengan kekuatan sendiri. Kini ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan asas, yakni: a. Ing ngarsa sung tulada (jika di depan, menjadi contoh), b. Ing madya mangun karsa (jika di tengah-tengah, membangkitkan kehendak, hasrat atau motivasi), dan c. Tut wuri handayani (jika di belakang, mengikuti dengan awas).⁷⁷

⁷⁶ Hamzah, Andi, *Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1991), h. 90

⁷⁷ Raka Joni, T., *Strategi Belajar-Mengajar, Suatu Tujuan Pengantar*.

2. Asas Belajar sepanjang hayat

Asas belajar sepanjang hayat (*life long learning*) merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup (*life long education*). Dikenal dengan belajar sepanjang hayat. Kedua istilah ini memang tidak dapat dipisahkan, tetapi dapat dibedakan. Penekanan istilah belajar adalah perubahan perilaku (kognitif/afektif/psikomotor) yang relatif tetap karena pengaruh pengalaman, sedang istilah pendidikan menekankan pada usaha sadar dan sistematis untuk penciptaan suatu lingkungan yang memungkinkan pengaruh pengalaman tersebut lebih efisien efektif, sebagai lingkungan yang membelajarkan subjek didik.

Selanjutnya pendidikan sepanjang hayat didefinisikan sebagai tujuan atau ide formal untuk pengorganisasian dan perstrukturian pengalaman pendidikan. Pengorganisasian dan perstrukturian ini diperluas mengikuti seluruh rentangan usia, dari usia yang paling muda sampai yang paling tua. Pendidikan sepanjang hayat bukan merupakan pendidikan yang berstruktur namun suatu prinsip yang menjadi dasar dalam menjiwai seluruh organisasi system pendidikan yang ada. Dengan kata lain pendidikan sepanjang hayat menembus batas-batas kelembagaan, pengelolaan dan program yang telah berabad-abad mendesakkan diri pada system pendidikan.

Ditinjau dari pendidikan sekolah, rancangan dan implementasi program belajar mengajar untuk mendorong belajar sepanjang hayat, dengan terbentuknya

(Jakarta : P2LPTK Depdikbud, 1985), h. 38

manusia dan masyarakat yang mau dan mampu terus menerus belajar. Kurikulum yang dapat mendukung terwujudnya belajar sepanjang hayat harus dirancang diimplementasikan dengan memperhatikan dua dimensi;

Pertama, Dimensi vertikal dari kurikulum sekolah meliputi keterkaitan dan kesinambungan antar tingkatan persekolahan dan keterkaitan dengan kehidupan peserta didik di masa depan.

Kedua, Dimensi horisontal dari kurikulum sekolah yaitu keterkaitan antara pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman di luar sekolah. Untuk mencapai integritas pribadi yang utuh sebagaimana gambaran manusia Indonesia seutuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Indonesia menganut asas pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat memungkinkan tiap warga negara Indonesia;

- a) Mendapat kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri dan kemandirian sepanjang hidupnya,
- b) Mendapat kesempatan untuk memanfaatkan layanan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di masyarakat. Lembaga pendidikan yang ditawarkan dapat bersifat formal, informal dan non formal,
- c) Mendapat kesempatan mengikuti program-program pendidikan sesuai bakat, minat, dan kemampuan dalam rangka pengembangan pribadi secara utuh menuju profil Manusia Indonesia Seutuhnya (MIS) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan
- d) Mendapat kesempatan mengembangkan diri melalui proses pendidikan jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu sebagaimana

tersurat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989.

Pendidikan seumur hidup. UNESCO *Institute for Education* menetapkan suatu definisi kerja yakni pendidikan seumur hidup adalah pendidikan yang harus; a) Meliputi seluruh hidup setiap individu, b) Mengarah kepada pembentukan, pembaharuan, peningkatan dan penyempurnaan secara sistematis pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat meningkatkan kondisi hidupnya, c) Tujuan akhirnya adalah mengembangkan kesadaran diri (*self fulfilment*) setiap individu, d) Meningkatkan kemampuan dan motivasi untuk belajar mandiri, e) Mengakui kontribusi dari semua pengaruh pendidikan yang mungkin terjadi, termasuk yang formal, non formal dan informal.

Terkait dengan pendidikan, maka kurikulum yang dapat mendukung terwujudnya belajar sepanjang hayat harus dirancang dan diimplementasi dengan memperhatikan dua dimensi berikut; *Pertama*, Dimensi vertikal dari kurikulum sekolah yang meliputi: Disamping keterkaitan dan kesinambungan antartingkatan persekolahan, harus pula terkait dengan kehidupan peserta didik di masa depan. Termasuk dalam dimensi vertikal itu antara lain pengkajian tentang; 1) Keterkaitan antara kurikulum dengan masa depan peserta didik, termasuk relevansi bahan ajaran dengan masa depan dan pengintegrasian masalah kehidupan nyata ke dalam kurikulum, 2) Kurikulum dan perubahan sosial-kebudayaan; Kurikulum seyogianya memungkinkan antisipasi terhadap perubahan sosial-

kebudayaan itu karena peserta didik justru akan hidup dalam sosial-kebudayaan yang telah berubah setelah menamatkan sekolahnya, 3) *The forecasting curriculum* yakni perancangan kurikulum berdasarkan suatu prognosis, baik tentang perilaku peserta didik pada saat menamatkan sekolahnya, pada saat hidup ia dalam sistem yang sedang berlaku, maupun pada saat ia hidup dalam sistem yang telah berubah di masa depan, 4) Keterpaduan bahan ajaran dan pengorganisasian pengetahuan, terutama dalam kaitannya dengan struktur pengetahuan yang sedang dipelajari dengan penguasaan kerangka dasar untuk memperoleh keterpaduan ide bidang studi itu, 5) Penyiapan untuk memikul tanggung jawab, baik tentang dirinya sendiri maupun dalam bidang sosial/pekerjaan, agar kelak dapat membangun dirinya sendiri dan bersama-sama membangun masyarakatnya, 6) Pengintegrasian dengan pengalaman yang telah dimiliki peserta didik, yakni pengalaman di keluarga untuk pendidikan dasar, dan demikian seterusnya, 7) Untuk mempertahankan motivasi belajar secara permanen, peserta didik harus dapat melihat kemanfaatan yang akan didapatnya dengan tetap mengikuti pendidikan itu, seperti kesempatan yang terbuka baginya, mobilitas pekerjaan, pengembangan kepribadiannya, dan sebagainya.

Kedua, Dimensi horizontal dari kurikulum sekolah yakni keterkaitan antara pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman di luar sekolah antara lain: 1) Kurikulum sekolah merefleksi kehidupan di luar sekolah; kehidupan di luar sekolah menjadi objek

refleksi teoritis di dalam bahan ajaran di sekolah, sehingga peserta didik lebih memahami persoalan-persoalan pokok yang terdapat di luar sekolah, 2) Memperluas kegiatan belajar ke luar sekolah; kehidupan di luar sekolah dijadikan tempat kajian empiris, sehingga kegiatan belajar-mengajar terjadi di dalam dan di luar sekolah, 3) Melibatkan orang tua dan masyarakat dalam kegiatan belajar-mengajar, baik sebagai narasumber dalam kegiatan belajar di sekolah maupun kegiatan belajar di luar sekolah.

Perancangan dan implementasi kurikulum yang memperhatikan kedua dimensi itu akan mengakrabkan peserta didik dengan berbagai sumber belajar yang ada di sekitarnya. Kemampuan dan kemauan menggunakan sumber-sumber belajar yang tersedia itu akan memberi peluang terwujudnya belajar sepanjang hayat. Dan masyarakat yang mempunyai warga yang belajar sepanjang hayat akan menjadi suatu masyarakat yang gemar belajar (*learning society*). Dengan kata lain, akan terwujudlah gagasan pendidikan seumur hidup seperti yang tercermin di dalam sistem pendidikan nasional Indonesia.

Asas belajar sepanjang hayat (*life long education*), mulai populer pada tahun 1979, yang dikemukakan UNESCO yang terkenal dengan *life long education*. Pendidikan seumur hidup adalah pendidikan yang harus; 1) Seluruh hidup setiap individu; 2) Merupakan pembentukka, pembaharuan, peningkatan, dan penyempurnaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan seseorang; 3) Mengembangkan kesadaran diri; 4)

Meningkatkan kemampuan motivasi untuk belajar mandiri; 4) Asas Kemandirian dalam Belajar (*Self Regulated Learning*) Baik asas tut wuri handayani maupun belajar sepanjang hayat secara langsung erat kaitannya dengan asa kemandirian dalam belajar. Asas tut wuri handayani pada prinsipnya bertolak dari asumsi kemampuan siswa untuk mandiri, termasuk mandiri dalam belajar.

Dalam kegiatan belajar mengajar, sedini mungkin dikembangkan kemandirian dalam belajar itu dengan menghindari campur tangan guru, namun guru selalu siap untuk ulur tangan ketika diperlukan. Selanjutnya asa sepanjang hayat hanya dapat diwujudkan apabila didasarkan pada asumsi bahwa peserta didik mau dan mampu mandiri dalam belajar, karena tidak mungkin seorang belajar sepanjang hayatnya jika selalu tergantung dari bantuan guru atau orang lain.

3. Azas Kemandirian dalam Belajar

Asas ini tidak dapat dipisahkan dari 2 asas tut wuri handayani dan belajar sepanjang hayat. Implikasi dari asas ini adalah pendidik harus menjalankan peran komunikator, fasiltator, organisator, dsb. Pendidik diharapkan dapat menyediakan dan mengatur berbagai sumber belajar sedemikian rupa sehingga memudahkan peserta didik berinteraksi dengan sumber belajar tersebut.

Perwujudan asas kemandirian dalam belajar menempatkan guru dalam peran utama sebagai; 1) Fasilitator, yaitu guru diharapkan menyediakan dan mengatur berbagai sumber belajar sehingga memudahkan

peserta didik berinteraksi dengan sumber-sumber tersebut; 2) Motivator, yaitu guru mengupayakan timbulnya prakarsa sisik untuk memanfaatkan sumber belajar; 3) Organisator, yaitu guru mempunyai suatu tugas untuk mengorganisasikan peserta didiknya guna memudahkan dalam proses belajar yang akan dijalaninya; 4) Informator, yaitu guru sebagai salah satu sumber atau pemberi informasi guna membantu para peserta didiknya dan memudahkan dalam proses belajar.

Asas Kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktifitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran.

Ada beberapa variasi pengertian belajar mandiri yang diutarakan oleh para ahli seperti dipaparkan Abdullah sebagai berikut; a) Belajar Mandiri memandang siswa sebagai para manajer dan pemilik tanggung jawab dari proses pelajaran mereka sendiri, b) Peran kemauan dan motivasi dalam belajar mandiri sangat penting di dalam memulai dan memelihara usaha siswa. Motivasi memandu dalam mengambil keputusan dan kemauan menopang kehendak untuk menyelami suatu tugas sedemikian sehingga tujuan dapat dicapai (Corno; Garrison), c) Di dalam belajar mandiri, kendali secara berangsur-angsur bergeser dari para guru ke siswa. Siswa mempunyai banyak kebebasan untuk memutuskan pelajaran yang hendak dicapai dan bermanfaat baginya (Lyman; Morrow, Sharkey, &

Firestone).⁷⁸

Haris Mujiman, menyebutkan belajar mandiri adalah kegiatan belajar aktif, yang didorong oleh niat atau motif untuk menguasai suatu kompetensi guna mengatasi suatu masalah dan dibangun dengan bekal pengetahuan atau kompetensi yang dimiliki. Penetapan kompetensi sebagai tujuan belajar dan upaya pencapaiannya baik penetapan waktu belajar, tempat belajar, irama belajar, tempo belajar, cara belajar, maupun evaluasi belajar dilakukan oleh siswa sendiri.⁷⁹ Asas belajar sepanjang hayat hanya dapat diwujudkan jika didasarkan pada asumsi bahwa peserta didik mau dan mampu belajar mandiri.

Beberapa jenis kegiatan belajar mandiri sangat bermanfaat dalam mengembangkan kemandirian dalam proses belajar tersebut seperti belajar melalui modul, paket belajar, pengajaran berprogram dan sebagainya. Konsep Belajar Mandiri (*Self-directed Learning*) sebenarnya berakar dari konsep pendidikan orang dewasa. Namun demikian berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli seperti Garrison tahun 1997, Schillereff tahun 2001 dan Scheidet tahun 2003 ternyata belajar mandiri juga cocok untuk semua tingkatan usia. Dengan kata lain, belajar mandiri sesuai untuk semua jenjang sekolah baik untuk sekolah menengah pertama dan menengah atas maupun sekolah dasar dalam rangka meningkatkan prestasi

⁷⁸ Abdullah, Faisal M., *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, (Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, 2001), hal. 1-4

⁷⁹ Mudjiman, Haris, *Belajar Mandiri*. (Surakarta: UNS PRESS, 2007) h. 1

dan kemampuan siswa.

Pada tingkat Perguruan Tinggi, istilah SKS (Sistem Kredit Semester) merupakan pelaksanaan asas kemandirian dalam belajar bagi mahasiswa. Mahasiswa dituntut dapat mengembangkan materi yang telah diajarkan di kampus bersama dosen sehingga pengetahuan dan pemahamannya dapat berkembang dan luas. Jika menemukan hal-hal yang kurang dipahami dalam pembelajaran maka dapat mendiskusikan bersama dengan dosen yang mempunyai keahlian dan kemampuan dalam hal-hal yang kurang dimengerti tersebut. Sehingga asas kemandirian belajar berlaku bagi semua yang dengan usaha dan kemauan sendiri untuk belajar, baik secara formal maupun non formal.

Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator, di samping peran lain seperti Informator dan organisator. Sebagai fasilitator, guru diharapkan menyediakan dan mengatur berbagai sumber belajar sedemikian sehingga memudahkan peserta didik berinteraksi dengan sumber tersebut.

Terdapat berbagai strategi belajar-mengajar dan atau kegiatan belajar-mengajar yang dapat memberi peluang pengembangan kemandirian dalam belajar. Cara belajar siswa aktif (CBSA) merupakan salah satu pendekatan yang memberi peluang itu, karena siswa dituntut mengambil prakarsa dan atau memikul tanggung jawab tertentu dalam belajar-mengajar di sekolah, umpamanya melalui lembaga kerja.

Di samping itu, beberapa jenis kegiatan belajar

mandiri akan sangat bermanfaat dalam mengembangkan kemandirian dalam belajar itu, seperti belajar melalui modul, paket belajar, pengajaran berprogram, dan sebagainya. Keseluruhan upaya itu akan dapat terlaksana dengan semestinya apabila setiap lembaga pendidikan, utamanya sekolah, didukung oleh suatu pusat sumber belajar (PSB) yang memadai. Seperti diketahui, PSB itu memberi peluang tersedianya berbagai jenis sumber belajar, di samping bahan pustaka di perpustakaan, seperti rekaman elektronik, ruang-ruang belajar (tutorial) sebagai mitra kelas. Dengan dukungan PSB itu asas-asas kemandirian dalam belajar akan lebih dimantapkan dan dikembangkan.

4. Azas semesta, menyeluruh dan terpadu

Asas semesta, menyeluruh dan terpadu. Semesta artinya pendidikan itu terbuka untuk seluruh rakyat, menyeluruh artinya mencakup semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Terpadu artinya saling berkaitan antara pendidikan dengan pembangunan nasional. Asas semesta, menyeluruh dan terpadu yang berarti bahwa pendidikan nasional terbuka bagi setiap manusia Indonesia.

5. Azas manfaat adil dan merata

Asas adil dan merata yang berarti bahwa semua kepentingan berbagai pihak harus mendapat perhatian dan perlakuan yang seimbang. Asas manfaat berarti pendidikan harus mengingat kemanfaatannya bagi masa depan peserta didik, bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan beragama. Asas manfaat, adil dan merata

yang meliputi asas nondiskriminatif, yang memandang manusia Indonesia seutuhnya tanpa diskriminasi, baik atas dasar kesukuan, daerah, keturunan, derajat, jenis kelamin dan kekayaan maupun atas dasar agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mahesa Esa.

6. Azas Tanggung jawab bersama

Dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh negara yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, kemudian dalam batang tubuh UUD 1945 salah satu pasal yang juga menyatakan Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Asas tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Asas pendidikan berlangsung dalam lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat.

Terkait pendidikan, maka tidak terlepas dari adanya guru dan siswa, interaksi antara guru dan siswa selalu terjadi dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, guru melaksanakan tugas sesuai hak dan kewajibannya, namun perlu diketahui bahwa tugas guru adalah sangat berat, karena di samping mengajarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, guru juga harus mendidik siswa agar dapat berkembang secara seimbang antara jasmani dan rohani, mendidik siswa berarti pula ikut membantu mendewasakan dan mematangkan jiwa anak, membentuk mental yang baik sehingga anak

tersebut dapat berbudi pekerti yang luhur dan mampu membawa diri dengan baik sampai akhirnya dapat berguna bagi kepentingan bangsa dan negara.

Jika semua elemen masyarakat dapat menghormati dan menghargai profesi guru, orang tua siswa harus menyadari bahwa mendidik anak bukanlah persoalan yang mudah, apalagi di zaman globalisasi seperti sekarang ini, maka sepantasnyalah pendidikan ini menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintah, sehingga orang tua tidak bisa melempar kesalahan begitu saja kepada sekolah atau guru jika terjadi sesuatu pada anaknya, selama semua masih dalam kerangka pendidikan dan tidak melanggar aturan yang berlaku.

Adapun azas-azas pelaksanaan pendidikan nasional yang lain yaitu; 1) Asas semesta, menyeluruh dan terpadu, yang berarti bahwa pendidikan nasional terbuka bagi setiap manusia Indonesia, mencakup semua jenis dan jenjang pendidikan dan merupakan satu kesatuan usaha sadar yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan usaha pembangunan bangsa. 2) Asas pendidikan seumur hidup. 3) Asas tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. 4) Asas pendidikan berlangsung dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. 5) Asas keselarasan dan keterpaduan dengan ketahanan nasional dan wawasan nusantara. 6) Asas Bhineka Tunggal Ika. 7) Asas keselarasan, keseimbangan dan keserasian. 8) Asas *ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani*, yang berarti bahwa

seorang pendidik harus memberi teladan di depan, memberi motivasi di tengah, dan mengawasi dari belakang. 9) Asas mobilitas, efisiensi, dan efektivitas, yang memungkinkan pengadaan kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap manusia Inndonesia. 10) Asas kepastian hukum, yang berarti bahwa sistem pendidikan nasional dilaksanakan atas dasar peraturan perundang-undangan.

J. Aliran Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek strtegis dan sangat penting dalam membangun karakter manusia. Pendidikan merupakan aspek luar yang membangun keterampilan dan kemampuan manusia lain. Fase-fase tersebut dapat terlihat dari aliran pendidikan yang muncul, mulai dari aliran empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi. Masing-masing aliran menyampaikan kelebihan dan kekurangan serta peran masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai berikut;

Pertama, Nativisme. Aliran nativisme berasal dari kata *natus* (lahir); *nativis* (pembawaan) yang ajarannya memandang manusia (anak manusia) sejak lahir telah membawa sesuatu kekuatan yang disebut potensi (dasar). Kata nativisme berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti terlahir.⁸⁰ Dalam wikipedia bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa nativisme adalah aliran pendidikan yang berpandangan bahwa keterampilan atau kemampuan tertentu bersifat alamiah atau sudah

⁸⁰ Zahara Idris, *Dasar-dasar Kependidikan*, (Padang: Angkasa Raya, 1987), h. 31

tertanam dalam otak sejak lahir.

Dalam ilmu kebahasaan aliran nativis, Douglas Brow mengungkapkan bahwa istilah nativis diambil dari pernyataan dasar bahwa pemerolehan bahasa sudah ditentukan dari sananya, bahwa kita lahir dengan kapasitas genetik yang mempengaruhi kemampuan kita memahami bahasa di sekitar kita, yang hasilnya adalah sebuah konstruksi sistem bahasa yang tertanam dalam diri manusia.⁸¹ Teori nativis dalam penerimaan bahasa pertama yang diungkapkan oleh Douglas Brow ini nampaknya tidak jauh berbeda dengan teori nativisme dalam pendidikan yang dipelopori oleh filosof Jerman Arthur Schopenhauer (1788-1860). Arthur Schopenhauer (Blog Swandika 2011) beranggapan bahwa faktor pembawaan yang bersifat kodrati tidak dapat diubah oleh alam sekitar ataupun pendidikan.⁸²

Arthur Schopenhauer (Blog Swandika 2011) menyatakan yang jahat menjadi jahat dan yang baik menjadi baik.⁸³ Pandangan ini sebagai lawan dari aliran empirisme atau optimisme yaitu pendidikan pesimisme memberikan dasar bahwa suatu keberhasilan ditentukan oleh faktor pendidikan, ditentukan oleh anak itu sendiri. Lingkungan sekitar tidak ada, artinya sebab lingkungan itu tidak berdaya dalam mempengaruhi perkembangan anak.

⁸¹ Brow, H. Douglas, *Prinsip Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa*. (Jakarta: Kedutaan Besar Amerika Serikat. 2008), h. 30

⁸² Swandika, Agung. 2011. *Aliran Nativisme*. Diunduh pada 17 Oktober 2015 pukul 11:15. Didapatkan dari <http://agungswandika.blogspot.com/2011/aliran-nativisme.html>.

⁸³ Swandika, Agung. 2011. *Aliran Nativisme*. Diunduh pada 17 Oktober 2015 pukul 11:15. Didapatkan dari <http://agungswandika.blogspot.com/2011/aliran-nativisme.html>.

Schaupenhaur (Idris, 1987) juga berpendapat bahwa mendidik ialah membiarkan seseorang bertumbuh berdasarkan pembawaannya.⁸⁴ Jadi, menurut aliran ini, pengetahuan seseorang sepenuhnya dipengaruhi oleh pembawaan lahir dan gen yang diturunkan oleh kedua orang tua. Pendidikan yang diberikan haruslah disesuaikan dengan bakat dan pembawaan anak didik itu sendiri. Teori ini percaya bahwa lingkungan pendidikan maupun lingkungan sekitar yang telah direkayasa oleh orang dewasa tidak berpengaruh terhadap tumbuh kembang pengetahuan manusia. Dengan kata lain aliran ini menekankan bahwa pemerolehan pengetahuan manusia hanya berasal dari dalam (internal). Pembawaan lahir itu ada yang baik ada pula yang buruk. Manusia tumbuh dan berkembang membawa segala hal sejak lahir. Dan mereka berkembang sesuai arahnya masing-masing. Sedangkan pendidikan tidak mempengaruhi apa-apa.

Aliran nativisme ini, bertolak dari *leibnitzian tradition* yang menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan, termasuk faktor pendidikan, kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak dalam proses pembelajaran. Berarti aliran nativisme berpandangan segala sesuatunya ditentukan oleh faktor bawaan sejak lahir, jadi perkembangan individu semata-mata ditentukan oleh keturunan. Tokoh utama (pelopor) aliran nativisme adalah Arthur Schopenhaur (Jerman 1788-1860). Tokoh lain seperti J.J. Rousseau

⁸⁴ Zahara Idris, *Dasar-dasar Kependidikan*, (Padang: Angkasa Raya, 1987), h. 31

seorang ahli filsafat dan pendidikan dari Perancis. Kedua tokoh ini berpendapat betapa pentingnya inti privasi atau jati diri manusia. Meskipun dalam keadaan sehari-hari, sering ditemukan anak mirip orang tuanya (secara fisik) dan anak juga mewarisi bakat-bakat yang ada pada orang tuanya. Tetapi pembawaan itu bukanlah merupakan satu-satunya faktor yang menentukan perkembangan. Masih banyak faktor yang dapat memengaruhi pembentukan dan perkembangan anak dalam menuju kedewasaan.

Kedua, Empirisme. Aliran empirisme, bertentangan dengan paham aliran nativisme. Empirisme (*empiri* = pengalaman), tidak mengakui adanya pembawaan atau potensi yang dibawa lahir manusia. Menurut Zahra dan Idris empirisme berasal dari Bahasa latin *empericus* artinya pengalaman.⁸⁵ John Lock seorang filsuf dari Inggris (Purwanto, 2000) berpandangan bahwa *empirisme*, adalah aliran atau paham yang berpendapat bahwa segala kecakapan dan pengetahuan manusia itu timbul dari pengalaman (empiri) yang masuk melalui indra.⁸⁶ Selanjutnya, dalam bukunya yang berjudul *Essay Concerning Human Understanding*, mengatakan bahwa tak ada sesuatu dalam jiwa, yang sebelumnya tak ada dalam indera. Dengan kata lain: Tak ada sesuatu dalam jiwa, tanpa melalui indra.⁸⁷ Pendapat ini sebetulnya telah jauh dikemukakan oleh

⁸⁵ Zahara Idris, *Dasar-dasar Kependidikan*, (Padang: Angkasa Raya, 1987), h. 30

⁸⁶ Ngalim, Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1992), h. 16

⁸⁷ Soejono, Ag. 1987. *Aliran Baru dalam Pendidikan Bagian ke-1*. Bandung: C.V. Ilmu. 1987.), h.19

Plato (Husaini *et. al.*, 2013) yang menyatakan bahwa ada dua cara untuk mengajarkan atau mengenalkan pengetahuan. *Pertama* adalah pengenalan indrawi (empiris), dan *kedua* adalah pengenalan melalui akal (rasional).⁸⁸ John Lock (Purwanto, 2000) sebagai tokoh utama dari aliran ini, mengatakan bahwa anak yang lahir ke dunia dapat diumpamakan seperti kertas putih yang kosong dan yang belum ditulisi, atau lebih dikenal dengan istilah teori tabulara (*a sheet of white paper avoid of all characters*).⁸⁹ Menurut aliran ini anak-anak yang lahir ke dunia tidak mempunyai bakat dan pembawaan apa-apa seperti kertas putih yang polos. Oleh karena itu anak-anak dapat dibentuk sesuai dengan keinginan orang dewasa yang memberikan warna pendidikannya. Sesuai Idris Aliran empirisme merupakan aliran yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia. Aliran ini mengatakan bahwa perkembangan anak tergantung pada lingkungan, sedangkan pembawaan anak yang dibawa semenjak lahir tidak dianggap penting. Selain itu, Aliran ini juga berpandangan bahwa perkembangan seseorang tergantung seratus persen kepada pengaruh lingkungan atau kepada pengalaman-pengalaman yang diperoleh dalam kehidupannya.⁹⁰

Dengan demikian dapat dipahami bahwa keberhasilan belajar peserta didik menurut aliran empirisme

⁸⁸ Husaini, Adian at. al., *Filsafat Ilmu Perspektif Barat dan Islam*. (Depok: Gema Insani, 2013). h. 4

⁸⁹ Ngalm, Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1992), h. 16

⁹⁰ Zahara Idris, *Dasar-dasar Kependidikan*, (Padang: Angkasa Raya, 1987), h. 30

adalah lingkungan sekitarnya. Keberhasilan ini disebabkan oleh adanya kemampuan dari pihak pendidik dalam mengajar mereka. Ketika aliran-aliran pendidikan, yakni nativisme, dan empirisme dan dikaitkan dengan teori belajar mengajar kelihatan bahwa kedua aliran yang telah disebutkan (nativisme-empirisme) mempunyai kelemahan. Adapun kelemahan yang dimaksudkan adalah sifatnya yang eksklusif dengan cirinya ekstrim berat sebelah. Keberhasilan teori belajar mengajar jika dikaitkan dengan aliran-aliran dalam pendidikan, diketahui beberapa rumusan yang berbeda antara aliran yang satu dengan aliran lainnya. Menurut aliran nativisme bahwa seorang peserta tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan, sedangkan menurut aliran empirisme bahwa justru lingkungan yang mempengaruhi peserta didik tersebut.

Ketiga, Naturalisme. Aliran Naturalisme merupakan aliran yang menyakini adanya pembawaan dan juga *milieu* (lingkungan). Namun demikian, ada dua pandangan besar mengenai hal ini. *Pertama*, disampaikan oleh Rousseau yang berpendapat bahwa pada dasarnya manusia baik, namun jika ada yang jahat, itu karena terpengaruh oleh lingkungannya. *Kedua*, Mensius berpendapat bahwa pada dasarnya manusia itu jahat. Jika menjadi manusia yang baik karena bergaul dengan lingkungannya.⁹¹

Dua pendapat ini jelas memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Satu sisi memandang sisi jahat

⁹¹ Ahmadi, Abu dan Nur Uhbiyati. *Ilmu Pendidikan*. (Jakarta: Rineka Cipta Saphuha, 1991), h. 296

manusia bersumber dari lingkungan, sementara pendapat lain menyatakan bahwa sisi jahat itu sendiri yang justru berada pada diri manusia. Namun, jika memperhatikan dua pendapat ini memiliki sisi kebenaran yang sama jika ditilik dari sudut genetis. Memang, jika melihat faktor ini. Manusia yang secara genetis tidak baik, maka menjadi manusia yang tidak baik, begitupun sebaliknya.

Kata naturalisme berasal dari bahasa Latin yaitu *nature* artinya alam, tabiat dan pembawaan. Zahara, mengatakan Aliran ini dinamakan juga negativisme ialah aliran yang meragukan pendidikan untuk perkembangan seseorang karena dia dilahirkan dengan pembawaan yang baik. Ciri utama aliran ini ialah dalam mendidik seseorang kembalilah kepada alam agar pembawaan seseorang yang baik itu tidak di rusak oleh pendidik.⁹² Dengan kata lain pembawaan yang baik itu supaya berkembang secara spontan. Hampir senada dengan aliran Nativisme.

Menurut Ngalim Purwanto, menyebutkan pada hakikatnya semua anak (manusia) itu dilahirkan adalah baik.⁹³ Sependapat dengan Undang Ahmad, menjelaskan bahwa sebagai makhluk spiritual yang sifat aslinya adalah berpembawaan baik. Hasil perkembangannya yang kemudian sangat ditentukan oleh pendidikan yang diterimanya atau yang memengaruhinya. Jika pengaruh itu baik, maka jadilah baik, tetapi jika pengaruh itu jelek,

⁹² Zahara Idris, *Dasar-dasar Kependidikan*, (Padang: Angkasa Raya, 1987), h. 31

⁹³ Ngalim, Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1992), h. 59

maka jelek pula hasilnya.⁹⁴ Jadi Aliran ini berpendapat bahwa pendidik wajib membiarkan pertumbuhan anak pada alam (manusia dan lingkungan). Sehingga kebaikan anak-anak yang diperoleh secara alamiah sejak saat kelahirannya itu dapat tampak secara spontan dan bebas.

Aliran ini mengusulkan perlunya permainan bebas kepada anak didik untuk mengembangkan pembawaan, kemampuan-kemampuannya, dan kecenderungan-kecenderungannya. Tetapi seperti telah diketahui, bahwa gagasan naturalisme yang menolak campur tangan pendidikan, sampai saat ini ternyata tidak terbukti, sebaliknya pendidikan makin lama makin diperlukan.

Menurut paham naturalisme paling tidak ada lima tujuan pendidikan, kelima pendapat itu disampaikan oleh Spencer (Sudrajat,2013); 1) Pemeliharaan diri; 2) Mengamankan kebutuhan hidup; 3) Meningkatkan anak didik; 4) Memelihara hubungan sosial dan politik; 5) Menikmati waktu luang.⁹⁵ Berarti aliran naturalisme ini mementingkan manfaat pendidikan dengan menjadikan pemeliharaan diri menjadi faktor utama yang kemudian disusul dengan kebutuhan hidup. Kedua faktor tersebut tercapai jika faktor ketiga secara maksimal dilaksanakan. Agar maksimal maka faktor keempat dan kelima yang kemudian menjadi perhatian dalam melakukan pendidikan.

⁹⁴ Undang Ahmad, *Filsafat Manusia Sebuah Perbandingan Antara Islam dan Barat*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2013), h. 147

⁹⁵ Sudrajat,Ahmad.2013. www.wordpress.com/pendekatan_saintipik/ilmiah_dalam_proses_pembelajaran. [Online]. Diakses tanggal 09 Januari 2014 Pukul 19.21

Selanjutnya Spencer (Sudrajat, 2013), ada enam prinsip dalam proses pendidikan beraliran naturalisme. Delapan prinsip tersebut adalah: 1) Pendidikan harus menyesuaikan diri dengan alam; 2) Proses pendidikan harus menyenangkan bagi anak didik; 3) Pendidikan harus berdasarkan spontanitas dari aktivitas anak; 4) Memperbanyak ilmu pengetahuan merupakan bagian penting dalam pendidikan; 5) Pendidikan dimaksudkan untuk membantu perkembangan fisik, sekaligus otak; 6) Praktik mengajar adalah seni menunda; 7) Metode instruksi dalam mendidik menggunakan cara induktif; dan 8) Hukuman dijatuhkan sebagai konsekuensi alam akibat melakukan kesalahan. Walaupun dilakukan hukuman, hal itu harus dilakukan secara simpatik.⁹⁶ Dengan demikian hal ini dilakukan atas dasar, bahwa anak memiliki potensi insaniyah yang memungkinkan untuk dapat berkembang secara alamiah. Adapun tokoh naturalisme ini adalah J.J. Rousseau (1712-1778) dan Schopenhauer (1788-1860 M). Kedua tokoh ini, merupakan tokoh yang sering dikutip pendapatnya berkaitan dengan naturalisme.

Keempat, Konvergensi. Aliran konvergensi dipelopori oleh William Stern. Gagasan ini didasari pada dua teori sebelumnya, yakni; nativisme dan empirisme. Maksudnya bahwa konvergensi merupakan gabungan antara kedua teori tersebut. Hal ini dapat ditilik dalam teori konvergensi yang menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia itu bergantung pada faktor

⁹⁶ Sudrajat, Ahmad. 2013. www.wordpress.com/pendekatan_saintipik/ilmiah_dalam_proses_pembelajaran. [Online]. Diakses tanggal 09 Januari 2014 Pukul 19.21

bakat/ pembawaan dan faktor lingkungan, pengalaman/ pendidikan.⁹⁷ Jika diidentifikasi teori tersebut, maka jelas bahwa unsur nativisme dan empirisme membangun kedua teori itu. Hal itu tercermin pada, faktor bakat merupakan gagasan teori nativisme sedangkan faktor lingkungan merupakan gagasan empirisme.

Menurut Zahara, konvergensi berasal dari bahasa Inggris dari kata *convergenry*, artinya pertemuan pada satu titik. Aliran ini mempertemukan atau mengawinkan dua aliran yang berlawanan di atas antara nativisme dan empirisme. Perkembangan seseorang tergantung kepada pembawaan dan lingkungannya.⁹⁸ Dengan kata lain pembawaan dan lingkungan mempengaruhi perkembangan seseorang. Pembawaan seseorang baru berkembang karena pengaruh lingkungan. Hendaknya pendidik dapat menciptakan lingkungan yang tepat dan cukup kaya atau beraneka ragam, agar pembawaan dapat berkembang semaksimal mungkin.

William Stern (Purwanto, 2000) ahli ilmu jiwa sekaligus pelopor aliran konvergensi berbangsa Jerman ini mengatakan bahwa pembawaan dan lingkungan kedua-duanya menentukan perkembangan manusia.⁹⁹ Selanjutnya Ngalim Purwanto mengatakan tentang pendapat W.Stern aliran ini terdapat dua aliran, yaitu aliran yang dalam hukum konvergensi ini lebih menekankan kepada pengaruh pembawaan daripada

⁹⁷ Ahmadi, Abu dan Nur Uhbiyati. *Ilmu Pendidikan*. (Jakarta: Rineka Cipta Saphuha, 1991), h. 294

⁹⁸ Zahara Idris, *Dasar-dasar Kependidikan*, (Padang: Angkasa Raya, 1987), h. 33

⁹⁹ Ngalim, Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1992), h. 60

pengaruh lingkungan dan di pihak lain mereka yang lebih menekankan pengaruh lingkungan atau pendidikan, sehingga belum tepat kiranya hal itu diperuntukkan bagi perkembangan manusia.¹⁰⁰ Selanjutnya Ngalim Purwanto memberikan saran kepada pendidik dalam mencari jalan untuk mengetahui pembawaan seseorang dan kemudian mengusahakan lingkungan atau pendidikan yang baik dan sesuai. Perkembangan manusia bukan hasil belaka dari pembawaan dan lingkungannya melainkan manusia harus dikembangkan dan memperkembangkannya.¹⁰¹ Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peran yang sangat penting. Bakat yang dibawa pada waktu anak tersebut dilahirkan tidak mungkin berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang baik sesuai dengan perkembangan bakat anak itu. Sebaliknya, lingkungan yang baik tidak menghasilkan perkembangan anak yang optimal kalau memang pada diri anak itu tidak terdapat bakat yang diperlukan untuk dikembangkannya.

Ada tiga teori konvergensi yang terkenal yang disampaikan oleh Stern, yakni; 1) Pendidikan mungkin dilaksanakan; 2) Pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan lingkungan kepada anak didik untuk mengembangkan potensi yang baik dan mencegah berkembangnya potensi yang kurang baik; 3) Yang membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan

¹⁰⁰ Ngalim, Purwanto, *Ibid.*, h. 60

¹⁰¹ Ngalim, Purwanto, *Ibid.*, h. 61

dan lingkungan. Pandangan konvergensi ini tentu saja memberi arah yang jelas mengenai pentingnya pendidikan.¹⁰² Dengan demikian, Bahwa, pendidikan harus selalu dilakukan agar potensi anak dapat ditingkatkan. Sehingga bakat yang ada semakin terasa, sementara kompetensi lainpun ikut diasah.

K. Teori dan Pilar Pendidikan

Teori pendidikan merupakan landasan dalam pengembangan praktik-praktik pendidikan, misalnya pengembangan kurikulum, proses belajar-mengajar dan manajemen sekolah. Kurikulum dan pembelajaran memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan teori pendidikan. Suatu kurikulum dan rencana pembelajaran disusun dengan mengacu pada teori pendidikan. Ada 4 (empat) teori pendidikan, yaitu; (1) pendidikan klasik, (2) pendidikan personal, (3) teknologi pendidikan dan (4) pendidikan interaksional.

1. Teori Pendidikan Klasik (*Classical Education*).

Teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik, seperti perenialisme, essensialisme, dan eksistensialisme, yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan ini lebih menekankan peranan isi pendidikan dari pada proses. Isi pendidikan atau materi diambil dari khazanah ilmu pengetahuan yang ditemukan dan dikembangkan para

¹⁰² Sudrajat, Ahmad. 2013. www.wordpress.com/pendekatan_saintipik/ilmiah_dalam_proses_pembelajaran. [Online]. Diakses tanggal 09 Januari 2014 Pukul 19.21

ahli tempo dulu yang telah disusun secara logis dan sistematis. Dalam prakteknya, pendidik mempunyai peranan besar dan lebih dominan, sedangkan peserta didik memiliki peran yang pasif, sebagai penerima informasi dan tugas-tugas dari pendidik.

Pendidikan klasik menjadi sumber bagi pengembangan model kurikulum subjek akademis, yaitu suatu kurikulum yang bertujuan memberikan pengetahuan yang solid serta melatih peserta didik menggunakan ide-ide dan proses “penelitian”, melalui metode ekspositori dan inkuiri.

2. Teori Pendidikan Personal (*Personalized Education*)

Teori pendidikan ini bertolak dari asumsi bahwa sejak dilahirkan anak telah memiliki potensi-potensi tertentu. Pendidikan harus dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik dengan bertolak dari kebutuhan dan minat peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik menjadi pelaku utama pendidikan, sedangkan pendidik hanya menempati posisi kedua, yang lebih berperan sebagai pembimbing, pendorong, fasilitator dan pelayan peserta didik.

Teori ini memiliki dua aliran yaitu pendidikan progresif dan pendidikan romantik. Pendidikan progresif dengan tokoh pendahulunya Francis Parker dan John Dewey memandang bahwa peserta didik merupakan satu kesatuan yang utuh. Materi pengajaran berasal dari pengalaman peserta didik sendiri yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Ia merefleksi terhadap masalah-masalah yang muncul dalam kehidupannya. Berkat refleksinya itu, ia dapat

memahami dan menggunakannya bagi kehidupan. Pendidik lebih merupakan ahli dalam metodologi dan membantu perkembangan peserta didik sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya masing-masing. Pendidikan romantik berpangkal dari pemikiran-pemikiran J.J. Rouseau tentang tabula rasa, yang memandang setiap individu dalam keadaan fitrah, memiliki nurani kejujuran, kebenaran dan ketulusan.

Teori pendidikan personal menjadi sumber bagi pengembangan model kurikulum humanis, yaitu suatu model kurikulum yang bertujuan memperluas kesadaran diri dan mengurangi kerenggangan dan keterasingan dari lingkungan dan proses aktualisasi diri. Kurikulum humanis merupakan reaksi atas pendidikan yang lebih menekankan pada aspek intelektual (kurikulum subjek akademis).

3. Teori Teknologi Pendidikan

Teknologi pendidikan yaitu suatu konsep pendidikan yang mempunyai persamaan dengan pendidikan klasik tentang peranan pendidikan dalam menyampaikan informasi. Namun diantara keduanya ada yang berbeda. Dalam teknologi pendidikan, yang lebih diutamakan adalah pembentukan dan penguasaan kompetensi atau kemampuan-kemampuan praktis, bukan pengawetan dan pemeliharaan budaya lama. Dalam konsep pendidikan teknologi, isi pendidikan dipilih oleh tim ahli bidang-bidang khusus. Isi pendidikan berupa objek dan keterampilan-keterampilan yang mengarah kepada kemampuan vokasional. Isi disusun dalam bentuk disain program atau disain pengajaran dan

disampaikan dengan menggunakan bantuan media elektronika, dan para peserta didik belajar secara individual. Peserta didik berusaha untuk menguasai sejumlah besar bahan dan pola-pola kegiatan secara efisien. Keterampilan-keterampilan barunya segera digunakan dalam masyarakat. Fungsi Guru sebagai direktur belajar (*director of learning*), lebih banyak tugas-tugas pengelolaan dari pada penyampaian dan pendalaman bahan.

Teknologi pendidikan menjadi sumber untuk pengembangan model kurikulum, yaitu model kurikulum yang bertujuan memberikan penguasaan kompetensi bagi para peserta didik. Pembelajaran dilakukan melalui metode pembelajaran individual, media buku atau pun media elektronik, sehingga pebelajar dapat menguasai keterampilan-keterampilan dasar tertentu.

4. Teori Pendidikan Interaksional

Pendidikan interaksional yaitu suatu konsep pendidikan yang bertitik tolak dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dan bekerjasama dengan manusia lainnya. Pendidikan sebagai salah satu bentuk kehidupan juga berintikan kerjasama dan interaksi. Dalam pendidikan interaksional menekankan interaksi dua pihak dari guru kepada peserta didik dan dari peserta didik kepada guru. Lebih dari itu, interaksi ini juga terjadi antara peserta didik dengan materi pembelajaran dan dengan lingkungan, antara pemikiran manusia dengan lingkungannya. Interaksi ini terjadi melalui berbagai bentuk dialog. Dalam pendidikan interaksional, belajar lebih sekedar

mempelajari fakta-fakta. Peserta didik mengadakan pemahaman eksperimental dari fakta-fakta tersebut, memberikan interpretasi yang bersifat menyeluruh serta memahaminya dalam konteks kehidupan. Filsafat yang melandasi pendidikan interaksional yaitu filsafat rekonstruksi sosial. Pendidikan interaksional menjadi sumber untuk pengembangan model kurikulum rekonstruksi sosial, yaitu model kurikulum yang memiliki tujuan utama menghadapkan peserta didik pada tantangan, ancaman, hambatan atau gangguan yang dihadapi. Peserta didik didorong untuk mempunyai pengetahuan yang cukup tentang masalah sosial yang mendesak (*crucial*) dan bekerja sama untuk memecahkannya.

L. Pilar-pilar Pendidikan

Menurut Suwarno menyebutkan ada 5 (lima) pilar pendidikan yang direkomendasikan UNESCO yang dapat digunakan sebagai prinsip pembelajaran yang bisa diterapkan di dunia pendidikan.¹⁰³

1. *Learning to know*

Learning to know bukan sebatas proses belajar di mana pebelajar mengetahui dan memiliki materi informasi sebanyak-banyaknya, menyimpan dan mengingat, namun juga kemampuan untuk dapat memahami makna dibalik materi ajar yang telah diterimanya. Dengan *learning to know*, kemampuan menangkap peluang untuk melakukan pendekatan

¹⁰³ Suwarno, Wiji, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2006), h. 35-36

ilmiah diharapkan bisa berkembang yang tidak hanya melalui logika empirisme semata, tetapi juga secara transcendental, yaitu kemampuan mengaitkannya dengan nilai-nilai spiritual.

2. *Learning to do*

Learning to do merupakan konsekuensi dari *learning to know*. Kelemahan model pendidikan dan pengajaran yang selama ini berjalan adalah mengajarkan “omong” (baca: teori) dan kurang menuntun orang untuk “berbuat” (praktik). *Learning to do* bukanlah pembelajaran yang hanya menumbuhkembangkan kemampuan berbuat mekanis dan keterampilan tanpa pemikiran; tetapi mendorong peserta didik agar terus belajar menumbuhkembangkan kerja, juga mengembangkan teori atau konsep.

3. *Learning to be*

Melengkapi *learning to know* dan *learning to do*. Robinson Crusoe berpendapat bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa kerjasama atau dengan kata lain manusia saling tergantung dengan manusia lain. Manusia di era sekarang ini bisa hanyut ditelan waktu jika tidak berpegang teguh pada jati dirinya. *Learning to be* menuntun peserta didik menjadi ilmuwan sehingga mampu menggali dan menentukan nilai kehidupannya dan menentukan nilai kehidupannya sendiri dalam hidup bermasyarakat sebagai hasil belajarnya.

4. *Learning to live together*

Learning to live together ini mengajarkan seseorang untuk hidup bermasyarakat dan menjadi manusia

berpendidikan yang bermanfaat baik bagi diri sendiri dan masyarakatnya maupun bagi seluruh umat manusia. Kesempatan berinteraksi dengan berbagai individu atau kelompok individu yang bervariasi membentuk kepribadian pembelajar untuk memahami kemajemukan dan melahirkan sikap-sikap positif dan toleran terhadap keanekaragaman dan perbedaan hidup.

5. *Learning how to learn*

Proses belajar tidak boleh berhenti begitu saja meskipun seorang pembelajar telah menyelesaikan sekolahnya. Manusia hidup pada hakekatnya adalah berhadapan dengan masalah. Setiap manusia dituntut untuk menyelesaikan masalah. Satu masalah terjawab, seribu masalah menunggu untuk dijawab. Oleh karena itu, *learning how to learn* akan membawa peserta didik pada kemampuan untuk dapat mengembangkan strategi dan kiat belajar yang lebih independen, kreatif, inovatif, efektif dan efisien, dan penuh percaya diri, karena masyarakat adalah *learning society* atau *knowledge society*. Orang-orang yang mampu menduduki posisi sosial yang tinggi dan penting adalah mereka yang mampu belajar terus-menerus.

Learning how to learn memerlukan model pembelajaran baru, yaitu pergeseran dari model belajar menghafal menjadi model belajar mencari/ meneliti. Asumsi yang digunakan dalam model belajar “menghafal” adalah “pendidik tahu”, peserta didik tidak tahu. Oleh karena itu, pendidik memberi pelajaran, peserta didik menerima. Yang dipentingkan dalam model belajar “menghafal” ini adalah penerima pelajaran, menyimpan

selama-lamanya, dan menggunakannya sesuai dengan aslinya serta menurut instruksi yang telah diberikan. Sebaliknya, pada proses belajar “mencari/meneliti”, peserta didik sendiri yang mencari dan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dihadapinya, sedang pendidikan dituntut membimbing, memotivasi, memfasilitasi, memprovokasi dan menelusuri.

M. Lingkungan Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting dan bermanfaat bagi kehidupan dalam upaya meningkatkan taraf hidup suatu bangsa. Kegiatan pendidikan di manapun berlangsung dalam suatu lingkungan tertentu, baik lingkungan yang berhubungan dengan ruang maupun waktu. Lingkungan memberikan pengaruh terhadap perkembangan peserta didik. Pengaruh yang diberikan oleh lingkungan ada yang bersifat sengaja dan ada tidak sengaja. Artinya lingkungan tidak ada kesengajaan tertentu di dalam memberikan pengaruhnya kepada perkembangan anak.

Ada tiga macam lingkungan, menurut tempat berlangsungnya kegiatan pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Ketiga lingkungan tersebut pendidikan berlangsung agar dapat memberikan pengaruh yang positif kepada perkembangan anak didik, maka hendaknya kita usahakan sedemikian rupa sehingga masing-masing lingkungan senantiasa memberikan pengaruhnya yang baik.

Setiap manusia pasti memiliki sejumlah kemampuan

yang dapat dikembangkan melalui pengalaman. Sesuai Indrakusuma menyebutkan pengalaman itu terjadi karena adanya interaksi manusia dengan lingkungannya. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di luar diri anak yang memberikan pengaruh terhadap perkembangannya. Dengan kata lain lingkungan pendidikan merupakan latar tempat berlangsungnya pendidikan.¹⁰⁴

Lingkungan pendidikan dapat berupa benda, orang, keadaan dan peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar peserta didik yang bisa memberikan pengaruh kepada perkembangannya, baik secara tidak langsung ataupun langsung, baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Disamping lingkungan memberikan pengaruh dan dorongan, lingkungan juga arena yang memberikan kesempatan kepada kemungkinan-kemungkinan atau potensi (pembawaan) yang dimiliki seorang anak untuk berkembang.

Menurut Tirtarahardja fungsi lingkungan pendidikan adalah untuk membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya (fisik/sosial/budaya) dan mengajarkan tingkah laku umum serta menyeleksi atau mempersiapkan individu untuk peranan-peranan tertentu.¹⁰⁵ Sepanjang kehidupannya manusia selalu memperoleh pengaruh atau pendidikan dari tiga tempat, yaitu; keluarga, sekolah dan masyarakat. Ketiga tempat berlangsungnya

¹⁰⁴ Indrakusuma, A.D., *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Malang: FIP IKIP Malang, 1978).

¹⁰⁵ Tirtarahardja, dkk., *Pengantar Pendidikan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).

pendidikan ini disebut dengan tri pusat pendidikan, yaitu;

Pertama, Lingkungan Keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang mula-mula dan terpenting. Sering juga disebut sebagai lingkungan pendidikan yang pertama dan utama karena memang orang tua dalam keluargalah yang terutama memiliki tanggung jawab atas pendidikan anak kandungnya. Menurut kodratnya orang tua harus mendidik anak-anaknya, terdorong oleh suatu insting, yaitu rasa cinta yang asli terhadap keturunannya.

Menurut Indrakusuma, pendidikan yang paling banyak diterima oleh anak adalah dalam keluarga, oleh karena itu tugas utama keluarga dalam pendidikan anak adalah peletak dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Sifat dan tabiat anak sebagian besar berasal dari pendidikan kedua orang tuanya dan anggota keluarga yang lain.¹⁰⁶

Keluarga juga membina dan mengembangkan perasaan sosial anak, seperti rasa tenggang rasa, suka menolong, hidup damai, kerjasama, kegotongroyongan, kepekaan dan sebagainya. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan aspirasi anak, maka keluarga menyerahkan sebagian peran/tanggungjawabnya kepada jalur pendidikan formal (sekolah) maupun non formal (kursus, kelompok belajar, dsb). Peran jalur pendidikan formal (sekolah) semakin lama semakin penting, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan

¹⁰⁶ Indrakusuma, A.D., *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Malang: FIP IKIP Malang, 1978).

aspek kognitif (pengetahuan) dan skill/ psikomotorik (ketrampilan). Hal ini tidak berarti bahwa keluarga dapat melepaskan diri dari tanggung jawab pendidikan anaknya, diharapkan keluarga lebih banyak bekerja sama dan mendukung kegiatan pusat/ lingkungan pendidikan lainnya (sekolah dan masyarakat).

Kedua, Lingkungan Sekolah. Lingkungan sekolah disebut juga lingkungan kedua yang didirikan oleh masyarakat atau negara untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga yang sudah tidak mampu lagi memberi bekal persiapan hidup bagi anaknya. Sehingga pendidikan di sekolah berperan sebagai bagian dan lanjutan dari pendidikan keluarga, serta merupakan jembatan yang menghubungkan kehidupan dalam keluarga dengan kehidupan dalam masyarakat kelak.¹⁰⁷

Untuk mempersiapkan anak agar hidup dengan cukup bekal kepandaian dan kecakapan dalam masyarakat yang modern, telah tinggi kebudayaannya seperti sekarang ini, anak-anak tidak cukup hanya menerima pendidikan dan pengajaran dari lingkungan keluarganya saja. Maka dari itu, masyarakat atau negara mendirikan sekolah-sekolah. Kehidupan dan pergaulan di lingkungan sekolah sifatnya lebih tegas dan lugas, harus ada ketertiban dan peraturan-peraturan tertentu yang harus dijalankan oleh peserta didik dan pendidikan. Pendidikan etika juga diberikan di sekolah, namun hanya merupakan bantuan terhadap pendidikan budi pekerti yang telah dilaksanakan oleh

¹⁰⁷ Indrakusuma, A.D., *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Malang: FIP IKIP Malang, 1978).

keluarga, karena tujuan dan tanggung jawab utama sekolah membekali ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dapat dipergunakan dalam kehidupannya di masyarakat.¹⁰⁸ Sekolah sebagai pusat pendidikan adalah sekolah yang mencerminkan masyarakat yang maju karena pemanfaatan secara optimal ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin maju suatu masyarakat semakin penting peranan sekolah dalam mempersiapkan generasi muda sebelum masuk dalam proses pembangunan masyarakat itu.

Ketiga, Lingkungan Masyarakat. Masyarakat yang berperan aktif dalam bidang pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam. Kelompok ini berupa organisasi-organisasi pendidikan, sosial, politik, ekonomi, keagamaan dan sebagainya. Semua kelompok ini perlu dilibatkan secara aktif dalam membantu dan mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Pengelola atau pihak sekolah hendaknya mampu menganalisis kelompok masyarakat mana yang bisa dilibatkan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Dari ketiga macam pengaruh lingkungan pendidikan (keluarga, sekolah, dan masyarakat), kiranya lingkungan masyarakatlah yang cukup sulit dirancang agar selalu memberikan pengaruhnya yang baik untuk perkembangan anak didik. Karena lingkungan masyarakat itu sangat luas dan banyak berbagai pihak yang berperan dalam masyarakat tersebut, sehingga

¹⁰⁸ Ngalim, Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1992), h. 16

memerlukan pengawasan dan pengontrolan yang lebih agar suasana lingkungan masyarakat dapat memberikan pengaruh yang baik bagi pendidikan anak.

Sebagai gambaran dibawah ini disajikan skema tentang keterlibatan berbagai pihak dalam *School District* di Amerika menurut Hoy & Miskel.¹⁰⁹



Unruh (1974) mengelompokkan masyarakat menurut hubungannya dengan sekolah. Yaitu; (1) *Immadiate* (pihak yang sangat cepat berhubungan dengan sekolah yaitu siswa, guru, dan orang tua siswa); (2) *Associated* (pihak yang tertarik pada sekolah); (3) *Disassociated* (pihak yang tidak tertarik dengan sekolah); dan (4) *Institusionalized* (lembaga umum).¹¹⁰

Hubungan sekolah/ madrasah dengan tri pusat pendidikan. Tri pusat pendidikan hanya dapat dibahas terpisah-pisah secara teoritis, namun realitanya secara

¹⁰⁹ Hoy, W. K. & Miskel, C. C., *Educational Administration: Theory, Research & Practices*. (New York: Random House, 1987).

¹¹⁰ Unruh, A. & Willer, R.A. 1974. *Public Relations for School*. (Belmont California: Liar Siagler Inc./ Fearon Publishers, 1974)

simultan dan terpadu saling memberikan pengaruh timbal-balik dan tidak dapat dipilah-pilah. Buku ini lebih menyoroti/ membahas tentang keterkaitan hubungan sekolah, sebagai bagian dari tri pusat pendidikan, dengan lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Hubungan pengaruh timbal balik antara tingkat partisipasi masyarakat dengan kualitas proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah, menuntut adanya jalinan hubungan yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat. Jalinan hubungan yang dimaksud, realisasinya bisa diwujudkan di dalam berbagai bentuk dan jalinan. Beberapa bentuk atau cara yang telah dikenal, adalah: *open door politics*, atau pemberian kesempatan kepada orang tua murid berkunjung ke sekolah untuk membicarakan masalah khusus yang terjadi pada anaknya; *home visiting* atau kunjungan sekolah ke rumah murid; penggunaan *resources persons*, kunjungan sekolah ke objek-objek tertentu di masyarakat, pertemuan antara orang tua murid dan warga sekolah, serta pengadaan serta mengefektifkan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Menurut Hymes (Indrafachrudi, 1994) teknik penyelenggaraan hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu; 1) Pertemuan kelompok, berupa seminar, lokakarya, sarasehan, dsb. Ragam unsur masyarakat yang dilibatkan di dalam kegiatan ini tergantung dari tema yang sedang dibahas; 2) Tatap muka, pihak sekolah dapat memanggil orang tua siswa yang bermasalah atau siswa yang memiliki kemampuan lebih, yang perlu pembinaan bersama agar

kemampuannya dapat berkembang secara maksimal; 3) Observasi dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan di sekolah, agar masyarakat tersebut mengetahui secara langsung hambatan dan faktor pendukung penyelenggaraan pendidikan, mengetahui keberhasilan sekolah, sehingga diharapkan bersedia membantu pelaksanaan pendidikan di sekolah; dan 4) Surat menyurat dengan berbagai pihak yang dapat dikaitkan dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Seiring dengan perkembangan teknologi, sekolah dapat menerapkan teknik ini dengan menggunakan alat-alat komunikasi berupa telepon, fax, internet, e-mail.¹¹¹

Dengan adanya kerja sama tersebut, para guru akan dapat memperoleh keterangan-keterangan dari orang tua tentang kehidupan dan sifat anak-anaknya yang sangat besar gunanya bagi guru dalam memberikan pelajaran dan pendidikan terhadap murid-muridnya. Sebaliknya, orang tua juga memperoleh pengetahuan dan pengalaman dari guru dalam hal mendidik anak-anaknya sehingga dapat mengetahui kesulitan-kesulitan manakah yang sering dihadapi anak-anaknya di sekolah. Orang tua dapat mengetahui apakah anaknya itu rajin, malas, bodoh, suka mengantuk atau pandai. Dengan demikian, orang tua dapat menjauhkan pandangan dan pendapat yang keliru sehingga terhindarlah salah pengertian yang mungkin timbul antara keluarga dan sekolah.

¹¹¹ Indrafachrudi, S., *Bagaimana Mengakrabkan Sekolah dengan Orangtua Murid dan Masyarakat*. (Malang: IKIP Malang, 1994)

Maisyaroh, mengelompokkan masyarakat secara umum, yaitu: 1) Masyarakat orang tua, adalah gabungan dari orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah tertentu; 2) Masyarakat yang terorganisasi dalam organisasi tertentu; dan 3) Masyarakat luas yang terdiri dari individu-individu yang tidak terkait secara langsung terhadap penyelenggaraan program pendidikan.¹¹²

Kenyataan di Indonesia, dari sekian kelompok tersebut yang paling aktif peranannya adalah masyarakat, orang tua siswa. Sedangkan masyarakat terorganisasi dan masyarakat luas sudah berperan dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan namun masih belum optimal. Perhatian orang tua itupun hanya ditujukan pada lembaga pendidikan tempat anaknya bersekolah, sementara lembaga pendidikan yang lain di luar perhatiannya.

Kelompok terorganisasi di Indonesia yang bisa diajak kerjasama antara lain anggota kelompok dari pengelola perusahaan, DPR, dewan pendidikan, komite sekolah, majelis madrasah, kelompok layanan kesehatan, kelompok agama, pengelola televisi, radio, bank, kantor pos/giro dan LSM.

Wujud kerjasama sekolah dengan kelompok terorganisasi di atas berupa pemberian beasiswa, pembangunan gedung dan pembelian fasilitas sekolah, peningkatan kemampuan kepala sekolah, guru dan

¹¹² Maisyaroh, *Manajemen Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Dalam, Imron, A., Maisyaroh dan Burhanuddin (Eds.), *Manajemen Pendidikan: Analisis Substansi dan Aplikasinya dalam Institusi Pendidikan*, (Malang: UM Press, 2003). h. 121-128

pegawai sekolah (pelatihan, seminar dan lokakarya), bantuan pengembangan pembelajaran, bantuan publikasi dan penayangan kegiatan sekolah. Pelaksanaan kerjasama ini menuntut pihak sekolah lebih proaktif dalam menjalin kerjasama sehingga kelompok terorganisasi yang ada mau dan berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas sekolah.

Sekolah juga perlu mewaspadaai kemungkinan usaha-usaha negatif dari kelompok yang bersedia diajak kerjasama, tetapi berusaha untuk mengeksploitasi keberadaan sekolah serta berusaha mengeritik dan menyerang sekolah dengan tujuan untuk menjatuhkan kebijakan sekolah. Misalnya suatu perusahaan bersedia menjadi donatur penyelenggaraan suatu sekolah dengan syarat agar siswa mau menggunakan produk perusahaan tersebut, sementara produk tersebut kalau dikonsumsi siswa dapat membahayakan perkembangannya, dapat merusak masa depan siswa. Kalau terjadi usaha-usaha yang demikian maka pihak sekolah, dalam hal ini pimpinan sekolah, perlu tanggap dengan cara menganalisis motif di balik pemberian dana tersebut dan memecahkan masalahnya secara bijaksana.

Peningkatan kontribusi setiap pusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik memerlukan keserasian serta kerja sama yang erat dan harmonis antar tripusat pendidikan (lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat). Berbagai upaya perlu dilakukan agar program pendidikan di setiap pusat pendidikan tersebut saling mendukung dan memperkuat satu dengan

lainnya.

Dalam lingkungan keluarga telah diupayakan berbagai hal (seperti perbaikan gizi, permainan edukatif) yang dapat menjadi ladan untuk pelaksanaan pengembangan pendidikan selanjutnya di sekolah dan masyarakat. Pada lingkungan sekolah diupayakan berbagai hal yang lebih mendekatkan hubungan sekolah dengan orang tua siswa, misalnya melalui organisasi orang tua siswa, kunjungan guru ke rumah orang tua murid atau sebaliknya kunjungan orang tua murid ke sekolah.

Sekolah juga mengupayakan agar programnya berkaitan erat dengan masyarakat sekitarnya (seperti menerjunkan siswa ke masyarakat, mendatangkan nara sumber dari masyarakat ke sekolah). Akhirnya lingkungan masyarakat mengusahakan berbagai kegiatan atau program yang menunjang serta melengkapi program pendidikan di lingkungan keluarga dan sekolah. Dengan adanya kontribusi tripusat pendidikan yang saling memperkuat dan saling melengkapi tersebut, maka diharapkan akan memberikan peluang untuk mewujudkan sumber daya manusia terdidik yang bermutu.

N. Sistem Pendidikan Nasional

Menurut Idris, sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen, elemen atau unsur sebagai sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, tidak sekedar acak, yang saling membantu untuk

mencapai suatu hasil (*product*).¹¹³ Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani “*systema*”, yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Istilah sistem dipakai untuk menunjukkan beberapa pengertian, salah satunya adalah sistem dapat dipakai untuk menunjukkan sehimpunan gagasan atau ide yang tersusun dan terorganisasi sehingga membentuk suatu kesatuan yang logis.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, pendidikan merupakan suatu sistem yang mempunyai unsur tujuan/sasaran pendidikan, peserta didik, pengelola pendidikan, struktur atau jenjang, kurikulum dan peralatan/ fasilitas.¹¹⁴ Sistem pendidikan adalah jumlah keseluruhan dari bagian-bagiannya yang saling bekerjasama untuk mencapai hasil yang diharapkan berdasarkan atas kebutuhan yang telah ditentukan. Setiap sistem pasti mempunyai tujuan dan semua kegiatan dari semua komponen atau bagian-bagiannya adalah diarahkan untuk tercapainya tujuan tersebut. Karena itu, proses pendidikan merupakan sebuah sistem, yang disebut sebagai sistem pendidikan.¹¹⁵

Pendidikan merupakan suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan pendidikan, menyangkut 3 (tiga) unsur pokok yaitu; 1) Unsur masukan ialah peserta didik dengan berbagai ciri yang ada pada diri

¹¹³ Zahara Idris, *Dasar-dasar Kependidikan*, (Padang: Angkasa Raya, 1987), h. 33

¹¹⁴ H. Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2003), h. 107.

¹¹⁵ Hasbullah. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.123

peserta didik (bakat, minat, kemampuan, keadaan jasmani); 2) Unsur usaha adalah proses pendidikan yang terkait berbagai hal, seperti pendidik, kurikulum, gedung sekolah, buku, metode belajar; 3) Unsur hasil usaha adalah hasil pendidikan yang meliputi hasil belajar (pengetahuan, sikap dan keterampilan) setelah selesainya suatu proses belajar mengajar tertentu.

Pendidikan merupakan proses dan alat mewariskan kebudayaan dari generasi tua kepada generasi muda. Pendidikan nasional merupakan proses dan alat mewariskan kebudayaan nasional. Manusia Indonesia terbina oleh tata nilai sosio-budayanya sendiri dan manusia Indonesia merupakan pewaris dan penerus tata nilai tersebut. Oleh karena itu, sosio-budaya harus dijadikan dasar dalam proses pendidikan.¹¹⁶

Sistem pendidikan nasional adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan aktivitas pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional merupakan suatu supra sistem, yaitu suatu sistem yang besar dan kompleks, yang didalamnya tercakup beberapa beberapa bagian yang juga merupakan sistem-sistem.¹¹⁷ Satuan dan kegiatan pendidikan yang ada merupakan sistem pendidikan yang terdiri dari sistem pendidikan tergabung secara terpadu dalam sistem pendidikan nasional, yang secara bersama berusaha mencapai

¹¹⁶H. Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati. 2001. Ilmu Pendidikan. (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h.192

¹¹⁷Hasbullah. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 124.

tujuan pendidikan nasional.

Secara teoritis, sistem pendidikan terdiri dari komponen yang menjadi inti dari proses pendidikan. Menurut P.H. Combs (1982) komponen pendidikan yaitu; 1) Tujuan dan Prioritas. Fungsinya mengarahkan kegiatan sistem. Hal ini merupakan informasi tentang apa yang hendak dicapai oleh sistem pendidikan dan urutan pelaksanaannya. Contohnya ada tujuan umum pendidikan, yaitu tujuan yang tercantum dalam peraturan perundangan negara, yaitu tujuan pendidikan nasional, ada tujuan institusional yaitu tujuan lembaga tingkat pendidikan dan tujuan program, seperti; S1, S2, S3 dan tujuan kulikuler, yaitu tujuan setiap suatu mata pelajaran/ mata kuliah. Tujuan yang terakhir ini dibagi dua yaitu tujuan pengajaran umum (*instrusional umum*) dan tujuan pengajaran khusus (*instruksional khusus*); 2) Peserta Didik. Fungsinya ialah belajar. Diharapkan peserta didik mengalami proses perubahan tingkah laku sesuai dengan tujuan sistem pendidikan. Contohnya, berapa umurnya, berapa jumlahnya, bagaimana tingkat perkembangannya, pembawaannya, motivasinya untuk belajar dan sosial ekonomi orang tuanya; 3) Manajemen atau Pengelolaan. Fungsinya mengkoordinasikan, mengarahkan dan menilai sistem pendidikan. Komponen ini bersumber pada sistem nilai dan cita-cita yang merupakan pola kepemimpinan dalam pengelolaan sistem pendidikan, Contohnya pemimpin yang mengelola sistem pendidikan itu bersifat otoriter, demokratis, atau *laissez-faire*; 4) Struktur dan Jadwal Waktu. Fungsinya mengatur pembagian waktu dan kegiatan. Contohnya,

pembagian waktu ujian, wisuda, kegiatan perkuliahan, seminar, kuliah kerja nyata, kegiatan belajar mengajar dan program pengamalan lapangan; 5) Isi dan Bahan Pengajaran. Fungsinya untuk menggambarkan luas dan dalamnya bahan pelajaran yang harus dikuasai peserta didik. Selain itu untuk mengarahkan dan mempolakan kegiatan-kegiatan dalam proses pendidikan. Contohnya, isi bahan pelajaran untuk setiap mata pelajaran atau mata kuliah dan untuk pengamalan lapangan; 6) Guru dan pelaksana. Berfungsi menyediakan bahan pelajaran dan menyelenggarakan proses pembelajaran untuk peserta didik. Selain itu, guru dan pelaksana juga berfungsi sebagai pembimbing, pengaruh, untuk menumbuhkan aktivitas peserta didik dan sekaligus sebagai pemegang tanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan. Contohnya, pengalaman dalam mengajar, status resminya guru yang sudah di angkat atau tenaga sukarela dan tingkatan pendidikannya; 7) Alat Bantu Belajar. Maksudnya segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan, yang berfungsi untuk mempermudah atau mempercepat tercapainya tujuan pendidikan, contohnya; film, buku, papan tulis, peta; 8) Fasilitas. Fungsinya untuk tempat terselenggaranya proses pendidikan. Contohnya, gedung dan laboratorium beserta perlengkapannya; 9) Teknologi. Fungsinya memperlancar dan meningkatkan hasil guna proses pendidikan. Yang dimaksud dengan teknologi ialah semua teknik yang digunakan sehingga sistem pendidikan berjalan dengan efisien dan efektif. Contohnya, pola komunikasi satu arah, artinya

guru menyampaikan pelajaran dengan berceramah, peserta didik mendengarkan dan mencatat: atau pola komunikasi dua arah, artinya ada dialog antara guru dan peserta didik; 10) Pengawasan Mutu. Fungsinya membina peraturan-peraturan dan standar pendidikan. Contohnya, peraturan tentang penerimaan anak/peserta didik dan staf pengajar, peraturan ujian dan penilaian; 11) Penelitian. Fungsinya untuk memperbaiki dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan penampilan sistem pendidikan. Contohnya, dulu bangsa Indonesia belum mampu membuat kapal terbang dan mobil tetapi sekarang bangsa Indonesia sudah pandai. Sebelum tahun 1980-an, kebanyakan perguruan tinggi di Indonesia belum melaksanakan sistem satuan kredit semester (SKS), sekarang seluruh perguruan tinggi telah melaksanakannya; 12) Biaya. Fungsinya melancarkan proses pendidikan dan menjadi petunjuk tentang tingkat efisiensi sistem pendidikan. Contohnya, sekarang biaya pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, pemerintah dan masyarakat.¹¹⁸

Sistem pendidikan terdiri dari satuan dan kegiatan yang tergabung secara terpadu dalam sistem pendidikan nasional, bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Tujuan sistem pendidikan nasional berfungsi memberikan arah pada semua kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan yang ada. Tujuan pendidikan nasional merupakan tujuan umum yang hendak dicapai oleh semua satuan pendidikannya, meskipun setiap

¹¹⁸ Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 124.

satuan pendidikan mempunyai tujuan sendiri, namun tidak terlepas dari tujuan pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang RI No.2 tahun 1989 BAB II Pasal 3 Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.¹¹⁹

Tujuan Pendidikan Nasional adalah membangun kualitas manusia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan selalu dapat meningkatkan kebudayaan, sebagai warga negara yang berjiwa pancasila mempunyai semangat dan kesadaran yang tinggi, berbudi pekerti yang luhur dan berkepribadian yang kuat, cerdas, terampil, dapat mengembangkan dan menyuburkan sikap demokrasi, memelihara hubungan baik antara sesama manusia dan dengan lingkungannya, sehat jasmani, mampu mengembangkan daya estetik, berkesanggupan membangun diri dan masyarakatnya.¹²⁰

Dalam sistem pendidikan nasional, peserta didik adalah semua warga negara, setiap satuan pendidikan yang ada harus memberikan kesempatan menjadi peserta didik kepada semua warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan kekhususannya, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, suku bangsa dan sebagainya, hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran dan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar

¹¹⁹ Hasbullah, *Ibid.*, h. 127

¹²⁰ H. Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h.198

dan pemerintah wajib membiayainya.

O. Kelembagaan dan Pengelolaan Pendidikan Nasional

Kata pengelolaan berasal dari kata manajemen. Oteng Sutisna menyebutkan manajemen artinya administrasi¹²¹. Pengelolaan pendidikan diartikan sebagai upaya untuk menerapkan kaidah administrasi dalam bidang pendidikan. Sondang P. Siagian mendefinisikan pengertian pengelolaan/ manajemen/ administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.¹²² Dengan demikian pengelolaan adalah manajemen dan manajemen adalah administrasi.

Menurut Nur Syam, pengelolaan pendidikan merupakan manajemen pendidikan, artinya proses mencapai tujuan pendidikan melalui kerjasama dengan orang lain. Selanjutnya Nur Syam menambahkan guru sebagai komponen penting di dalam pengelolaan pendidikan sebagai penggerak untuk mencapai tujuan pendidikan. Maka pembinaan terhadap guru menjadi urgen dalam proses pengelolaan pendidikan. Kemudian staf dan tenaga kependidikan juga menempatkan posisi yang sangat mendasar. Jangan pernah berfikir bahwa tenaga kependidikan tidak penting. Di dalam standar pendidikan nasional pendidikan bahwa keberadaan

¹²¹ Oteng Sutisna, *Administrasi Pendidikan: Dasar Teoritis Untuk Praktek Profesional*, (Bandung: Angkasa, 1983), h.149

¹²² Sondang P. Siagian, *Teori & Praktek Kepmimpinan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 16-17

tenaga kependidikan sangat diperhitungkan.¹²³ Dengan demikian dalam tataran pengelolaan pendidikan memperlihatkan pengaturan lalu lintas uang yang diterima dan dibelanjakan mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan penyampaian umpan balik dalam proses pendidikan.

1. Pengelolaan Pendidikan

a. Pengambilan Keputusan

Membuat putusan merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari baik secara individu ataupun secara kelompok dalam suatu organisasi. Oteng Sutisna, mengemukakan bahwa suatu putusan sebenarnya proses memilih tindakan tertentu antara sejumlah tindakan alternatif yang mungkin.¹²⁴

Pembuatan putusan merupakan salah satu fungsi administrasi yang mesti dilakukan oleh para administrator yang membawa dampak terhadap seluruh organisasi, perilaku dan hasil dari putusan. Sebab proses pembuatan putusan merupakan suatu usaha untuk mencapai tujuan dari unit yang menjadi tanggung jawabnya. Urutan langkah pembuatan putusan adalah; a. menentukan masalah; b. menganalisa situasi yang ada; c. mengembangkan alternatif kemungkinan; d. menganalisa alternatif kemungkinan; e. memilih alternatif yang paling mungkin.

¹²³ Nur Syam, *Ibid.*, h. 75

¹²⁴ Oteng Sutisna, *Ibid.*, h. 149

b. Perencanaan

Merencanakan adalah kegiatan persiapan untuk mengantisipasi tindakan yang dilaksanakan. Perencanaan adalah merumuskan tujuan dan teknik untuk dapat mewujudkan tujuan.

c. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan suatu gerak langkah menuju ke arah pelaksanaan rencana yang telah disusun sebelumnya. Pelaksanaan fungsi pengorganisasian harus menghasilkan suatu organisasi yang bergerak dengan suatu kesatuan yang bulat.

Pengorganisasian juga merupakan suatu fungsi administrasi setelah fungsi perencanaan. Dalam suatu organisasi yang baik, semua bagian semestinya bekerjasama dalam suatu keselarasan dan terintegrasi dari bagian yang terpisah menuju kepada suatu kesatuan yang tak terpisahkan disebabkan adanya unsur yang mempersatukan yaitu pengorganisasian.

d. Komunikasi

Mengkomunikasikan berarti menyalurkan informasi, ide, penjelasan, perasaan, pertanyaan dari satu orang kepada orang lain atau dari satu kelompok kepada kelompok yang lain. Mengkomunikasikan dalam suatu organisasi adalah agar dapat mempengaruhi sikap dan perilaku para anggota organisasi secara sendiri atau secara berkelompok.

e. Koordinasi

Mengkoordinasikan adalah serangkaian kegiatan untuk mempersatukan sumbang, saran, bahan dan sumber lain dari para anggota dalam organisasi, ke arah pencapaian tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan secara bersama. Dengan kata lain tanpa koordinasi yang baik dalam organisasi sulit untuk mengharapkan tercapainya keteraturan, ketertiban dalam upaya mengejar tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi. Dengan koordinasi unit-unit yang terpisah dalam organisasi diupayakan untuk saling dihubungkan dengan unit-unit yang lainnya, sehingga unit-unit yang terpisah menjadi saling mempengaruhi unit-unit lain dan menjadi satu kesatuan yang terintegrasi dan harmonis. Fungsi koordinasi adalah mempersatukan unit-unit dan menciptakan setiap unit untuk saling melengkapi dan mendukung unit yang lainnya.

f. Pengawasan

Pengawasan identik dengan supervisi. Menurut Good Carter dalam Mahmudah, supervisi adalah usaha dari petugas sekolah dalam memimpin dan membimbing guru dan petugas lainnya, dalam memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulir, menyeleksi pertumbuhan jabatan-jabatan, perkembangan guru-guru dan merevisi tujuan pendidikan, bahan-bahan pengajaran dan metode pengajaran serta evaluasi pengajaran.¹²⁵

¹²⁵ Mahmudah, *Majalah, Fokus Pengawasan, Tegas dan Indepen-*

Pengawasan adalah sebagai suatu proses fungsi dan prinsip administrasi untuk melihat yang terjadi sesuai dengan yang semestinya terjadi. Apabila tidak sesuai dengan semestinya maka perlu adanya penyesuaian yang mesti dilakukan. Dengan kata lain pengawasan adalah fungsi administratif untuk memastikan bahwa yang dikerjakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya.

g. Evaluasi

Penilaian sebagai seperangkat kegiatan yang menentukan baik tidaknya program-program atau kegiatan-kegiatan organisasi yang sedang dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan menerapkan proses penilaian terhadap suatu program atau kegiatan yang sedang dijalankan organisasi kekuatan dan kelemahan dari program atau kegiatan tersebut dapat diketahui untuk dapat terus dipertahankan kekuatannya dan sedikit demi sedikit dikurangi untuk dihilangkan kelemahannya dalam menjalankan program atau kegiatan organisasi berikutnya.

2. Beberapa Pendekatan Pengelolaan Pendidikan

a. Pendekatan Organisasi Klasik

Pendekatan organisasi klasik sering disebut dengan gerakan manajemen ilmiah yang dipelopori oleh Frederick Taylor seorang yang memiliki latar belakang dan pengalaman sebagai buruh, juru ketik, mekanik dan akhirnya berpengalaman

den, Pagari Kemenag Dari Pungli, Nomor 54 Tahun XIV Triwulan II 2017, ww.itjen.kemenag.go.id, h. 59

sebagai kepala teknik yang hidup antara tahun 1856 sampai dengan tahun 1915. Gerakan ini mencari upaya untuk dapat menggunakan orang secara efektif dalam organisasi industri. Konsep ini adalah orang dapat juga bekerja layaknya sebagai mesin. Frederick Taylor dan teman-temannya berkeyakinan bahwa para pekerja yang didorong motivasi ekonomi dan keinginan psikologis yang terbatas yang memerlukan arahan-arahan tetap.

b. Pendekatan Hubungan Manusia

Pendekatan hubungan manusia adalah gerakan yang lahir dan berkembang sebagai reaksi terhadap pendekatan organisasi klasik. Pendekatan hubungan manusia ini dipelopori oleh Mary Parker Follett (1868-1933) orang yang pertama kali mengenal pentingnya faktor-faktor manusia dalam administrasi. Mary Follet juga banyak menulis yang berkenaan dengan sisi manusia dalam administrasi. Mary Follet percaya bahwa masalah yang mendasar dalam semua organisasi adalah mengembangkan dan mempertahankan hubungan dinamis dan harmonis. Walaupun terjadi konflik, menurut pemikiran Mary Follet, konflik tersebut merupakan suatu proses yang normal bagi pengembangan hal yang mengakibatkan terjadinya konflik itu.

c. Pendekatan Prilaku

Pendekatan prilaku dalam administrasi adalah menggabungkan antara hubungan sosial dengan struktur formal dan menambahkannya dengan proposisi yang diambil dari psikologi, sosiologi,

ilmu politik dan ekonomi. Pendekatan ini dipelopori oleh Chester I. Barnard yang hidup antara tahun 1886 sampai dengan tahun 1961. Barnard adalah seorang kepala eksekutif pada perusahaan Bell Telephone di New Jersey yang menulis buku dengan judul "*Functions of the Executive*" (1938). Dalam buku ini Barnard mengulas secara lengkap teori perilaku yang kooperatif dalam organisasi formal. Barnard menyimpulkan bahwa kontribusi kerjanya berkenaan dengan konsep struktur dan dinamis. Konsep-konsep struktur yang dianggap penting adalah individu, sistem kerjasama, organisasi formal, organisasi formal yang kompleks, dan juga organisasi informal. Konsep-konsep dinamis yang penting, menurut Barnard, adalah kerelaan, kerjasama, komunikasi, otoritas, proses keputusan dan keseimbangan dinamik.

3. Kelembagaan pendidikan

Lembaga pendidikan dibagi menjadi 4, yaitu; *Pertama*, orang tua sebagai lembaga pendidikan. Orang tua adalah orang pertama yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada anak, sebab orang tua ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya, maka orang tua dapat dikatakan sebagai suatu lembaga pendidikan.

Kedua, Yayasan sebagai lembaga pendidikan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan yayasan adalah yayasan yang bersifat sosial, seperti yayasan pemeliharaan anak yatim piatu dan yayasan pemeliharaan anak cacat. Yayasan ini merupakan tempat para anak-anak yang

sudah tidak memiliki orang tua atau menyandang cacat serta tidak mempunyai tempat tinggal, maka mendapatkan perlindungan dari yayasan.

Ketiga, Lembaga keagamaan. Di Indonesia banyak kita jumpai lembaga keagamaan, seperti; pondok pesantren, masjid, gereja serta biara. Lembaga tersebut mempunyai tugas dalam penyelenggaraan pendidikan agama bagi para penganutnya.

Keempat, Negara sebagai lembaga pendidikan. Negara sebagai suatu lembaga persekutuan hidup yang tertinggi, yang menginginkan untuk memiliki warga negara itu yang berkewajiban untuk memberikan pendidikan bagi calon warganegaranya. Hal ini mengharuskan negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan didalam negaranya, maka dengan demikian Negara dapat dikatakan sebagai lembaga pendidikan.

Lembaga Pendidikan merupakan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional menyebutkan bahwa lembaga pendidikan terdiri dari lembaga pendidikan formal, lembaga non formal dan lembaga informal. Serta ruang lingkup pendidikan meliputi informal, formal dan nonformal.¹²⁶

¹²⁶ Azyumardi Azra, Pendidikan Islam; *Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002, hal. 5

a. Lembaga Pendidikan Formal

Dalam Undang-undang No 20 Tahun 2003 lembaga pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Lembaga pendidikan jalur normal terdiri dari lembaga pendidikan prasekolah, lembaga pendidikan dasar (SD/SMP), lembaga pendidikan menengah (SMA/SMK) dan lembaga pendidikan tinggi (PT).¹²⁷

PP No. 7 tahun 1990 pengelolaan pendidikan prasekolah, terutama Taman Kanak-kanak dilakukakan oleh seorang kepala dan dibantu oleh tenaga kependidikan lainnya. Kepala TK bertanggung jawab atas pengelolaan tenaga kependidikan, peserta didik, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, dana, sarana dan prasarana serta administrasi.¹²⁸ PP No. 28 tahun 1990, pengelolaan pendidikan dasar sebagai bagian dari sistem pendidikan Nasional merupakan tanggung jawab Mendikbud. Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan, kurikulum, buku pelajaran dan peralatan pendidikan dari satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah adalah tanggung jawab Mendikbud.¹²⁹

PP No. 71 tahun 1991, pengelolaan pendidikan

¹²⁷ Undang-undang No 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional

¹²⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990, Tentang Pengelolaan Pendidikan Prasekolah

¹²⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, Tentang Pengelolaan Pendidikan Dasar

luar sekolah dilakukan oleh penyelenggara pendidikan luar sekolah yang terdiri dari pemerintah, badan kelompok atau perorangan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan jenis pendidikan luar sekolah yang diselenggarakannya.¹³⁰ PP No. 71 tahun 1991, pengelolaan pendidikan Luar biasa sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Mendikbud.¹³¹

Sedangkan dalam system pendidikan nasional, dinyatakan bahwa setiap warga Negara diwajibkan mengikuti pendidikan formal minimal sampai tamat SMP. Lembaga pendidikan formal berorientasi pada pengembangan manusia Indonesia seutuhnya.

Adapun ciri-ciri pendidikan formal adalah; 1) Pendidikan berlangsung dalam ruang kelas yang sengaja dibuat oleh lembaga pendidikan formal, 2) Guru adalah orang yang ditetapkan secara resmi oleh lembaga, 3) Memiliki administrasi dan manajemen yang jelas, 4) Adanya batasan usia sesuai dengan jenjang pendidikan, 5) Memiliki kurikulum formal, 6) Adanya perencanaan, metode, media, serta evaluasi pembelajaran, 7) Adanya batasan lama studi, 8) Kepada peserta yang lulus diberikan ijazah, 9) Dapat meneruskan pada jenjang yang lebih tinggi.

Sedangkan lembaga-lembaga penyelenggaraan pendidikan formal antara lain sebagai berikut; 1)

¹³⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991, Pengelolaan Pendidikan Luar Sekolah

¹³¹ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991, Pengelolaan Pendidikan Luar Biasa

Taman Kanak-kanak (TK); 2) Raudatul Athfal (RA); 3) Sekolah Dasar (SD); 4) Madrasah Ibtidaiyah (MI); 5) Sekolah Menengah Pertama (SMP); 6) Madrasah Tsanawiyah (MTs); 7) Sekolah Menengah Atas (SMA); 8) Madrasah Aliyah (MA); 9) Sekolah Menengah Kejuruan SMK); 10) Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK); 11) Perguruan Tinggi, meliputi; Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas.

Dalam sistem pendidikan Nasional, dinyatakan setiap warga negara diwajibkan mengikuti pendidikan formal minimal sampai tamat SMP. Lembaga pendidikan formal berorientasi pada pengembangan manusia Indonesia seutuhnya.

b. Lembaga Pendidikan Nonformal

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang lembaga pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Lembaga pendidikan nonformal adalah lembaga pendidikan yang disediakan bagi warga Negara yang tidak sempat mengikuti ataupun menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu dalam pendidikan formal. Pendidikan nonformal semakin berkembang, dengan bukti semakin dibutuhkannya keterampilan pada seseorang unrtuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan.¹³²

Faktor pendorong perkembangan pendidikan

¹³² Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang lembaga pendidikan non formal

nonformal, diantaranya; a. Semakin banyaknya jumlah angkatan muda yang tidak dapat melanjutkan sekolah, b. Lapangan kerja, khususnya sektor swasta mengalami perkembangan cukup pesat dan lebih dibandingkan perkembangan sektor pemerintah.

Adapun program pendidikan nonformal yang disetarakan dengan pendidikan formal, contohnya kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C. Pendidikan nonformal yang terjadi pada organisasi masyarakat seperti organisasi keagamaan, sosial, kesenian, olah raga dan pramuka.

Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Dengan kata lain, pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kemudaan, pendidikan pembedayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan lainnya.

Adapun ciri-ciri pendidikan nonformal tersebut adalah sebagai berikut; 1) Pendidikan berlangsung dalam lingkungan masyarakat. Guru adalah fasilitator yang diperlukan; 2) Tidak adanya pembatasan usia; 3) Materi pelajaran praktis disesuaikan dengan kebutuhan pragmatis; 4)

Waktu pendidikan singkat dan padat materi; 5) Memiliki manajemen yang terpadu dan terarah; 6) Pembelajaran bertujuan membekali peserta dengan keterampilan khusus untuk persiapan diri dalam dunia kerja.

Sedangkan lembaga penyelenggaraan pendidikan nonformal antara lain; 1) Kelompok bermain (KB); 2) Taman penitipan anak (TPA); 3) Lembaga khusus; 4) Sanggar; 5) Lembaga pelatihan; 6) Kelompok belajar; 7) Pusat kegiatan belajar masyarakat; 8) Majelis taklim; 9) Lembaga Keterampilan dan Pelatihan.

c. Lembaga Pendidikan Informal

Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.¹³³ Lembaga pendidikan informal adalah pendidikan yang ruang lingkupnya lebih terarah pada keluarga dan masyarakat. Pendidikan keluarga adalah pendidikan pertama dan utama. Dikatakan pertama, karena anggota keluargalah yang pertama sekali memperkenalkan bayi atau anaknya dengan lingkungan dan memberikan pembinaan terhadap bayi atau anak adalah dari sebuah anggota keluarga.

Pendidikan pertama dapat dipandang sebagai peletak pondasi pengembangan berikutnya. Adanya istilah pendidikan utama juga dikarenakan adanya pengembangan tersebut. Namun pendidikan informal, khususnya pendidikan keluarga memang

¹³³ Undang-undang No 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, hal. 72

belum ditangani seperti pada pendidikan formal, sehingga masuk akal jika sebagian besar keluarga tidak paham tentang mendidik anak dengan benar.

Ciri-ciri pendidikan informal adalah; a) Pendidikan berlangsung terus-menerus tanpa mengenal tempat dan waktu, b) Guru adalah orang tua, c) Tidak adanya manajemen yang jelas.

Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Ayat 2 menjelaskan hasil pendidikan seperti dimaksud pada ayat 1 diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Ayat 3 menjelaskan ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal seperti dimaksud dalam ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.¹³⁴

¹³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Bandung: Citra Umbara. Pasal 27

BAB III

KONSEP PENDAPATAN KELUARGA DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSAAN PENDIDIKAN

A. Pendapatan Keluarga

Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Pengertian tersebut menitikberatkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Dengan kata lain, pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi.

Dengan terlalu terpusatnya kegiatan ekonomi negara-negara berkembang disektor pertanian, ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan mereka mempunyai tingkat pendapatan yang sangat rendah. Di Indonesia kita lihat adanya dua golongan penduduk

yakni yang mempunyai pendapatan tetap dan tidak tetap. Golongan pertama adalah semua mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta, sedangkan golongan yang kedua meliputi pedagang, petani, buruh dan sebagainya.

Tinggi rendahnya pendapatan seseorang di Indonesia belum ada penilaian secara terperinci, sehingga sulit untuk memperoleh informasi yang obyektif mengenai pendapatan perbulan atau pertahunnya secara keseluruhannya. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pembukuan yang baik dan ketakutan petugas pajak dalam menentukan kategori tinggi rendahnya pendapatan.

1. Pendapatan.

Pengertian Pendapatan dapat dilihat dari berbagai ilmu, baik dari sudut ilmu ekonomi dan akuntansi, menurut Robert M. Z. Lawang menyebutkan pendapatan adalah semua yang diterima oleh seseorang dalam satu bulan atau satu tahun yang dapat diukur dengan nilai ekonomi.¹ Untuk mengukur pendapat seseorang kita membagi penduduk satu daerah atau satu desa kedalam beberapa kategori, pendapatan tinggi, pendapatan sedang dan pendapatan rendah. Namun untuk menentukan tinggi rendahnya pendapatan itu sangat relative artinya pendapat tinggi pada daerah A, tidak harus tinggi pula daerah B, untuk hal ini si penelitalah yang menentukan, dengan dasar pertimbangan keadaan masyarakat yang sedang atau akan diteliti.

¹Robert M.Z. Lawang, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Karonika, 1985), h. 25

Terkait pendapatan Sumitro Djojohadikusumo berpendapat bahwa produk pertiap jiwa (produk perkapita) dan pendapatan tiap jiwa (pendapatan perkapita) merupakan ukuran tingkat kehidupan bagi masyarakat. Selanjutnya dikatakan rendahnya pendapatan pada masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kepadatan penduduk, rendahnya nilai barang dan jasa pada masyarakat itu sendiri, hal yang demikian umumnya terdapat pada Negara-negara yang sedang berkembang dan sedang membangun.²

Menurut Sardono Sukirno struktur ekonomi Negara-negara berkembang dan Negara-negara maju sangat jauh berbeda, sudah kita sadari sepenuhnya, bahwa kegiatan-kegiatan ekonomi di Negara berkembang terpusat pada kegiatan-kegiatan disektor pertanian, sedang di Negara-negara maju terpusat industri.³

J.b.a.f. Mayor Polat mengungkapkan tentang pendapatan keluarga pendapatan keluarga tidak terdiri atas upah atau gaji bapak saja. Disamping ada tambahan dari pekerjaan sambilan dari pekerjaan dan kerajinan wanita dan anak-anak dirumah, dari sumbangan kawan-kawan dirumah serta dari pertolongan dan hadiah kaum keluarga lain, tak dapat diabaikan pula jasa para anggota keluarga berupa mencuci pakaian, membersihkan rumah, memelihara pekarangan, memperbaiki kerusakan rumah dan sebagainya.⁴

² Sumitro Djojohadikusumo, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: PT. Pembangunan, 1955), h. 22

³ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Bina Grafika, 1978), h. 150

⁴ J.b.a.f. Mayor Polat, *Sosiologi Suatu Buku Pengantar Ringkas*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1979), h. 337

Dengan demikian jika bapak sebagai pencari rezeki dan anggota lainnya sebagai konsumen belaka adalah kurang realistis. J.b.a.f. Mayor Polat mengatakan kini wanita ikut bekerja, tetapi jika tinggal di rumah, pekerjaannya produktif pula, hal ini menjadi jelas jika seorang anggota keluarga harus berdiam atau makan diluar rumah, mempertinggi pengeluaran.⁵

Definisi pendapatan menurut ilmu ekonomi menutup kemungkinan perubahan lebih dari total harta kekayaan badan usaha pada awal periode, dan menekankan pada jumlah nilai statis pada akhir periode. Secara garis besar pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang.

Menurut ilmu akuntansi, konsep pendapatan dapat didefinisikan dari berbagai literatur baik dari teori akuntansi maupun teori akuntansi. Namun pada dasarnya konsep pendapatan dapat ditelusuri dari beberapa sudut pandang, yaitu; 1) Pandangan yang menekankan pada pertumbuhan atau peningkatan jumlah aktiva yang timbul sebagai hasil dari kegiatan operasional perusahaan; 2) Konsep dasar pendapatan pada dasarnya adalah suatu proses mengenai arus penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan selama jangka waktu tertentu; 3) Konsep pendapatan sering juga dilihat melalui pengaruhnya terhadap ekuitas pemilik. Berbagai definisi yang timbul sering muncul dari kombinasi konsep-konsep tersebut. Pada hakekatnya konsep dasar pendapatan merupakan proses arus yaitu

⁵J.b.a.f. Mayor, Ibid., h. 336

penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan selama jangka waktu tertentu.

Berikut beberapa pengertian tentang pendapatan yang dikemukakan dari berbagai literatur akuntansi. Menurut Donalds E. Kieso dan Jerry J. Weygandy, memberikan definisi sebagai berikut: *Revenue is an in flow of cash or other properties in exchange for good sold or services rendered*. Definisi ini menjelaskan bahwa pendapatan (*revenue*) diartikan sebagai aliran masuk kas atau setara kasnya yang terjadi akibat adanya penjualan barang atau penyerahan jasa yang dihasilkan.⁶ Eldon S. Hendriksen mendefinisikan “Pendapatan adalah ekspresi moneter dari keseluruhan produk atau jasa yang ditransfer oleh suatu perusahaan kepada pelanggannya selama satu periode”.⁷ Maksudnya, pendapatan diukur berdasarkan jumlah barang dan jasa yang diserahkan kepada pembeli atau langganan. Jadi pendapatan merupakan aliran keluarnya (*out flow*) nilai atas barang atau jasa yang ditransfer kepada langganannya.

Zaki Baridwan menyebutkan pendapatan (*revenue*) adalah aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha atau pelunasan utangnya (kombinasi keduanya) selama satu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha”.⁸

⁶ Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield, *Akuntansi Intermediate, Edisi 12*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 164

⁷ Hendriksen, *Teori Akuntansi*, (Terjemahan Marianus Sinaga), Jilid 1, (Jakarta: Erlangga, 1982), h. 164

⁸ Baridwan, Zaki. *Intermediate Accounting*. Edisi 7. (Yogyakarta: BPFYogyakarta.1992), h. 30

Menurut Smith and Skousen kenaikan (*inflows*) dari aktiva yang berasal dari operasi (kegiatan) normal perusahaan. Definisi ini terdapat pembatasan yang jelas mengenai sumberdana yang dapat digolongkan sebagai *revenue* dan sumberdana yang tidak dapat digolongkan sebagai *revenue*.⁹

Vernon Kam, menyebutkan *Revenue are inflows or other enhancements of assets of or entity or settlements of as liabilities goods, rendering service, or other activities that's constituted the entity's or going mayor or central operation*".¹⁰ Pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwa *revenue* (pendapatan) merupakan arus masuk atau peningkatan nilai asset dari suatu *entity* atau penjelasan kemajuan dari *entity* atau gabungan keduanya selama periode tertentu yang berasal dari penyerahan/produksi barang, pembelian jasa atau pelaksanaan kegiatan kerja utama perusahaan yang saling berjalan.

Adapun definisi pendapatan yang dikemukakan oleh APB dalam Wolk. Dkk. Bahwa *revenue*/pendapatan merupakan kenaikan *bruto* dalam asset dan penurunan *bruto* dalam kewajiban berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum yang berasal dari kegiatan mencari laba.

Selanjutnya accounting terminology No.2 dalam Sofyan S. Harahap mendefinisikan bahwa, pendapatan berasal dari penjualan dan pembelian jasa diukur

⁹ Jay M. Smith dan K. Fred, Skousen, *Akuntansi Intermediate*, (Jakarta: Erlangga, 1996), h. 15

¹⁰ Kam, Vernon, *Accounting Theori*, 2nd edition, (New York: John Wiley & Sons. Inc, 1990), h. 237

dengan jumlah yang dibebankan kepada langganan, klaim atas barang jasa yang disampaikan untuk mereka, juga termasuk laba dari investasi dalam kenaikan lainnya pada equity pemilik modal kecuali yang berasal dari penyesuaian modal.

Penjelasan mengenai pendapatan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK No. 23 paragraf 06 adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

Dari berbagai definisi yang dikemukakan di atas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan mengenai *Revenue*/pendapatan sebagai berikut; 1) *Revenue*/pendapatan diperoleh melalui hasil penjualan barang dagang atau jasa yang diserahkan kepada pembeli dan dapat pula diperoleh dari penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak lain; 2) *Revenue* dalam pembebanannya kepada pembeli atau langganan harus diukur dengan mata uang tertentu. *Revenue* memiliki sifat menambah atau menaikkan kekayaan, tetapi tidak semua yang menambah atau menaikkan nilai kekayaan pemilik dapat dikategorikan sebagai *revenue* misalnya yang berasal dari kontribusi.

C. Rolin Niswonger dan Carl S. Waren, pendapatan adalah kenaikan kotor (*gross*) dalam modal pemilik yang dihasilkan dari penjualan barang dagangan, pelaksanaan jasa kepada pelanggan atau klien, penyewaan harta, peminjaman uang dan semua kegiatan usaha

serta profesi yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan.¹¹ Maksudnya pendapatan dapat dihasilkan melalui berbagai kegiatan usaha baik yang berasal dari usaha perdagangan, jasa maupun profesi yang berpengaruh terhadap peningkatan kotor (*laba bruto*). Dan pendapatan atau penghasilan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan.

Dari beberapa konsep di atas, dapat disimpulkan pendapatan adalah keseluruhan penerimaan dan penghasilan dari semua kegiatan usaha selama satu periode tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian tingkat pendapatan suatu keluarga sangat berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan kehidupan keluarga termasuk kebutuhan mendapatkan pendidikan kepada anak. Tidak jarang ditemui adanya anak-anak yang putus sekolah disebabkan oleh rendahnya pendapatan yang dihasilkan oleh keluarga, sehingga sulit untuk memenuhi tuntutan perlengkapan peralatan kebutuhan pendidikan pada proses pembelajaran di sekolah/madrasah.

2. Keluarga.

Lingkungan keluarga memiliki peran penting dalam mewujudkan kepribadian anak. Peran keluarga dalam mewujudkan kepribadian seseorang, baik lingkungan pra kelahiran maupun pasca kelahiran adalah masalah yang tidak bisa dipungkiri khususnya keluarga. Keluarga adalah sebuah basis awal kehidupan bagi setiap manusia.

¹¹ C. Rolin Niswonger dan Carl S. Waren dan Philip E. Fess, *Prinsip-Prinsip Akuntansi*, (Terjemahan), Alih Bahasa: Alfonsus Sirait, Jilid 1. Edisi 16, (Jakarta: Erlangga, 1992), h. 57

Pentingnya pengaruh keluarga dalam pendidikan anak dalam beberapa masalah seperti budaya, emosional dan sebagainya. Keluarga menyiapkan sarana pertumbuhan dan pembentukan kepribadian anak sejak dini. Dengan kata lain kepribadian anak tergantung pada pemikiran dan perlakuan keluarga dan lingkungan.

Sesuai Tirtahadja menyebutkan bahwa lingkungan keluarga mempunyai andil dalam perkembangan anaknya. Seperti; kebudayaan, tingkat kemakmuran, keadaan perumahan dan keseluruhan situasi dan kondisi keluarga.¹²

Muri Yusuf menyebutkan keluarga adalah merupakan kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang paling kecil, sebagai suatu kesatuan maka ikatan didasarkan atas perkawinan dimana tiap-tiap anggota mengabdikan dirinya kepada kepentingan dan tujuan keluarga dengan kasih sayang dan penuh tanggungjawab.¹³

Dengan demikian keluarga meliputi; ayah, ibu dan anak-anaknya. Keluarga ini juga sering disebut dengan keluarga inti. Tetapi karena adanya istiadat yang berbeda serta kebiasaan dari berbagai daerah maka keluarga inti itu bukanlah satu-satunya ikatan sosial yang paling kecil, sering dihubungkan dengan family. Dalam hal ini sering disebut dengan keluarga besar, karena dalam konteks ini mencakup: ayah, ibu, anak-anak, adik, kakak, saudara, orang tua pihak suami dan orang tua pihak istri, kakek pihak suami dan istri,

¹² Tirtahadja, Umar, 2004, Pengantar Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h.

¹³ Muri Yusuf, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 25-26

secara umum dapat dikatakan bahwa keluarga besar ini meliputi semua anggota yang mempunyai pertalian darah dengan pasangan suami istri tersebut.

Menurut Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati menyebutkan keluarga adalah bentuk masyarakat kecil yang terdiri dari beberapa individu yang terikat oleh suatu keturunan, yakni kesatuan antara ayah, ibu dan anak yang merupakan kesatuan kecil dari bentuk-bentuk kesatuan masyarakat.¹⁴

Menurut Ahmadi Keluarga adalah sebagai unit terkecil dalam masyarakat terbentuk berdasarkan suka rela dan cinta yang asasi antara dua subyek manusia (suami istri), berdasarkan asas cinta yang asasi ini lahirlah anak sebagai generasi penerus.¹⁵ Wadah utama dan agen pertama pensosialisasian budaya di setiap lapisan masyarakat. Keluarga juga sebagai media pertama yang memancarkan budaya kepada anak-anak sebab keluarga adalah dunia yang pertama kali menyentuh kehidupan anak-anak, keluarga merupakan dunia inspirasi bagi anak-anak. Anggota keluarga termasuk anak kecil mendapatkan pelajaran berbagai hal yang ada dalam keluarga, tanpa disadari bahwa apa yang terjadi dalam keluarga memberikan pengaruh sangat besar bagi kehidupan mereka, Ayah dan ibu sebagai orang dewasa dalam keluarga berperan sangat penting dalam membuat sistem dalam keluarga, ia membuat aturan disiplin, mentransmit nilai-nilai baik positif ataupun negatif kepada anak, sehingga akan

¹⁴ Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, loc. Cit., h. 177

¹⁵ Ahmadi Abu, 1991, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 177

membentuk perilaku anak sebagai anggota keluarga.

Menurut Azyumardi menyebutkan bahwa keluarga sebagai lembaga pendidikan mempunyai peranan penting dalam membentuk generasi muda, keluarga disebut sebagai lembaga informal. Pendidikan informal adalah kegiatan pendidikan yang tidak diorganisasikan secara struktural dan tidak mengenal penjenjangan, kronologis menurut tingkatan maupun tingkatan keterampilan dan pengetahuan.¹⁶

Keluarga sebagai lingkungan pertama bagi individu, tempat ia berinteraksi, dari interaksi selanjutnya individu memperoleh unsur dari ciri dasar bagi pembentukan kepribadiannya melalui akhlak, nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan dan emosi untuk ditampakkan dalam sikap hidup dan tingkah laku.¹⁷

Kebanyakan anak yang berprestasi di sekolah sampai lulus studi hingga bekerja disebabkan lingkungan keluarga yang baik yang dapat mendorong anak-anak mencapai keberhasilan, sedangkan anak-anak yang prestasi belajar di sekolahnya kurang baik bahkan *drop out* dari sekolah lebih besar dikarenakan lingkungan keluarga, maka sesungguhnya keluarga mempunyai tanggung jawab dan peranan yang sangat besar dalam melahirkan dan membentuk generasi yang baik dan berkualitas.

Peran keluarga sebagai faktor pelaksana dalam mewujudkan nilai, keyakinan dan persepsi budaya

¹⁶ Azra, Azyumardi, *Esai-esai Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998)

¹⁷ Langgunlung, Hasan, *Manusia dan Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta

sebuah masyarakat. Faktor genetic dan lingkungan secara terpisah atau dengan sendirinya tidak bisa menentukan pendidikan tanpa adanya yang lainnya, tetapi masing-masing saling memiliki andil dalam pembentukan pendidikan dan kepribadian seseorang sehingga jika salah satunya tidak banyak dipergunakan maka yang lain harus dipertekankan lebih keras. Kedua orang tua memiliki tugas yang di hadapkan anaknya seperti mereka harus memenuhi kebutuhan anaknya. Anak pada awal masa kehidupannya memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Dengan dipenuhi kebutuhan mereka, maka orang tua menghasilkan anak yang riang dan gembira serta tidak malas dalam proses pendidikan.

Untuk mewujudkan kepribadian anak, konsekuensinya kedua orang tua harus memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan masalah psikologi dan tahapan perubahan dan pertumbuhan anak. Dengan demikian kedua orang tua dalam menghadapi anaknya baik dalam berfikir atau memberi hukuman, bersikap sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan. Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa ada hubungan erat antara keluarga dan sekolah. Pendidikan dalam keluarga merupakan dasar pada pendidikan disekolah.

Beriyamin S. Bloom (1976) menyatakan bahwa lingkungan keluarga dan faktor-faktor luar sekolah yang telah secara luas berpengaruh terhadap siswa. Siswa-siswa hidup di kelas pada suatu sekolah relatif singkat, sebagian besar waktunya dipergunakan siswa untuk bertempat tinggal di rumah. Keluarga telah mengajarkan

anak berbahasa, kemampuan untuk belajar dari orang dewasa dan beberapa kualitas dan kebutuhan berprestasi, kebiasaan bekerja dan perhatian terhadap tugas yang merupakan dasar terhadap pekerjaan di sekolah.

Dari uraian ini dapat diketahui lebih lanjut bahwa kecakapan dan kebiasaan di rumah merupakan dasar bagi studi anak di sekolah. Suasana keluarga yang bahagia mempengaruhi masa depan anak, baik di sekolah maupun di masyarakat, dalam lingkungan pekerjaan maupun dalam lingkungan keluarga kelak (Sikun Pribadi; 1981, 67). Dengan demikian bahwa suasana dalam keluarga dapat mempengaruhi pendidikan anak di sekolah.

Menurut Erikson yang dikutip oleh Sikun Pribadi, bahwa pendidikan dalam keluarga yang berpengaruh terhadap kehidupan anak di masa datang ditentukan oleh; 1) Rasa aman, 2) Rasa otonomi, dan 3) Rasa inisiatif.

Rasa aman merupakan periode perkembangan pertama dalam perkembangan anak. Perasaan aman perlu diciptakan, sehingga anak merasakan hidupnya aman dalam kehidupan keluarga. Rasa aman yang tertanam ini menimbulkan dari dalam diri anak suatu kepercayaan pada diri sendiri. Anak yang gagal mengembangkan rasa percaya diri ini menimbulkan suatu kegelisahan hidup, ia merasa tidak disayangi dan tidak mampu menyayangi.

Fase perkembangan kedua adalah rasa otonomi (*sense of autonomy*) yang terjadi pada waktu anak

berumur 2 sampai 3 tahun. Orang tua harus membimbing anak dengan bijaksana agar anak dapat mengembangkan kesadaran, bahwa ia pribadi yang berharga, yang dapat berdiri sendiri dan dengan caranya sendiri ia dapat memecahkan persoalan yang dihadapi. Kegagalan pembentukan rasa otonomi, suatu sikap percaya pada diri sendiri dan dapat berdiri sendiri menyebabkan anak selalu tergantung hidupnya pada orang lain. Setelah memasuki bangku sekolah selalu harus dikawal oleh orang tuanya. Sehingga tidak percaya diri untuk menghadapi persoalan yang dihadapi di sekolah.

Pada fase perkembangan ketiga disebut perkembangan rasa inisiatif (*sense of initiative*) yaitu pada umur 4 sampai 6 tahun. Anak harus dibiasakan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam lingkungan keluarga. Sebab dengan dibiasakan menangani masalah hidupnya maka anak mengembangkan inisiasipnya dan daya kreatifnya dalam rangka menghadapi tantangan hidupnya. Jika orang tua selalu membantu dan bahkan melarang anaknya untuk mengerjakan sesuatu hal maka inisiatif dan daya kreasi anak lemah dan dapat mempengaruhi hidup anak dalam belajar di sekolah.

Dalam keluarga, baik keluarga inti maupun keluarga besar yang sangat penting untuk dipahami, bahwa ayah merupakan penganggungjawab keluarga, ia harus memenuhi segala kebutuhan hidup, membiayai semua keperluan hidup, memberi perlindungan kepada semua anggota keluarga, membantu semua anggota keluarga untuk mampu mengembangkan kepribadiannya sesuai

pola tingkah laku masing-masing. Ibu adalah orang pertama dimata anaknya, ini bukan berarti fungsi ayah menjadi sekunder. Ayah primer untuk kelangsungan hidup keluarga, tetapi ibu adalah orang yang pertama dikenal oleh anak-anaknya.

Terkait hal tersebut, keterbatasan daya persepsi anak-anak pada taraf pengembangannya, mengakibatkan anak pada permulaan itu belum memahami dunia luar yang lebih jauh, selain ibunya sendiri. Keterlibatan ibu yang sangat banyak terhadap anak pada tahap permulaan, menyebabkan ibu dikatakan pendidik yang utama. Hal inipun diikuti pula oleh tugas ayah yang sangat banyak dalam rangka memenuhi kebutuhan dan tuntutan keluarga, sehingga menyebabkan lebih banyak pula tidak berkomunikasi dengan anak-anaknya. Seorang ayah yang baik, betapapun sibuknya pekerjaan selalu menyisihkan waktunya untuk membimbing anak-anaknya.

3. Dampak pendapatan keluarga dan kesempatan Mendapatkan Pendidikan

Keluarga merupakan faktor pendukung sangat penting bagi perkembangan pendidikan anak, karena dalam lingkungan keluarga anak menghabiskan waktu dalam masa perkembangannya, lingkungan keluarga merupakan sebuah basis awal kehidupan bagi setiap manusia. Pentingnya pengaruh keluarga dalam pendidikan anak seperti; budaya, norma, emosional dan kepribadian. Keluarga menyiapkan sarana pertumbuhan dan pembentukan kepribadian anak sejak awal permulaan kehidupan. Pengaruh keluarga di rumah

berkaitan pula dengan ekonomi dan pendapatan keluarga yang memadai, anak lebih berkesempatan mendapatkan kesempatan mendapatkan fasilitas belajar yang lebih baik, mulai dari peralatan sampai pemilihan tempat belajar. Dengan demikian semakin tinggi pendapatan keluarga maka semakin tinggi mendapatkan kesempatan mendapatkan pendidikan dan sebaliknya semakin rendah pendapatan keluarga maka rendah pula mendapatkan fasilitas belajar dan peralatan pembelajaran.

Beriyamin S. Bloom menyatakan bahwa lingkungan keluarga dan faktor luar sekolah yang telah secara luas berpengaruh terhadap siswa. Menurut hasil penelitian Levine dan Hagighurst menunjukkan bahwa anak yang tingkat kondisi IQ rendah dari suatu rumah yatim piatu dengan kondisi yang menyedihkan sebagian kemudian diasuh dalam rumah yatim piatu yang kondisinya baik dengan penyelenggaraan program-program perawatan yang baik. Setelah satu tahun anak dari dua lingkungan yatim piatu tersebut di tes intelegensi. Dari hasil tes intelegensi tersebut diperoleh hasil bahwa IQ anak dipelihara dalam rumah yatim piatu dalam kondisi yang menyedihkan, IQ-nya tetap bahkan ada yang menurun. Sedangkan anak yang diasuh dalam kondisi rumah yatim piatu yang baik IQ-nya naik. Setelah belajar di sekolah anak-anak yang diasuh dalam kondisi yang baik, berhasil memperoleh ijazah pendidikan tinggi.

Menurut Hasil penelitian Rollins dan Thomas yang di laporkan oleh Lewin dan Havighurst menunjukkan bahwa; 1) Makin besar dukungan orang tua, makin

tinggi tingkat perkembangan kognitif anak; 2) Makin kuat pemaksaan yang diberikan oleh orang tua, makin rendah perkembangan kognitif anak; 3) Makin besar dukungan orang tua, makin tinggi kemampuan sosial dan kemampuan instrumental anak; 4) Makin kuat tingkat pemaksaan yang diberikan orang tua terhadap anak-anaknya, maka makin rendah kemampuan sosialnya; 5) Bagi anak perempuan besarnya dukungan dan frekuensi usaha pengawasan orang tua berkorelasi negatif terhadap pencapaian prestasi akademik; dan 6) Bagi anak laki-laki besarnya dukungan orang tua dan kuatnya pengawasan orang tua berkorelasi positif terhadap pencapaian prestasi belajar.

Menurut hasil penelitian Luis M. Laosa dan Irving Sigel menunjukkan bahwa hubungan orang tua dengan keberhasilan belajar anak. Prestasi belajar anak dipengaruhi oleh hubungan akrab antara ibu dan anak. Seperti mengajak berbincang-bincang anaknya, memberikan hiburan kepada anaknya, memberi pujian, pertolongan, keterangan-keterangan tentang bekerjasama dengan orang lain serta mengembangkan kegiatan. Dan hubungan tersebut dilandasi oleh rasa kasih sayang.

Menurut John Simmons dan Leigh Alexander latar belakang keluarga biasanya berkaitan dengan status sosial ekonomi keluarga, status sosial ekonomi biasanya mempergunakan indikator pendidikan keluarga, pekerjaan dan pendapatan keluarga.

Pendapatan keluarga erat hubungannya dengan pendidikan anak, anak yang sedang belajar selain harus

terpenuhi kebutuhan pokoknya seperti makan, minum, pakaian, perlindungan kesehatan, juga membutuhkan fasilitas belajar seperti ruang belajar, meja, kursi, penerangan, alat tulis menulis, buku-buku dan lainnya, fasilitas belajar ini hanya dapat terpenuhi jika keluarga mempunyai pendapatan yang cukup dan mempunyai banyak uang. Jika anak hidup dalam keluarga miskin, kebutuhan pokok anak kurang terpenuhi, maka berakibat belajar anak terganggu, bahkan mungkin anak-anak harus membantu orang tuanya mencari nafkah, walaupun sebenarnya anak belum saatnya bekerja.

Menurut Karsidi untuk keluarga yang berpenghasilan kecil, hasil dari pekerjaannya hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk keluarga yang berpenghasilan menengah hasil dari pekerjaannya lebih terarah kepada pemenuhan kebutuhan pokok yang layak seperti; makan, pakaian, perumahan, pendidikan dan lain-lain. Sedangkan untuk keluarga berpenghasilan yang tinggi dan berkecukupan mereka memenuhi segala keinginan yang mereka inginkan termasuk keinginan untuk menyekolahkan anak mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Menurut Schultz dalam Soenarya menyebutkan pembiayaan yang dialokasikan untuk pendidikan tidak semata-mata bersifat konsumtif, tetapi lebih merupakan suatu investasi dalam rangka meningkatkan kapasitas tenaga kerja untuk menghasilkan barang dan jasa. Pendidikan di sekolah merupakan salah satu bagian investasi dalam rangka meningkatkan kemampuan

sumber daya manusia.

Menurut Mulyanto golongan yang berpenghasilan kecil adalah golongan yang memperoleh pendapatan sebagai imbalan terhadap kerja mereka yang jumlahnya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan pokoknya. Jadi tidak mungkin memenuhi kebutuhan lain jika kebutuhan pokok sulit dipenuhi.

Terkait dengan hal tersebut J.b.a.f. Mayor Polat mengungkapkan gagasannya pendapatan keluarga yang berupa gaji atau upah sang suami diganti dengan pendapatan keluarga.¹⁸ Di lain pihak, peran pendapatan suatu keluarga sangat menentukan bagi kelangsungan pendidikan anak-anaknya karena untuk memperoleh pendidikan terutama pendidikan formal, mutlak memerlukan biaya.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dampak tingkat pendapatan keluarga terhadap pendidikan anak. Anak dengan pendapatan/ penghasilan keluarga yang besar/tinggi mempunyai kesempatan lebih besar/ tinggi untuk mendapatkan pendidikan. Sedangkan bagi anak dengan tingkat pendapatan/ penghasilan keluarga rendah/ kecil maka kesempatan anak mendapatkan pendidikan relatif kecil atau sempit.

B. Jenis Pendapatan

Menurut Robert T. Kiyosaki membahas 3 jenis pendapatan pada keuangan keluarga.

1. Pendapatan Aktif (*earning income*)

Pendapatan aktif adalah pendapatan yang

¹⁸J.b.a.f. Mayor, Ibid., h. 337

dihasilkan karena Kita bekerja secara aktif. Contoh pendapatan aktif pada seorang karyawan: gaji, bonus, tunjangan. Contoh pendapatan aktif pada seorang profesional atau pemilik usaha: keuntungan penjualan. Kebanyakan orang belum memanfaatkan secara maksimal 3 jenis pendapatan. Pendapatan aktif umumnya terkena pajak yang cukup mahal. Saat ini tarif pajak untuk karyawan adalah progresif sesuai dengan perhitungan pendapatan kena pajak. Pajak untuk pemilik bisnis adalah 1% dari omset.

2. Pendapatan Portofolio (*Portofolio income* atau *paper asset income*)

Pendapatan kedua adalah pendapatan portofolio. Pendapatan portofolio dilakukan jika Kita berinvestasi pada produk-produk keuangan, misal reksadana, saham, obligasi. Pendapatan portofolio ini untuk beberapa produk memiliki pajak yang lebih rendah dibanding pendapatan aktif.

3. Pendapatan Pasif

Pendapatan pasif adalah pendapatan yang dihasilkan dari sebuah sistem yang bekerja menghasilkan uang. Contoh pendapatan pasif adalah: royalti dari menulis buku, membuat aplikasi dan rekaman.

Menurut Aliminsyah, dkk. Dalam buku Kamus Istilah Akuntansi mendefinisikan pendapatan sebagai berikut; 1) Arus kekayaan dalam bentuk tunai, piutang atau aktiva lain yang masuk ke dalam perusahaan atau menurunnya kewajiban sebagai akibat penjualan barang

atau penyerahan jasa; 2) Jumlah yang dibebankan kepada langganan untuk barang dan jasa yang dijual. Pendapatan dapat juga didefinisikan sebagai kenaikan bruto dalam modal (biasanya melalui diterimanya suatu aktiva dari langganan) yang berasal dari barang dan jasa yang dijual.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan adalah suatu aliran kas masuk atau kenaikan lain aktiva yang berasal dari penjualan barang atau jasa yang merupakan kegiatan atau aktivitas utama perusahaan. Pendapatan juga mengandung makna yang luas dimana dalam pendapatan termasuk pula pendapatan bunga, sewa, laba, pendapatan aktiva lain-lain. Sehingga penyajian pendapatan dalam laporan keuangan dipisahkan antara pendapatan operasional dengan pendapatan di luar pendapatan operasional. Dasar yang digunakan untuk mengukur besarnya pendapatan adalah dengan menggunakan nilai tukar (*exchange value*) dari barang atau jasa yang ditukar dengan *cash equivalent* atau *present value* dari tagihan-tagihan yang diharapkan dapat diterima.

Aliminsyah dkk. Membagikan pendapatan kedalam beberapa jenis, sebagai berikut; 1) Pendapatan bersih (*disposable income*) adalah pendapatan seseorang sesudah dikurangi pajak langsung; 2) Pendapatan diterima di muka (*unearned revenues*) adalah uang muka untuk pendapatan yang belum dihasilkan; 3) Pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang berasal dari sumber-sumber diluar kegiatan utama perusahaan,

tidak termasuk dalam pendapatan operasi, misalnya pendapatan bunga, pendapatan sewa, pendapatan deviden dan laba penjualan aktiva tetap; 4) Pendapatan permanen (*permanent income*) adalah pendapatan rata-rata yang diharapkan rumah tangga konsumsi selama hidupnya; 5) Pendapatan uang (*money income*) adalah pendapatan rumah tangga konsumsi atau rumah tangga produksi dalam bentuk suatu kesatuan moneter; 6) Pendapatan usaha (*operating revenue*) adalah pendapatan yang berasal dari kegiatan utama perusahaan; dan 7) Pendapatan yang diterima di muka (*unearned revenue or income*); a. Pendapatan (atau penghasilan) yang diterima di muka tetapi belum diakui sebagai pendapatan (dicatat sebagai utang pendapatan) pada saat penerimaannya dan baru diakui sebagai pendapatan manakala perusahaan telah menyelesaikan kewajibannya berupa pengiriman barang atau penyerahan jasa kepada pihak yang bersangkutan pada waktu mendatang. *Unearned revenue* dapat diakui secara bertahap sesuai dengan penyelesaian kewajiban oleh perusahaan; *deferred revenue*. Disebut juga dengan pos-pos transitoris pasif; b. (pajak) pendapatan dari sumber-sumber selain jasa-jasa pribadi; 8) Pendapatan yang masih harus diterima (*accrued revenues or accrued receivable*) adalah pendapatan yang sudah dihasilkan (*earned*) walaupun piutang yang bersangkutan belum jatuh tempo (belum saatnya ditagih).

Berdasarkan PSAK No. 23, pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode

bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fee*), bunga, dividen, royalti dan sewa.

Jenis pendapatan (*Revenue*) dibedakan atas: 1) Pendapatan Total (*Total Revenue/TR*) $Total\ Revenue/TR$ adalah jumlah/ kuantitas barang yang terjual, dikalikan dengan harga satuan. Semakin banyak yang terjual semakin besar penerimaan total ($TR = P \times Q$). Pada pasar persaingan sempurna, TR merupakan garis lurus dari titik origin, karena harga yang terjadi dipasar bagi mereka merupakan suatu yang datum (tidak bisa dipengaruhi), maka penerimaan mereka naik sebanding (Proporsional) dengan jumlah barang yang dijual. Pada pasar persaingan tidak sempurna, TR merupakan garis melengkung dari titik origin, karena masing perusahaan dapat menentukan sendiri harga barang yang dijualnya, dimana mula-mula TR naik sangat cepat, (akibat pengaruh monopoli) pada titik tertentu mulai menurun (akibat pengaruh persaingan dan substansi); 2) Pendapatan Rata-rata (*Average Revenue/ AR*) $Average\ Revenue/ AR$ adalah pendapatan rata-rata yang diperoleh dari total penerimaan dibagi dengan jumlah barang yang dijual ($AR = TR/Q$). Penerimaan rata-rata (*Avarage Total revenue: AR*), yaitu rata-rata penerimaan dari per kesatuan produk yang dijual atau yang dihasilkan, yang diperoleh dengan jalan membagi hasil total penerimaan dengan jumlah satuan

barang yang dijual, malah satuan barang yang dijual; 3) Pendapatan Marjinal (*Marginal Revenue / MR*) *Marginal Revenue/ MR* adalah tambahan penerimaan karena adanya tambahan penjualan dari setiap satuan hasil produksi. Penerimaan Marginal (*Marginal Revenue: MR*), yaitu penambahan penerimaan atas TR sebagai akibat penambahan satu unit output. Dalam pasar persaingan sempurna MR ini adalah konstan dan sama dengan harga (P) dan berimpit dengan kurva AR atau kurva permintaan, bentuk kurvanya horizontal.

C. Fungsi Pendapatan

Fungsi pendapatan keluarga sangat banyak, diantaranya untuk pengeluaran konsumsi. Sesuai Sicut dan Arndt menyebutkan pengeluaran konsumsi pertamanya ditentukan oleh tingkat pendapatan, tetapi banyak lagi faktor lain yang mempengaruhi tingkat konsumsi yaitu jumlah anggota keluarga, tingkat usia mereka dan faktor-faktor lainnya seperti harga-harga nisbi berbagai jenis barang konsumsi juga berarti penting sebagai penentu.¹⁹

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan komponen tunggal terbesar dari pengeluaran keseluruhan aktual, tetapi ada yang menentukan jumlah yang ingin dibelanjakan oleh rumah tangga untuk membeli barang dan jasa untuk konsumsinya dan berapa banyak yang ingin mereka tabung, salah satu faktor yang paling menentukan adalah pendapatan sisa rumah tangga. Dengan meningkatnya pendapatan

¹⁹ Sicut, G dan Arndt, H. *Ilmu Ekonomi*. (Jakarta: LP3es, 1991)

sisanya, rumah tangga mempunyai lebih banyak uang untuk dibelanjakan sebagai konsumsi. Penelitian empiris tentang perubahan pendapatan sisa dari tahun ke tahun dan konsumsi untuk suatu periode selama sepuluh tahun telah menemukan hubungan yang erat antara keduanya. Umumnya, tahun dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi biasanya juga merupakan tahun-tahun dengan tingkat konsumsi yang lebih tinggi daripada rata-rata²⁰.

Pengeluaran konsumsi atau *private consumption expenditure* meliputi semua pengeluaran rumah tangga keluarga dan perseorangan serta lembaga-lembaga swasta bukan perusahaan untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa yang langsung dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pembelian barang-barang tahan lama yang baru seperti mobil, pesawat televisi dan sebagainya selain bangunan rumah termasuk variable ekonomi pengeluaran konsumsi.²¹

Keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi pertumbuhan anak dan perkembangannya. Menurut Resolusi Majelis Umum PBB, fungsi utama keluarga adalah sebagai wahana untuk mendidik, mengasuh dan mengsosialisasikan anak, mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya di masyarakat dengan baik, serta memberikan kepuasan pribadi dan lingkungan yang sehat guna tercapainya keluarga sejahtera. Dalam keluarga harus diefektifkan

²⁰ Lipsey, R dan Steiner, P., *Pengantar Ilmu Ekonomi*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)

²¹ Soediyono. *Pengantar Analisa Pendapatan Nasional*. (Yogyakarta: Liberty, 1984).

fungsi departemen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. Tanamkan dalam diri mereka kejujuran, semangat, keinginan untuk menjadi yang terbaik, dan menguasai kemampuan-kemampuan dasar. Jangan tidak atau gagal, karena jika demikian maka sulit sekali bagi institusi lain untuk memperbaiki kegagalannya. Karena kegagalan keluarga dalam membentuk karakter anak berakibat pada tumbuhnya anak atau masyarakat yang berkarakter buruk atau tidak berkarakter. Oleh karena itu setiap keluarga harus memiliki kesadaran bahwa karakter bangsa sangat tergantung pada pendidikan karakter anak dirumah. Upah dan gaji yang biasa disebut dalam istilah asing *wages and salaries* merupakan pendapatan yang diperoleh rumah tangga keluarga sebagai imbalan terhadap penggunaan jasa sumber tenaga kerja yang mereka gunakan dalam pembentukan produk nasional.²²

Pendapatan merupakan pengeluaran. Pendapatan yang dicapai dalam jangka waktu tertentu senantiasa sama dengan pengeluaran jangka waktu tersebut. Pendapatan senantiasa harus sama dengan pengeluaran karena kedua istilah ini menunjukkan hal yang sama hanya dipandang dari sudut pandang lain.²³

Makin tinggi pendapatan perseorangan makin sedikit anggota masyarakat yang memilikinya, yang terbanyak menempati ruangan pendapatan yang rendah. Besarnya pendapatan perseorangan tergantung pada besarnya bantuan produktif dari orang atau faktor yang

²² Soediyono. *Pengantar Analisa Pendapatan Nasional*. (Yogyakarta: Liberty 1984)

²³ Winardi, E. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. (Bandung: Tarsito, 1975)

bersangkutan dalam proses produksi.²⁴

Perbedaan dalam tingkat pendapatan adalah disebabkan oleh adanya perbedaan dalam bakat, kepribadian, pendidikan, latihan dan pengalaman. Ketidaksamaan dalam tingkat pendapatan yang disebabkan oleh perbedaan hal-hal ini biasanya dikurangi melalui tindakan-tindakan pemerintah yaitu melalui bantuan pendidikan seperti beasiswa dan pemberian bantuan kesehatan. Tindakan-tindakan pemerintah ini cenderung menyamakan pendapatan riil. Pendapatan uang adalah upah yang diterima dalam bentuk rupiah dan sen. Pendapatan riil adalah upah yang diterima dalam bentuk barang/jasa, yaitu dalam bentuk apa dan berapa banyak yang dapat dibeli dengan pendapatan uang itu. Yang termasuk pendapatan riil adalah keuntungan-keuntungan tertentu seperti jaminan pekerjaan, harapan untuk memperoleh pendapatan tambahan, bantuan pengangkutan, makan siang, harga diri yang dikaitkan dengan pekerjaan, perumahan, pengobatan dan fasilitas lainnya.²⁵ Besarnya pendapatan perseorangan tergantung pada besarnya bantuan produktif dari orang atau faktor yang bersangkutan dalam proses produksi.²⁶

D. Peran Pendapatan Keluarga Pada Proses Pendidikan.

Proses pendidikan membentuk sosok individu sebagai sumber daya manusia yang berperan besar dalam

²⁴ Kaslan, Tohir A. *Ekonomi Selayang Pandang*. (Bandung: Sumur Bandung, 1962)

²⁵ Muchtar, Sofyan. 1986. *Prinsip-Prinsip Ekonomi*. (Jakarta: Danau Singkarak, 1986)

²⁶ Kaslan, Tohir A. *Ekonomi Selayang Pandang*. (Bandung: Sumur Bandung, 1962)

proses pembangunan bangsa dan negara. Oleh karena itu peran pendidikan sangat penting sebab pendidikan merupakan kunci utama untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.²⁷ Terkait dengan peran yang sangat penting itulah, maka penyelenggara pendidikan oleh lembaga pendidikan perlu benar-benar mendapat perhatian dan penanganan yang serius dari semua pihak demi optimalisasi pencapaian tujuan yang diinginkan, yaitu untuk mecerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.²⁸

Tujuan pendidikan nasional merupakan tujuan ideal yang dalam proses upaya pencapaiannya dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan. Oleh karena itu, setiap institusional dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional telah menetapkan tujuan antara sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikannya. *Out put* pendidikan dimasa datang, diharapkan dapat memandang manusia bukan sebagai pekerja tetapi sebagai mitra kerja dengan keunggulan yang berbeda. Dengan demikian, seorang *leader* yang keluar dari persaingan global, harus

²⁷ Sintong Silaban (ed.). *Pendidikan Indonesia Dalam Pandangan Lima Belas Tokoh Pendidikan Swasta*, Bagian IV, (Jakarta: Dasamedia Utama, 1993), h., 65

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 4

dapat memandang manusia sebagai manusia, bukan pekerja.²⁹ Hal ini berdasarkan satu asumsi bahwa proses pendidikan merupakan sebuah proses yang dengan sengaja dilaksanakan semata-mata bertujuan untuk mencerdaskan bangsa baik oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama sangat menyadari tentang kenyataan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, seperti salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan. Khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang merata. Sebagian sekolah/madrasah, terutama di kota-kota, menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun sebagian lainnya masih memprihatinkan.³⁰

Kondisi pendidikan tersebut di atas, jika dihubungkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdul Manan Akhmad mengenai: Proyeksi Pergeseran Mutu SMU Tahun 1999/2000 – 2003/2004, dengan indikator pengukuran berdasarkan Nilai Ebtanas Murni, menyimpulkan bahwa: Menjelang berakhirnya Repelita VI masih banyak jumlah SMU yang rata-rata NEM-nya

²⁹ Ridono Aidad, *Harapan dan Partisipasi masyarakat terhadap peningkatan kualitas pendidikan*, Makalah seminar : *School and Base Education*, 2000, h. 6

³⁰ Departemen Pendidikan Nasional. 2000. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, h. 3

tergolong dalam klasifikasi sangat kurang dan kurang. Ini menjadi pertanda masih adanya kesenjangan antara mutu yang hendak dicapai dengan mutu yang dapat dicapai.³¹

Kondisi ini merupakan keprihatinan sekaligus sebagai tantangan yang harus dijawab oleh semua pihak. Winarno Surakhmad menyebutkan rendahnya mutu pendidikan saat ini adalah bertolak dari asumsi yang salah, bahwa pendidikan tidak maju-maju, bahkan mengalami *setback*, bukan satu, tetapi beberapa langkah mundur. Hari ini dihadapi sejumlah bukti bahwa pendidikan kita umumnya, hasil pelajaran semakin merosot mutunya. Bahkan pendidikan kita berada dalam alur yang buntu dan kebuntuan ini adalah musuh dari kemajuan; tidak ada pendidikan yang buntu yang dapat menghasilkan kemajuan.³² Terkait keterpurukan mutu pendidikan di Indonesia, memang tidak habis-habisnya, tetapi yang lebih penting cara mengatasinya.

Konfrensi yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 23-24 Februari 1999 melahirkan beberapa rangkuman diskusi dalam hubungannya dengan persoalan pendidikan di Indonesia antara lain mengenai perlunya pemahaman dan pengkajian tentang visi, misi dan tujuan pendidikan nasional.³³

³¹ Abdul Manan Akhmad. 1999. *Proyeksi Pergeseran Mutu Sekolah Menengah Umum Tahun 1999/2000-2004/2004*, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun ke-5, No. 020, Badan Peneliti dan Pengembangan, Depdiknas, Jakarta, h. 105

³² Winarno Surakhmad, "Guru dan Mutu", Majalah Pendidikan Koridor, Edisi 3, Depdiknas Propinsi Jawa barat, Bandung, h., 43

³³ A. Azis Wahab. 1993. *Pokok-pokok Pikiran Tentang Model Alternatif Implementasi Pendidikan Dalam Rangka Desentralisasi dan Otonomi*

Ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata; 1) Kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan *education production function* atau *input-output analysis* yang tidak dilaksanakan secara konsekuen; 2) Penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara sentralistik, sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi; 3) Peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim.³⁴

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, langkah yang diambil sebagai satu kebijakan adalah melakukan reorientasi penyelenggaraan pendidikan yaitu dari manajemen peningkatan mutu berbasis pusat menuju manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Konsep ini mengandalkan pemberian otonomi yang luas kepada sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan. Partisipasi aktif masyarakat dalam pendidikan dikembalikan kepada kebutuhan pemerintah, masyarakat dan keluarga.

Partisipasi keluarga merupakan faktor pendukung terpenting bagi perkembangan kecerdasan anak. Keluarga merupakan lingkungan anak menghabiskan waktu dalam masa perkembangan. Pengaruh keluarga ini berkaitan pula dengan masalah pendapatan keluarga. Dengan pendapatan keluarga yang memadai anak lebih berkesempatan mendapatkan fasilitas belajar

Daerah” Proyek Peningkatan MutuSMU Jawa Barat, h., 3

³⁴ Depdiknas. 2000. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*

yang lebih baik. Mulai dari alat tulis hingga pemilihan sekolah dan sebaliknya dengan tingkat pendapatan yang kurang memadai anak juga kurang mendapatkan fasilitas belajar yang baik dan nutrisi yang baik pula. Tidak hanya itu, biasanya pihak sekolah (pendidikan) tidak memberi keringanan biaya untuk orang miskin atau berpenghasilan rendah. Jadi orang yang tingkat pendapatannya kurang biasanya mendapat tekanan untuk memenuhi semua kebutuhan anak yang semakin hari semakin berat untuk dipenuhi. Itulah sebabnya keluarga merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan anak. Pada saat ini, semakin banyak keluarga yang tingkat pendapatannya rendah makin terlindas. Seharusnya pemerintah, pemerintah daerah, sekolah/ madrasah harus memikirkan cara untuk memberi kesempatan bagi orang miskin untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

BAB IV

PENTINGNYA PENDIDIKAN DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROSES PELAKSANAANNYA

A. Pentingnya Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan dalam perkembangannya. Imam Suprayogo menyebutkan pendidikan sangat penting dalam kehidupan ini.¹ Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak

¹ Imam Suprayogo, *Pengembangan Pendidikan Karakter*, (Malang: UIN –Maliki Press, 2013), hal. 26, 27

mulia serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.² Selanjutnya Imam Suprayogo menambahkan pendidikan merupakan kegiatan mengubah watak, perilaku atau karakter para siswa.³

Muhammad Kamil menunjukkan beberapa Hadist Nabi Muhammad SAW tentang pentingnya pendidikan yaitu; 1) pada hari kiamat, tinta para ulama ditimbang dengan darah para syuhada; 2) barangsiapa yang menelusuri sebuah jalan demi mencari ilmu pengetahuan, jalannya akan dimudahkan menuju surga; 3) sepatut kata tentang ilmu yang didengar seseorang lebih baik dari pada beribadah setahun penuh dan duduk sejenak demi menyimak pengetahuan lebih baik daripada membebaskan budak; 4) menuntut ilmu pengetahuan adalah kewajiban setiap muslim dan muslimah; 5) ilmuan adalah pewaris para Nabi; 6) orang pandai adalah kepercayaan Allah SWT di muka bumi, kelak pada hari kiamat, terdapat tiga katagori pemberi syafaat yaitu para Nabi, orang pandai dan orang-orang yang mati syahid; 7) menghadiri majelis orang alim lebih utama dari pada shalat seribu rakaat.⁴

Selanjutnya Imam Suprayogo menyebutkan pintu kemajuan dan kemenangan dalam pentas dunia ini adalah ilmu pendidikan. Kekalahan kaum muslimin yang dirasakan selama ini diawali dari kekalahan dalam

² UU Nomor 20 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*

³ Imam Suprayogo, *Idid.*, hal. 38

⁴ Muhammad Kamil Hasan Al-Mmahami, *Al-Mausu'ah Al Qur'aniyah, (Ensiklopedia Al Qur'an) Jilid 4*, (Jakarta: Al Maktab Al 'Alamiy, Lith-Thiba'ati Wan Nasyri, 2012), hal. 146, 147, 149

menggali dan unggul ilmu pengetahuan.⁵ Dengan demikian seseorang yang berpendidikan tentu berbeda dengan seseorang yang tidak berpendidikan dari segi bersikap, bertutur kata, berfikir dan menjaga emosi.

Pentingnya pendidikan ditinjau dari manfaat pendidikan sebagai berikut; 1) Memberikan ilmu pengetahuan, pemahaman dan pengalaman adalah untuk memberikan informasi, meningkatkan ilmu pengetahuan yang selalu berkembang dan memberikan pengalaman untuk bekal dalam menjalani pekerjaan dengan baik; 2) Mengembangkan talenta adalah sarana untuk mencari dan mengembangkan talenta yang sudah Tuhan anugerahkan pada setiap individu; 3) Membentuk dan memperbaiki pola pikir karena seiring bertambahnya informasi, ilmu pengetahuan dan pengalaman tentunya akan berpengaruh dalam peningkatan cara berfikir, kemampuan menganalisa dan daya imajinasi; 4) Memberikan taraf kehidupan yang baik dengan mengenyam pendidikan maka kemampuan dalam bekerjapun didapat dan dapat terus berkembang hal ini akan memberikan kesempatan kerja dan penghasilan yang baik; 5) Membangun bangsa karena individu yang mengenyam pendidikan mendapatkan kepribadian yang terbentuk dengan baik, kemampuan dan ilmu pengetahuan yang bertambah, kesempatan kerja dan kesempatan mendapatkan penghasilan yang baik membantu menciptakan generasi yang baik.⁶

⁵ Imam Suprayogo, *Ibid.*, hal. 107

⁶ <http://gurupkn.com/pentingnya-pendidikan-bagi-manusia> diakses Rabu, 5 April 2017

Kaitan dengan pentingnya pendidikan keluarga, Zakiyah Daradjat menyebutkan pendidikan keluarga terjadi pada umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal tolak dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari pengetahuan yang mendidik, melainkan karena secara kodrati suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak.⁷

Daradjat menambahkan keluarga bertanggung jawab atas pendidikan anaknya sebagai berikut: 1) Memelihara dan membesarkan anak, maksudnya bentuk yang paling sederhana dari setiap tanggung jawab orang tua dan ini merupakan dorongan alami untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya; 2) Melindungi dan menjamin kesamaan, baik jasmaniah maupun rohaniah, dari berbagai gangguan penyakit dan dari penyelewengan kehidupan dari tujuan hidup yang sesuai dengan falsafah hidup dan agama yang dianutnya; 3) Memberi pengajaran, sehingga anak memperoleh kesempatan untuk memiliki pengetahuan dan kecakapan seluas dan setinggi mungkin untuk dicapai; 4) Membahagiakan anak, baik dunia maupun akhirat, sesuai dengan pandangan dan tujuan hidup muslim.⁸

Demikian pentingnya pendidikan keluarga dalam membentuk masa depan anak-anak, sesuai Langgulgung

⁷ Daradjat, Zakiyah, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992)

⁸ Daradjat, *Ibid.*, h. 67

keluarga menjadi ukuran kuat tidaknya suatu masyarakat dalam menjaga nilai-nilai kebudayaan yang dipindahkan melalui pendidikan di dalamnya.⁹ Dan keluarga memiliki tanggungjawab dalam proses pendidikan seperti mengajar dan menuntut ilmu bagi masa depan anak-anaknya, karena laki-laki dan perempuan sama dalam hal menuntut ilmu, jadi perempuan diwajibkan melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diwajibkan kepada laki-laki.¹⁰ Sesuai Kementerian Agama RI, mengajarkan/ menuntut ilmu adalah salah satu bentuk ibadah yang bernilai tinggi dan harus dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah sepanjang hidupnya.¹¹ Mengingat pentingnya pendidikan maka keluarga bertanggungjawab terhadap masa depan pendidikan anak-anaknya. Karena pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Maju tidaknya seseorang ditentukan oleh pendidikannya. Maju tidaknya suatu Negara dipengaruhi oleh pendidikan, sehingga suatu bangsa dapat diukur maju atau mundurnya melalui pendidikan. Mengingat pendidikan diawali dari keluarga, maka proses mencetak sumber daya manusia yang berkualitas baik dari segi spiritual, intelegensi

⁹ Langgulung, Hasan, *Manusia dan Pendidikan*, (Jakarta: Husna Zikra), h. 77

¹⁰ Khairiah, *Hak Mendapatkan Ilmu dan Pengajaran, Perspektif Gender, Bunga Rampai Islam dan Gender*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 204, 205

¹¹ Kementerian Agama RI., *Kedudukan dan Peran Perempuan , Tafsir Al Qur'an Tematik, Edisi yang Disempurnakan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI, 2012), hal. 93

maupun skill dipengaruhi oleh keluarga. Dan keluarga mempengaruhi kesempatan anak mendapatkan pendidikan.

Dengan demikian pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan individu, baik sebagai makhluk individual maupun sebagai makhluk sosial. Tiap individu tumbuh dan berkembang, cepat atau lambat tergantung pada lingkungannya, karena di setiap aktifitas yang dijalani oleh manusia ada pendidikan yang didapat dan bisa menjadikan manusia itu lebih dituntut untuk berfikir dan mencari suatu jalan yang bisa membuat hidupnya nyaman, tenang dan bahagia. Manusia diciptakan memang untuk menjadi seorang pencari pendidikan dan seorang pemberi pendidikan, manusia menjadi seorang pencari pendidikan, jika dia merasa butuh untuk mengetahui yang belum diketahui dan manusia menjadi pemberi jika manusia bisa memberikan pemahaman untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain.

Sesuai Muhyiddin, pendidikan dan kehidupan terus berjalan seiring dengan berkembangnya manusia dan terus saling melengkapi sampai terhentinya semua kejadian, yang membuat pendidikan dan kehidupan itu ada yaitu umur yang menjadi pengukur kehidupan dan pendidikan manusia.¹² Dengan demikian pendidikan tidak saja penting secara individual, tetapi juga penting bagi proses pembangunan berbangsa dan bernegara, negara yang sedang membangun seperti Indonesia

¹² Muhyiddin, http://www.kompasiana.com/aamuhyiddin/pendidikan-dan-kehidupan_551a195b813311f57d9de0b5 diakses hari jumat, 20 Januari 2007

sangat mengharapkan proses pendidikan, sehingga mencapai hasil yang optimal, terkait ketertinggalannya dibidang pembangunan nasional dan era globalisasi yang penuh tantangan, maka Indonesia masih sangat membutuhkan sumber daya manusia terdidik dan berkualitas.

Ridono Aidad menyebutkan pada era globalisasi, lembaga pendidikan harus dapat mencetak pemimpin-pemimpin yang tangguh dan berkualitas. Pemimpin masa depan harus dapat mengubah pola pikir dalam menyelesaikan permasalahan dengan kekuatan manusia (*manpower*) menjadi pola pikir kekuatan otak (*mindpower*). Konsep pendidikan juga harus dapat menghasilkan *out put* lembaga pendidikan yang dapat menciptakan *corporate culture*, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku masa itu dan pada gilirannya tumbuh kreativitas dan inisiatif, sehingga munculah peluang baru (*new opportunity*). *Out put* pendidikan dimasa datang juga diharapkan dapat memandang manusia bukan sebagai pekerja tetapi sebagai mitra kerja dengan keunggulan yang berbeda. Seorang *leader* yang keluar dari persaingan global, harus dapat memandang manusia sebagai manusia, bukan pekerja.¹³

Dengan demikian berdasarkan satu asumsi bahwa proses pendidikan merupakan sebuah kegiatan yang dengan sengaja dilaksanakan bertujuan untuk mencerdaskan bangsa. Melalui proses jenjang pendidikan

¹³ Ridono Aidad, *Harapan dan Partisipasi masyarakat terhadap peningkatan kualitas pendidikan*, Makalah seminar : *School and Base Education*, 2000, h. 6

terbentuk sosok individu sumber daya manusia yang berperan besar dalam proses pembangunan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu peran pendidikan sangat penting sebab pendidikan merupakan kunci utama untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.¹⁴ Dengan sebuah harapan maju dalam pendidikan, sejahtera dalam ekonomi dan hidup dalam berperadaban.

B. Faktor yang Mempengaruhi Proses Pelaksanaan Pendidikan.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi proses pelaksanaan pendidikan diantaranya dukungan keluarga, pemerintah dan masyarakat. Karena tanggung jawab pendidikan ada pada keluarga, pemerintah dan masyarakat.

Khusus dukungan keluarga seperti tingkat pendidikan keluarga, semakin tinggi tingkat pendidikan keluarga, maka pemahaman tentang pentingnya pendidikan semakin tinggi, sehingga semakin tinggi upaya mencari kesempatan anaknya untuk mendapatkan pendidikan dan upaya menyekolahkan anaknya menjadi tinggi.

a. Tingkat Pendidikan Keluarga

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dikatakan bahwa pendidikan melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan, dan peranannya di masa yang akan

¹⁴ Sintong Silaban (ed.). *Pendidikan Indonesia Dalam Pandangan Lima Belas Tokoh Pendidikan Swasta*, Bagian IV, (Jakarta: Dasamedia Utama, 1993), h., 65

datang.¹⁵ Menurut Ngalim Purwanto keberhasilan proses pendidikan dicerminkan dari perolehan prestasi yang optimal. Keberhasilan proses pendidikan dicerminkan dari perolehan prestasi sekolah yang optimal.¹⁶ Untuk mewujudkan keberhasilan atau prestasi pendidikan, pada tahap proses pelaksanaan pendidikan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya dukungan keluarga seperti tingkat pendidikan keluarga.

Pendidikan merupakan kebutuhan hidup yang harus dimiliki jika ingin hidup sejahtera dan bahagia. Dalam rangka mewujudkan manusia yang berkualitas, sejahtera dan bahagia, maka pendidikan memegang peran yang sangat penting. Peran tersebut dapat tercapai jika diselenggarakan secara terencana, sengaja, terarah dan sistematis. Keluarga memegang peran sebagai pendidik untuk memberikan pendidikan kepada anak. Keluarga merupakan tempat untuk mendapatkan pendidikan. Keluarga berkewajiban memberikan konsep-konsep pengetahuan, keterampilan dan sikap kepada anak.

Penanaman konsep dan proses pendidikan, diantaranya keluarga harus menyadari bahwa kebutuhan pendidikan merupakan kebutuhan anak untuk bekal hidupnya. Keluarga dalam mempersiapkan bekal hidup anaknya dengan mendidik, dalam proses pendidikan anaknya, orang tua dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman yang didapat dari pendidikan

¹⁵ Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional

¹⁶ Ngalim Purwanto. M. *Psikologi Pendidikan*. (Bandung: Remadja Rosdakarya, 2002)

yang diterimanya.

Tingkat pendidikan keluarga mempengaruhi proses pelaksanaan pendidikan melalui keluarga memahami tentang pentingnya pendidikan dengan benar, sehingga melahirkan kesadaran orang tua dalam usaha memenuhi kebutuhan anak dalam proses pendidikan serta menanamkan sikap dan nilai hidup kepada anak. Dengan tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang dapat melahirkan kesadaran pada tugas dan kewajibannya, sehingga kewajiban keluarga yang harus diperhatikan adalah pemenuhan kebutuhan keluarga, khususnya pendidikan anaknya.

Tingkat pendidikan keluarga disini adalah pendidikan formal yang ditempuh keluarga, sehingga melahirkan upaya memasukkan anaknya kepada jalur pendidikan.

Menurut Ihsan, jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.¹⁷

Menurut Rahmanto (2010) tingkat pendidikan keluarga ditentukan berdasarkan pendidikan terakhir yang ditempuh keluarga seperti SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, PT/PTKN. Orang yang tingkat pendidikannya tinggi, mempunyai wawasan jauh ke depan tentang pendidikan anaknya, dibandingkan dengan keluarga yang berpendidikan rendah. Pendidikan keluarga juga berpengaruh pada gagasan dan

¹⁷ Ihsan, Fuad. *Dasar-Dasar Kependidikan*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h.16

kemampuan berfikirnya. Keluarga berpendidikan tinggi cenderung mempunyai ide atau pikiran yang tinggi terhadap pentingnya pendidikan bagi anaknya, demikian sebaliknya keluarga yang berpendidikan rendah cenderung kurang termotivasi untuk mendapatkan kesempatan pendidikan untuk anaknya.

Pendidikan terakhir keluarga dapat mempengaruhi tingkat pendidikan anak untuk melanjutkan ke tingkat sekolah yang lebih tinggi. Pendidikan keluarga mempengaruhi persepsi keluarga terhadap pentingnya menyekolahkan anaknya. Pendidikan merupakan investasi masa depan yang penting bagi anak. Menurut Bahar (1989) keterlibatan orang tua dalam mendorong anaknya dalam pendidikan tergantung pada tingkat pendidikan keluarga. Dengan demikian tingkat pendidikan keluarga mempengaruhi terhadap kesempatan anak mendapatkan pendidikan. Semakin tinggi pendidikan keluarga, maka semakin tinggi keputusannya untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang setinggi mungkin.

b. Tingkat Pendapatan Keluarga

Pada hakikatnya manusia itu sama di hadapan Tuhan yang Maha Esa, namun dalam kenyataannya setiap manusia senantiasa mempunyai status, kedudukan, fungsi dan peran. Penelitian Lorenzia menunjukkan bahwa proporsi pendapatan, persepsi pendidikan dan jumlah tanggungan keluarga berpengaruh positif terhadap tingkat pendidikan anak. Maka dalam kajian penelitian ada beberapa faktor yang dapat menentukan tinggi rendahnya kondisi sosial

seseorang di masyarakat, seperti tingkat pendidikan, tingkat pendapatan orang tua yang berpartisipasi dalam aktivitas kelompok dan komunitasnya.

Menurut Prayitno pendapatan adalah segala penghasilan baik berupa uang atau barang yang diterima sebagai balas jasa atau prestasi.¹⁸ Menurut Kantor Statistik Bengkulu bahwa pendapatan yang diterima tidak hanya berupa uang, penghasilan yang diterima biasanya sebagai balas jasa, sumber utama, gaji atau upah.¹⁹ Besarnya pendapatan yang diterima dalam suatu rumah tangga dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Jika jumlah anak banyak, maka ikut menghambat pendewasaan anak seoptimal mungkin.²⁰

Tingkat pendapatan keluarga menurut Sumardi suatu penerimaan atau penghasilan yang berasal dari sektor formal, informal dan penerimaan yang bukan merupakan pendapatan. Tingkat pendapatan keluarga merupakan salah satu kondisi dari aspek keluarga yang berpengaruh besar terhadap motivasi.²¹ Sehingga memotivasi siswa untuk mampu menunjang prestasi sekolah. Khususnya pemberian bekal pendidikan dan pengetahuan kepada siswa yang dapat mengarah pada penciptaan lapangan kerja sendiri, sekaligus diharapkan dapat meningkatkan taraf hidupnya.

¹⁸ **Elida Prayitno**, *Panduan pengajar buku motivasi dalam belajar*, (Jakarta: Proyek Pengembangan LPTK, 1989)

¹⁹ Kantor Statistik Propinsi Bengkulu, *Penduduk Usia Tunggal Propinsi Bengkulu*, Bengkulu: 1990

²⁰ Pranowo, *STATISTIK*, (Yogyakarta : Penerbit Ananda, 1982), h. 15

²¹ Sumardi Surya Brata. 1991. *Metode Penelitian*. Jakarta: CV. Rajawali, h. 94

Sedangkan kondisi tingkat pendapatan keluarga adalah hasil yang diterima seseorang berupa penghasilan atau penerimaan dalam melakukan aktivitas atau kegiatan dalam pekerjaannya, sehingga mendorong memenuhi kebutuhan khususnya kebutuhan pendidikan anaknya.

Tingkat pendapatan keluarga merupakan salah satu kondisi yang berpengaruh besar terhadap motivasi. Tingkat pendapatan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti kemampuan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi (dilihat dari pengeluaran keluarga). Kemampuan dalam memenuhi kebutuhan *human capital* atau kemampuan menjangkau pendidikan dasar dilihat dari tingkat pendidikan formal yang ditamatkan, kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan *security capital* atau kemampuan menjangkau perlindungan dasar (dilihat dari kepemilikan tempat tinggal).

Menurut Badan Pusat Statistik tingkat pendapatan adalah jumlah penerimaan berupa uang atau barang yang dihasilkan oleh segenap orang yang merupakan balas jasa untuk faktor-faktor produksi. Ada 3 (tiga) sumber penerimaan keluarga; 1) Pendapatan dari gaji dan upah yaitu balas jasa terhadap kesediaan orang menjadi tenaga kerja; 2) Pendapatan dari asset produktif yaitu asset yang memberikan pemasukan atas balas jasa penggunaannya; 3) Pendapatan dari pemerintah atau penerimaan transfer adalah pendapatan yang diterima bukan sebagai balas jasa atau input yang di berikan.

Pendapatan terbagi 3 (tiga) yaitu; 1) Pendapatan pokok, artinya pendapatan yang tiap bulan diharapkan diterima, pendapatan ini diperoleh dari pekerjaan

utama yang bersifat rutin; 2) Pendapatan sampingan maksudnya pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan di luar pekerjaan pokok, maka tidak semua orang mempunyai pendapatan sampingan; 3) Pendapatan lain-lain maksudnya pendapatan yang berasal dari pemberian pihak lain, baik bentuk barang maupun bentuk uang, pendapatan bukan dari usaha.

Menurut Sumardi dan Evers, pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa barang maupun uang baik dari pihak lain maupun dari hasil sendiri, dengan jalan dinilai sejumlah uang atau harga yang berlaku saat itu.²²

Menurut Sayuti kemakmuran masyarakat saling berpengaruh oleh besarnya pendapatan dan konsumsi dari masyarakat sendiri, pendapatan yang rendah dapat menyebabkan masyarakat dibawah garis kemiskinan. Kemakmuran suatu keluarga ditentukan oleh pendapatan keluarga.²³ Pendapatan keluarga merupakan pendapatan yang terdiri dari upah atau gaji, tambahan-tambahan dari pekerjaan sambilan seperti pekerjaan dan kerajinan wanita dan anak-anak dan hadiah-hadiah kaum keluarga lainnya, serta jasa para anggota keluarga berupa mencuci pakaian, membersihkan rumah, memelihara pekarangan, memperbaiki kerusakan rumah, jika anggota keluarga harus diam atau makan di luar rumah, maka mempertinggi pengeluaran. Dengan demikian tingkat pendapatan

²² Sunardi, M. dan H.D. Evers. *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), h. 20

²³ Sayuti, Jamil. *Pengantar Ekonomi Makro*. (Jakarta: Proyek Perkembangan Penelitian, 1989), h. 16

keluarga sangat mempengaruhi kesempatan mendapatkan pendidikan.

C. Faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan

1. Rendahnya Kualitas Sarana Fisik

Menurut PP nomor 32 tahun 2013 standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.²⁴ Selain kemampuan, guru juga sangat membutuhkan sarana prasarana pembelajaran dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Semakin lengkap sarana pembelajaran yang dimiliki sebuah sekolah/madrasah maka memudahkan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik. Begitu juga dengan suasana pembelajaran harus dikembangkan agar dapat menunjang proses belajar mengajar.

2. Rendahnya Kualitas Guru

Kondisi kualitas guru di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU No 20/2003 yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran,

²⁴ PP nomor 32 tahun 2013 standar sarana dan prasarana, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013

melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat. Menurut E. Mulyana kualitas kinerja guru lemah dalam melaksanakan tugas utamanya mengajar yaitu; rendahnya pemahaman tentang strategi pembelajaran, kurangnya kemahiran dalam mengelola kelas, rendahnya kemampuan melakukan dan memanfaatkan penelitian tindakan kelas, rendahnya motivasi berprestasi, kurangnya disiplin, kurangnya komitmen profesi dan rendahnya kemampuan manajemen waktu.²⁵

Nur Syam menyebutkan bahwa dalam memberikan pelayanan pembelajaran, banyak madrasah menunjukkan kualitas kinerja guru masih rendah dan harus segera ditingkatkan. Ditambahkan Nur Syam guru kita kurang atau belum berkualitas, padahal mereka sudah sarjana pendidikan, yang seharusnya sudah memiliki pengetahuan dan kemampuan tentang pendidikan dan bahkan juga sudah mengajar dalam rentang waktu yang cukup memadai, akan tetapi pada kenyataannya bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang profesionalisme guru seperti itu keberadaannya yaitu hasil Uji Kompetensi Awal (UKA) tahun 2012 hanya 42,22.²⁶

Supardi menyebutkan kenyataan guru saat ini, *pertama*, guru tidak layak yang boleh dikategorikan *unqualified* maupun *underqualified*, artinya guru tersebut belum memiliki kualifikasi mengajar seperti yang telah ditentukan oleh perundangan yang berlaku,

²⁵ E. Mulyana, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h.9

²⁶ Nur Syam, *Dari Bilik Birokrasi, Esai Agama, Pendidikan dan Birokrasi*, Kementerian Agama, (Jakarta, 2014), hh.197-198

kedua, guru layak tapi salah profesi (*mismatch*), artinya latar belakang pendidikannya tidak sesuai.²⁷ Bahrul Hayat, banyaknya guru madrasah (25%) mengajar tidak pada bidangnya (*mis-mate*) dan banyak guru madrasah (terutama guru Non PNS) yang menjadikan tugasnya sebagai pekerjaan sampingan karena sebagai guru di madrasah tidak mencukupi pemenuhan kebutuhan hidupnya.²⁸

Kendati secara kuantitas jumlah guru di Indonesia cukup memadai, namun secara kualitas mutu guru di negara ini, pada umumnya masih rendah. Secara umum, para guru di Indonesia kurang bisa memerankan fungsinya dengan optimal, karena pemerintah masih kurang memperhatikan mereka, khususnya dalam upaya meningkatkan profesionalismenya. Secara kuantitatif, sebenarnya jumlah guru di Indonesia relatif tidak terlalu buruk. Apabila dilihat ratio guru dengan siswa, angka-angkanya cukup bagus yakni di SD 1:22, SLTP 1:16, dan SMU/SMK 1:12. Meskipun demikian, dalam hal distribusi guru ternyata banyak mengandung kelemahan yakni pada satu sisi ada daerah atau sekolah yang kelebihan jumlah guru, dan di sisi lain ada daerah atau sekolah yang kekurangan guru. Dalam banyak kasus, ada SD yang jumlah gurunya hanya tiga hingga empat orang, sehingga mereka harus mengajar kelas secara paralel dan simultan.

Jika diukur dari persyaratan akademis, baik menyangkut pendidikan minimal maupun kesesuaian

²⁷ Supardi, *Kinerja Guru*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2014), h. 17

²⁸ Bahrul Hayat, *Kumpulan Pidato, sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013), h.199

bidang studi dengan pelajaran yang harus diberikan kepada anak didik, ternyata banyak guru yang tidak memenuhi kualitas mengajar (*under quality*). Hal itu dapat dibuktikan dengan masih banyaknya guru yang belum sarjana, namun mengajar di SMU/SMK, serta banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka miliki. Keadaan seperti ini menimpa lebih dari separoh guru di Indonesia, baik di SD, SLTP dan SMU/SMK. Artinya lebih dari 50 persen guru SD, SLTP dan SMU/SMK di Indonesia sebenarnya tidak memenuhi kelayakan mengajar. Dengan kondisi dan situasi seperti itu, diharapkan pendidikan yang berlangsung di sekolah harus secara seimbang dapat mencerdaskan kehidupan anak dan harus menanamkan budi pekerti kepada anak didik. “Sangat kurang tepat bila sekolah hanya mengembangkan kecerdasan anak didik, namun mengabaikan penanaman budi pekerti kepada para siswanya.

Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan tetapi, pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi, sebagai cermin kualitas, tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Kualitas guru dan pengajar yang rendah juga dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru.

3. Rendahnya Kesejahteraan Guru

Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Dengan pendapatan yang rendah, terang

saja banyak guru terpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Ada yang mengajar lagi di sekolah lain, memberi les pada sore hari, menjadi tukang ojek, pedagang mie rebus, pedagang buku/LKS, pedagang pulsa ponsel dan sebagainya.

Dengan adanya UU Guru dan Dosen, barangkali kesejahteraan guru dan dosen (PNS) agak lumayan. Pasal 10 UU itu sudah memberikan jaminan kelayakan hidup. Di dalam pasal itu disebutkan guru dan dosen mendapat penghasilan yang pantas dan memadai, antara lain meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan profesi, dan/atau tunjangan khusus serta penghasilan lain yang berkaitan dengan tugasnya. Mereka yang diangkat pemkot/pemkab bagi daerah khusus juga berhak atas rumah dinas.

Tapi, kesenjangan kesejahteraan guru swasta dan negeri menjadi masalah lain yang muncul. Di lingkungan pendidikan swasta, masalah kesejahteraan masih sulit mencapai taraf ideal. Diberitakan Pikiran Rakyat 9 Januari 2006, sebanyak 70 persen dari 403 PTS di Jawa Barat dan Banten tidak sanggup untuk menyesuaikan kesejahteraan dosen sesuai dengan amanat UU Guru dan Dosen.

4. Rendahnya Prestasi Siswa

Dengan keadaan yang demikian itu (rendahnya sarana fisik, kualitas guru, dan kesejahteraan guru) pencapaian prestasi siswa pun menjadi tidak memuaskan. Sebagai misal pencapaian prestasi fisika dan matematika siswa Indonesia di dunia internasional sangat rendah. Menurut Trends in Mathematic and

Science Study (TIMSS) 2003 (2004), siswa Indonesia hanya berada di ranking ke-35 dari 44 negara dalam hal prestasi matematika dan di ranking ke-37 dari 44 negara dalam hal prestasi sains. Dalam hal ini prestasi siswa kita jauh di bawah siswa Malaysia dan Singapura sebagai negara tetangga yang terdekat.

Dalam hal prestasi, 15 September 2004 lalu United Nations for Development Programme (UNDP) juga telah mengumumkan hasil studi tentang kualitas manusia secara serentak di seluruh dunia melalui laporannya yang berjudul Human Development Report 2004. Di dalam laporan tahunan ini Indonesia hanya menduduki posisi ke-111 dari 177 negara. Apabila dibanding dengan negara-negara tetangga saja, posisi Indonesia berada jauh di bawahnya.

Dalam skala internasional, menurut Laporan Bank Dunia (Greaney,1992), studi IEA (Internasional Association for the Evaluation of Educational Achievement) di Asia Timur menunjukkan bahwa keterampilan membaca siswa kelas IV SD berada pada peringkat terendah. Rata-rata skor tes membaca untuk siswa SD: 75,5 (Hongkong), 74,0 (Singapura), 65,1 (Thailand), 52,6 (Filipina), dan 51,7 (Indonesia).

Anak-anak Indonesia ternyata hanya mampu menguasai 30% dari materi bacaan dan ternyata mereka sulit sekali menjawab soal-soal berbentuk uraian yang memerlukan penalaran. Hal ini mungkin karena mereka sangat terbiasa menghafal dan mengerjakan soal pilihan ganda.

Selain itu, hasil studi The Third International

Mathematic and Science Study-Repeat-TIMSS-R, 1999 (IEA, 1999) memperlihatkan bahwa, diantara 38 negara peserta, prestasi siswa SLTP kelas 2 Indonesia berada pada urutan ke-32 untuk IPA, ke-34 untuk Matematika. Dalam dunia pendidikan tinggi menurut majalah Asia Week dari 77 universitas yang disurvei di asia pasifik ternyata 4 universitas terbaik di Indonesia hanya mampu menempati peringkat ke-61, ke-68, ke-73 dan ke-75.

5. Kurangnya Pemerataan Kesempatan Pendidikan

Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat Sekolah Dasar. Data Balitbang Departemen Pendidikan Nasional dan Direktorat Jenderal Binbaga Departemen Agama tahun 2000 menunjukkan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk anak usia SD pada tahun 1999 mencapai 94,4% (28,3 juta siswa). Pencapaian APM ini termasuk kategori tinggi. Angka Partisipasi Murni Pendidikan di SLTP masih rendah yaitu 54, 8% (9,4 juta siswa). Sementara itu layanan pendidikan usia dini masih sangat terbatas. Kegagalan pembinaan dalam usia dini nantinya tentu akan menghambat pengembangan sumber daya manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan dan strategi pemerataan pendidikan yang tepat untuk mengatasi masalah ketidakmerataan tersebut.

6. Rendahnya Relevansi Pendidikan dengan Kebutuhan

Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang menganggur. Data BAPPENAS (1996) yang dikumpulkan sejak tahun 1990 menunjukkan angka

pengangguran terbuka yang dihadapi oleh lulusan SMU sebesar 25,47%, Diploma/S0 sebesar 27,5% dan PT sebesar 36,6%, sedangkan pada periode yang sama pertumbuhan kesempatan kerja cukup tinggi untuk masing-masing tingkat pendidikan yaitu 13,4%, 14,21%, dan 15,07%. Menurut data Balitbang Depdiknas 1999, setiap tahunnya sekitar 3 juta anak putus sekolah dan tidak memiliki keterampilan hidup sehingga menimbulkan masalah ketenagakerjaan tersendiri. Adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini disebabkan kurikulum yang materinya kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja.

7. Mahalnya Biaya Pendidikan

Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Orang miskin tidak boleh sekolah.

Untuk masuk TK dan SDN saja saat ini dibutuhkan biaya Rp 500.000, sampai Rp 1.000.000. Bahkan ada yang memungut di atas Rp 1 juta. Masuk SLTP/SLTA bisa mencapai Rp 1 juta sampai Rp 5 juta. Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). MBS di Indonesia

pada realitanya lebih dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana. Karena itu, Komite Sekolah/Dewan Pendidikan yang merupakan organ MBS selalu disyaratkan adanya unsur pengusaha.

Asumsinya, pengusaha memiliki akses atas modal yang lebih luas. Hasilnya, setelah Komite Sekolah terbentuk, segala pungutan uang selalu berkedok, sesuai keputusan Komite Sekolah. Namun, pada tingkat implementasinya, tidak transparan, karena yang dipilih menjadi pengurus dan anggota Komite Sekolah adalah orang-orang dekat dengan Kepala Sekolah. Akibatnya, Komite Sekolah hanya menjadi legitimator kebijakan Kepala Sekolah dan MBS pun hanya menjadi legitimasi dari pelepasan tanggung jawab negara terhadap permasalahan pendidikan rakyatnya.

Kondisi ini lebih buruk dengan adanya RUU tentang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP). Berubahnya status pendidikan dari milik publik ke bentuk Badan Hukum jelas memiliki konsekuensi ekonomis dan politis amat besar. Dengan perubahan status itu Pemerintah secara mudah dapat melemparkan tanggung jawabnya atas pendidikan warganya kepada pemilik badan hukum yang sosoknya tidak jelas. Perguruan Tinggi Negeri pun berubah menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Munculnya BHMN dan MBS adalah beberapa contoh kebijakan pendidikan yang kontroversial. BHMN sendiri berdampak pada melambungnya biaya pendidikan di beberapa Perguruan Tinggi favorit.

Privatisasi atau semakin melemahnya peran negara dalam sektor pelayanan publik tak lepas dari tekanan

utang dan kebijakan untuk memastikan pembayaran utang. Utang luar negeri Indonesia sebesar 35-40 persen dari APBN setiap tahunnya merupakan faktor pendorong privatisasi pendidikan. Akibatnya, sektor yang menyerap pendanaan besar seperti pendidikan menjadi korban. Dana pendidikan terpotong hingga tinggal 8 persen (Kompas, 10/5/2005).

Dari APBN 2005 hanya 5,82% yang dialokasikan untuk pendidikan. Bandingkan dengan dana untuk membayar hutang yang menguras 25% belanja dalam APBN (www.kau.or.id). Rencana Pemerintah memprivatisasi pendidikan dilegitimasi melalui sejumlah peraturan, seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, RUU Badan Hukum Pendidikan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pendidikan Dasar dan Menengah, dan RPP tentang Wajib Belajar. Penguatan pada privatisasi pendidikan itu, misalnya, terlihat dalam Pasal 53 (1) UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dalam pasal itu disebutkan, penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.

Seperti halnya perusahaan, sekolah dibebaskan mencari modal untuk diinvestasikan dalam operasional pendidikan. Koordinator LSM Education Network for Justice (ENJ), Yanti Mukhtar (Republika, 10/5/2005) menilai bahwa dengan privatisasi pendidikan berarti Pemerintah telah melegitimasi komersialisasi pendidikan dengan menyerahkan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan ke pasar. Dengan begitu, nantinya sekolah

memiliki otonomi untuk menentukan sendiri biaya penyelenggaraan pendidikan. Sekolah tentu saja mematok biaya setinggi-tingginya untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu. Akibatnya, akses rakyat yang kurang mampu untuk menikmati pendidikan berkualitas terbatas dan masyarakat semakin terkotak-kotak berdasarkan status sosial, antara yang kaya dan miskin.

Hal senada dituturkan pengamat ekonomi Revrisond Bawsir. Menurutnya, privatisasi pendidikan merupakan agenda Kapitalisme global yang telah dirancang sejak lama oleh negara-negara donor lewat Bank Dunia. Melalui Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP), Pemerintah berencana memprivatisasi pendidikan. Semua satuan pendidikan kelak menjadi badan hukum pendidikan (BHP) yang wajib mencari sumber dananya sendiri. Hal ini berlaku untuk seluruh sekolah negeri, dari SD hingga perguruan tinggi.

Bagi masyarakat tertentu, beberapa PTN yang sekarang berubah status menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) itu menjadi momok. Jika alasannya bahwa pendidikan bermutu itu harus mahal, maka argumen ini hanya berlaku di Indonesia. Di Jerman, Prancis, Belanda dan di beberapa negara berkembang lainnya, banyak perguruan tinggi yang bermutu namun biaya pendidikannya rendah. Bahkan beberapa negara ada yang menggratiskan biaya pendidikan.

Pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah, atau tepatnya, tidak harus murah atau gratis.

Tetapi persoalannya siapa yang seharusnya mem-bayarnya? Pemerintahlah sebenarnya yang berkewajiban untuk menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan dan menjamin akses masyarakat bawah untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Akan tetapi, kenyataannya Pemerintah justru ingin berkilah dari tanggung jawab. Padahal keterbatasan dana tidak dapat dijadikan alasan bagi pemerintah untuk cuci tangan.

D. Permasalahan Pendidikan

Sebelum kita membahas mengenai permasalahan pendidikan di Indonesia, sebaiknya kita melihat definisi dari pendidikan itu sendiri terlebih dahulu. Ki Hajar Dewantara, sebagai Tokoh Pendidikan Nasional Indonesia, peletak dasar yang kuat pendidikan nasional yang progresif untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang merumuskan pengertian pendidikan sebagai berikut; Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelektual dan tubuh anak); dalam Taman Siswa tidak boleh dipisahkan bagian-bagian itu agar supaya kita memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan, kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik, selaras dengan dunianya.²⁹ Dari etimologi dan analisis pengertian pendidikan di atas, secara singkat pendidikan dapat dirumuskan sebagai tuntunan pertumbuhan manusia sejak lahir hingga tercapai kedewasaan jasmani dan rohani, dalam interaksi dengan alam dan lingkungan masyarakatnya.

²⁹ Dewantara, Ki Hajar, *Bagian Pertama Pendidikan*, (Yogyakarta: MLTS, 1977), h. 14

Pendidikan merupakan proses yang terus menerus, yang tidak henti-hentinya, dalam melaksanakan proses pendidikan, keluhuran martabat manusia dipegang erat karena manusia adalah subyek dari pendidikan. Karena manusia merupakan subyek dalam pendidikan, maka dituntut suatu tanggung jawab agar tercapai suatu hasil pendidikan yang baik. Jika memperhatikan manusia sebagai subyek, maka pendidikan meletakkan hakikat manusia sebagai unsur sangat strategis dan terpenting, maka perlu diperhatikan masalah otonomi pribadi. Maksudnya manusia sebagai subyek pendidikan harus bebas sebagai dirinya yaitu manusia yang berpribadi, yang bertanggung jawab.

Hasil dari pendidikan adalah adanya perubahan pada subyek pendidikan itu sendiri. Ada perubahan dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak paham menjadi paham. Tetapi perubahan yang terjadi setelah proses pendidikan itu tentu saja tidak sesempit itu. Karena perubahan itu menyangkut aspek perkembangan jasmani dan rohani. Melalui pendidikan, manusia menyadari hakikat dan martabatnya di dalam relasinya yang tak terpisahkan dengan alam lingkungannya dan sesamanya. Dengan demikian pendidikan sebenarnya mengarahkan manusia menjadi insan yang sadar diri dan lingkungan. Dari kesadarannya itu mampu memperbaharui diri dan lingkungannya tanpa kehilangan kepribadian dan tidak tercerabut dari akar tradisinya. Berikut ini dibahas secara rinci permasalahan pendidikan di Indonesia

1. Masalah Mendasar Pendidikan di Indonesia

Kalangan ilmuan pakar pendidikan menyadari bahwa dunia pendidikan saat ini masih mengalami banyak kendala dan permasalahan, disebabkan oleh pendidikan yang seharusnya membuat manusia menjadi manusia, tetapi dalam kenyataannya tidak memanusiakan manusia.

Pertama adalah pendidikan, khususnya di Indonesia, menghasilkan manusia robot. Alasannya dikarenakan pendidikan yang diberikan ternyata berat sebelah, dan tidak seimbang. Pendidikan ternyata mengorbankan keutuhan, kurang seimbang antara belajar yang berpikir (kognitif) dan perilaku belajar yang merasa (afektif). Jadi unsur integrasi cenderung semakin hilang, yang terjadi adalah disintegrasi. Padahal belajar tidak hanya berfikir. Sebab ketika orang sedang belajar, maka orang yang sedang belajar tersebut melakukan berbagai macam kegiatan, seperti mengamati, membandingkan, meragukan, menyukai, semangat dan sebagainya. Hal yang sering disinyalir ialah pendidikan seringkali dipraktikkan sebagai sederetan instruksi dari guru kepada murid. Apalagi dengan istilah yang sekarang sering digembargemborkan sebagai pendidikan yang menciptakan manusia siap pakai. Maksudnya menghasilkan tenaga yang dibutuhkan dalam pengembangan dan persaingan bidang industri dan teknologi. Dalam hal ini manusia dipandang sama seperti bahan atau komponen pendukung industri. Maksudnya

lembaga pendidikan diharapkan mampu menjadi lembaga produksi sebagai penghasil bahan atau komponen dengan kualitas tertentu yang dituntut pasar. Kenyataan ini nampaknya justru disambut dengan antusias oleh banyak lembaga pendidikan.

Kedua adalah sistem pendidikan yang *top-down* (dari atas ke bawah) atau kalau menggunakan istilah Paulo Freire (seorang tokoh pendidik dari Amerika Latin) adalah pendidikan gaya bank. Sistem pendidikan ini sangat tidak membebaskan karena para peserta didik (murid) dianggap manusia-manusia yang tidak tahu apa-apa. Guru sebagai pemberi mengarahkan kepada murid-murid untuk menghafal secara mekanis isi pelajaran yang diceritakan. Guru sebagai pengisi dan murid sebagai yang diisi. Otak murid dipandang sebagai *safe deposit box*, seperti pengetahuan dari guru ditransfer kedalam otak murid dan jika sewaktu-waktu diperlukan, pengetahuan tersebut tinggal diambil saja. Murid hanya menampung saja yang disampaikan guru. Dengan demikian hubungannya adalah guru sebagai subyek dan murid sebagai obyek. Model pendidikan ini tidak membebaskan karena sangat menindas para murid. Seperti pendidikan gaya bank, pengetahuan merupakan sebuah anugerah yang dihibahkan oleh mereka yang menganggap dirinya berpengetahuan kepada mereka yang dianggap tidak mempunyai pengetahuan.

Ketiga adalah model pendidikan yang

dihasilkan hanya siap untuk memenuhi kebutuhan zaman dan bukannya bersikap kritis terhadap zamannya. Manusia sebagai objek (wujud dari dehumanisasi) merupakan fenomena yang justru bertolak belakang dengan visi humanisasi, menyebabkan manusia tercerabut dari akar budayanya (seperti di dunia Timur/Asia). Oleh karena itu strategi pendidikan di Indonesia harus terlebur dalam strategi kebudayaan Asia, sebab Asia kini telah berkembang sebagai salah satu kawasan penentu yang strategis dalam bidang ekonomi, sosial, budaya bahkan politik internasional. Untuk menjadikan lembaga pendidikan sebagai sarana interaksi kultural untuk membentuk manusia yang sadar tradisi dan kebudayaan serta keberadaan masyarakatnya sekaligus juga mampu menerima dan menghargai keberadaan tradisi, budaya dan situasi masyarakat lain, maka pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menjadi sangat relevan untuk direnungkan.

2. Kualitas Pendidikan di Indonesia

Kualitas pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal, meliputi jajaran dunia pendidikan baik Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan daerah dan juga sekolah/madrasah yang berada di garis depan. Dalam hal ini, interfensi dari pihak terkait sangatlah dibutuhkan agar pendidikan senantiasa selalu terjaga dengan baik. Dan faktor eksternal meliputi masyarakat

pada umumnya. Seperti masyarakat sebagai ikon pendidikan dan merupakan tujuan dari adanya pendidikan.

E. Faktor Yang Mempengaruhi Berkembangnya Masalah Pendidikan

Permasalahan pendidikan terjadi baik *intern* maupun *ekstern*. Maksudnya masalah intern terjadi dalam bidang pendidikan itu sendiri. Seperti permasalahan berkaitan langsung/ tidak langsung seiring perkembangan yang terjadi di luar bidang pendidikan itu sendiri. Perkembangan di luar (*exteren*) merupakan faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan.

Faktor utama yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan adalah: 1) Perkembangan IPTEK, 2) Laju pertumbuhan penduduk, 3) Aspirasi masyarakat, 4) Keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Berikut ini dikaji faktor yang mempengaruhi masalah pendidikan serta penanggulangannya.

Faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan pendidikan;

1. Pengaruh IPTEK
 - a. IP (Ilmu Pengetahuan). Berkembangnya IP (*Science*), seperti bidang sosial, ekonomi, hukum, pertanian dan sebagainya jelas membawa masalah dalam bidang pendidikan misalnya, materi/ bahan pengajaran yang terdapat dalam kurikulum harus diubah/disesuaikan.
 - b. TEK (Teknologi). Perkembangan teknologi,

misalnya teknologi baru yang digunakan dalam suatu proses produksi menimbulkan kondisi ekonomi sosial baru. Persyaratan kerja, kebutuhan tenaga kerja, sistem pelayanan serba baru. Perkembangan seperti ini menimbulkan masalah dalam sistem pendidikan. Sistem yang ada mungkin tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan, maka perlu diubah dan disesuaikan.

- c. S (Seni). Aktivitas kesenian mempunyai andil yang cukup besar dalam membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Secara khusus kesenian dapat mengembangkan domain/ aspek afektif peserta didik. Kesenian telah mengalami perkembangan sangat pesat dan semakin mendapat tempat dalam kehidupan masyarakat. Kondisi ini, menimbulkan masalah baru pada dunia pendidikan dalam bidang kesenian. Jika seni dikembangkan melalui sistem pendidikan, maka permasalahan baru muncul seperti ketersediaan sarana dan prasarana serta tenaga profesi kesenian pada lembaga pendidikan.

2. Laju Pertumbuhan Penduduk.

Laju pertumbuhan penduduk, ikut menyebabkan berkembangnya masalah pendidikan, dengan pertumbuhan penduduk yang pesat maka jumlah anak usia sekolah akan semakin besar/banyak. Jika daya tampung sekolah tidak bertambah maka sebagian dari mereka terpaksa antri atau tidak

sekolah. Jika ditampung juga (misalnya karena wajib belajar) maka ratio guru siswa semakin besar. Hal ini menyebabkan munculnya masalah baru yaitu mutu pendidikan.

Penyebaran penduduk yang tidak merata di tanah air menimbulkan masalah baru. seperti cara merencanakan dan menyediakan sarana pendidikan yang dapat melayani daerah padat (Kota) dan daerah terisolir yang anak usia sekolahnya jarang.

3. Aspirasi Masyarakat

Aspirasi masyarakat semakin meningkat dari tahun ke tahun sudah terlihat. Masyarakat sudah melihat bahwa pendidikan lebih menjamin memperoleh pekerjaan yang layak dan menetap atau meningkatkan status sosial mereka.

Peningkatan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan ini mengakibatkan anak-anak, remaja dan dewasa menyerbu dan membanjiri lembaga pendidikan. Kondisi ini menimbulkan berbagai masalah seperti sistem seleksi siswa/mahasiswa baru, ratio guru-siswa, waktu belajar, permasalahan terus berkembang karena saling kait.

4. Keterbelakangan Budaya dan Sarana Kehidupan

Masyarakat umumnya berada di daerah terpencil, yang kondisi ekonominya lemah dan kurang terdidik, serta mengalami keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Kondisi ini jelas menimbulkan masalah bagi pendidikan. Permasalahannya seperti menyadarkan mereka keterbelakangan/ketinggalannya, penyediaan sarana

kehidupan yang lebih baik, khususnya sistem pendidikan dapat menjangkau dan melibatkan mereka sehingga mereka keluar dari keterbelakangan dan ketertinggalannya.

F. Solusi Pendidikan di Indonesia

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi masalah pendidikan, seperti rendahnya kualitas sarana fisik, kualitas guru, secara garis besar ada dua solusi yaitu: *pertama*, Solusi sistemik, yakni solusi dengan mengubah sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini, diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme (*mazhab neoliberalisme*), yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan, *kedua*, Solusi teknis, yakni solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkait langsung dengan pendidikan. Solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa.

Solusi untuk masalah teknis dikembalikan kepada upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Rendahnya kualitas guru, misalnya, melalui peningkatan kesejahteraan, membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Rendahnya prestasi siswa, misalnya diberi solusi dengan meningkatkan kualitas dan

kuantitas materi pelajaran, meningkatkan alat peraga dan sarana pendidikan.

Khusus untuk memecahkan permasalahan pendidikan dibawah naungan Kementerian Agama, beberapa solusi melalui kebijakan-kebijakan Menteri Agama antara lain; *Pertama*, Terkait penyelenggaraan pendidikan secara serius memperhatikan kebutuhan sarana penunjang pendidikan yang dibutuhkan anak didik di madrasah. Seperti rasio kebutuhan buku paket atau buku pegangan siswa, laboratorium dan sarana pendukung lainnya.

Kedua, merancang pola rekrutmen guru dalam rangka menyediakan tenaga guru yang memenuhi standardisasi, kualifikasi dan kompetensi dibidang pendidikan serta berdedikasi tinggi.

Ketiga, Subsidi silang, swastanisasi terhadap sekolah-sekolah negeri yang sudah mapan dalam penyelenggaraan pendidikannya. Sehingga dalam berbagai bentuk subsidi dapat dialokasikan secara seimbang kepada sekolah-sekolah yang masih terpinggirkan, khususnya kepada madrasah yang selama ini lebih banyak bergantung kepada swadaya masyarakat.

Keempat, tidak ada dikotomi antara pendidikan umum dengan madrasah. Sebab, akan menimbulkan kekeliruan pemahaman dikalangan masyarakat luas, yang pada akhirnya menghambat proses penyelenggaraan pendidikan nasional yang sama-sama mencerdaskan anak bangsa.

Kelima, memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memosisikan diri, peran

serta partisipasinya dalam penyelenggaraan pendidikan secara utuh, seperti pada awal keberadaan madrasah, contohnya mampu menyediakan orang tua asuh bagi siswa yang kurang mampu.

Adapun kebijakan yang diambil dalam menentukan nasib pendidikan madrasah, perlu memperhatikan beberapa hal: 1) Tidak merugikan ciri khas Agama Islam baik jangka pendek maupun jangka panjang. Misalnya, baik karena perubahan sosila politik, pergantian *desicion maker* dan sebagainya; 2) Tidak ada lagi diskriminasi perlakuan antara madrasah dan sekolah umum. Termasuk misalnya diskriminasi dalam hal anggaran; 3) Perlunya perhatian pemerintah daerah yang cukup, meskipun selama ini madrasah berada langsung di bawah pusat. Sebab, persoalan pendidikan adalah persoalan universal dan investasi jangka panjang; 4) Jika desain sentralisasi pembinaan madrasah untuk saat ini dianggap masih efektif untuk mencapai dan menjaga visi, misi dan tujuan pendidikan nasional maka Kementerian Agama perlu melakukan upaya optimalisasi koordinasi dengan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, disamping meningkatkan akuntabilitas lembaganya.

Maka dengan adanya solusi-solusi tersebut diharapkan pendidikan di Indonesia dapat bangkit dari keterpurukannya dan terbuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak-anak usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan, sehingga dapat menciptakan generasi baru yang berSDM tinggi, berkepribadian, berpancasilais, bermartabat dan ber peradaban.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tingkat pendidikan dan pendapatan keluarga mempengaruhi tingkat kesempatan mendapatkan pendidikan. Pendidikan merupakan proses bimbingan yang terorganisir yang diberikan kepada seseorang dan suatu proses pengalaman yang terus menerus untuk mengembangkan kemampuan, kecakapan, kecerdasan, berkebudayaan, berkepribadian untuk memenuhi fungsi hidupnya sebagai manusia yang berperadaban di masa datang.
2. Dasar-dasar pendidikan meliputi; hakikat pendidikan, tujuan pendidikan, fungsi pendidikan, landasan pendidikan, azas-azas pendidikan, teori pendidikan, pilar pendidikan, lingkungan pendidikan, system pendidikan, kelembagaan dan pengelolaan pendidikan nasional, faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan dan permasalahan pendidikan di Indonesia.

3. Pendidikan sangat penting dalam kehidupan ini. Pintu kemajuan dan kemenangan dalam pentas dunia ini adalah pendidikan.
4. Pendapatan keluarga merupakan pendapatan yang terdiri dari upah atau gaji, tambahan-tambahan dari pekerjaan sambilan seperti pekerjaan dan kerajinan wanita dan anak-anak dan hadiah-hadiah kaum keluarga lainnya, serta jasa para anggota keluarga berupa mencuci pakaian, membersihkan rumah, memelihara pekarangan, memperbaiki kerusakan rumah, jika anggota keluarga harus diam atau makan di luar rumah, maka mempertinggi pengeluaran.

B. Saran- saran

1. Bagi keluarga yang sudah mendapatkan kesempatan mendapatkan pendidikan kepada anak-anaknya untuk mempertahankan dan meningkatkannya dan bagi keluarga yang kurang mendapatkan kesempatan mendapatkan pendidikan bagi anak-anaknya, maka jika ingin memperbaiki kesempatan anak mendapatkan pendidikan, maka perbaiki tingkat pendidikan keluarga.
2. Jika ingin memperbaiki kesempatan anak mendapatkan pendidikan, maka perbaiki tingkat pendapatan keluarga.
3. Kepada pemerintah untuk dapat membuka seluas-luasnya kesempatan pendidikan kepada anak-anak usia sekolah baik keluarga yang tingkat pendidikan dan pendapatan tinggi maupun keluarga yang tingkat pendidikan dan pendapatan rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Azis Wahab. 1993. *“Pokok-pokok Pikiran Tentang Model Alternatif Implementasi Pendidikan Dalam Rangka Desentralisasi dan Otonomi Daerah”* Proyek Peningkatan Mutu SMU Jawa Barat.
- Abraham, M. Maslow. 1996. *Motivasi dan Kepribadian I (Teori Motivasi dan Pendekatan Hierarki Kebutuhan Manusia)*. Jakarta: PT.PBP.
- Abdul Manan Akhmad. 1999. *Proyeksi Pergeseran Mutu Sekolah Menengah Umum Tahun 1999/2000-2004/2004*, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun ke-5, No. 020, Badan Peneliti dan Pengembangan, Depdiknas, Jakarta.
- Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati. 1991. *Ilmu Pendidikan*, Semarang: Rineka Cipta.
- Abu Ahmadi. 1982. *Sosiologi Pendidikan*, Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Abdullah, Faisal M., 2001. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur.

- Ahmad D. Marimba. 1964. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Cetakan II Al Maarif.
- Ahmad Tafsir. 2002. *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ahmadi Abu, 1991, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ahmad Zayadi dan Abdul Majid. 2004. *Tadzkirah: Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berdasarkan Pendekatan Kontekstual*. Surabaya: ELKAF.
- Azyumardi Azra. 2002. *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Azyumardi Azra. 1998. *Esai-esai Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Bahrul Hayat. 2013. *Kumpulan Pidato, sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI*, Jakarta.
- Baridwan, Zaki. 1992. *Intermediate Accounting*. Edisi 7. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Brow, H. Douglas, 2008. *Prinsip Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa*. Jakarta: Kedutaan Besar Amerika Serikat.
- C. Rolin Niswonger dan Carl S. Waren dan Philip E. Fess. 1992. *Prinsip-Prinsip Akuntansi*, (Terjemahan), Alih Bahasa: Alfonsus Sirait, Jilid 1. Edisi 16, Jakarta: Erlangga
- Daradjat, Zakiyah. 1992. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara
- Darji Darmodiharjo. 1982. *Peranan Guru Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Dalam Analisis Pendidikan*, Jakarta: Depdikbud

- Departemen Pendidikan Nasional. 2000. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*.
- Departemen Agama RI. 2009. *Mukaddimah AL-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid 10 Juz 28-29-30*, edisi disempurnakan, tidak diperjualbelikan, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Dewantara, Ki Hajar. 1977. *Bagian Pertama Pendidikan*, Yogyakarta: MLTS.
- Depdikbud. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djahiri, A. Kosasih. 1980. *Pendekatan broadfield (METODOLOGI PENGAJARAN)*, Jakarta: Depdikbud.
- Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield. 2008. *Akuntansi Intermediate, Edisi 12*, Jakarta: Erlangga.
- E. Mulyana. 2004. *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik dan Implementasi*, Bandung: Remaja Rosdakara Offset.
- E. Mulyana. 2008. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Elida Prayitno, 1989. *Panduan pengajar buku motivasi dalam belajar*, Jakarta: Proyek Pengembangan LPTK.
- Fuad Ihsan. 2003. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi, 1991. *Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Hasbullah. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hendriksen. 1982. *Teori Akuntansi*, (Terjemahan

- Marianus Sinaga), Jilid 1, Jakarta: Erlangga.
<http://gurupkn.com/pentingnya-pendidikan-bagi-manusia> diakses Rabu, 5 April 2017
- Hujair AH. Sanaky. *Paradigma Pendidikan Islam; Membangun Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Safiria Insania Press dan MSI.
- Husaini, Adian at. al. 2013. *Filsafat Ilmu Perspektif Barat dan Islam*. Depok: Gema Insani.
- Horton, Chaster, L. Hunt. 1999. *Sosiologi, Alih Bahasa*, Jakarta: Erlangga.
- Hoy, W. K. & Miskel, C. C., 1987. *Educational Administration: Theory, Research & Practices*. New York: Random House.
- Imam Suprayogo. 2013. *Pengembangan Pendidikan Karakter*, Malang: UIN –Maliki Press.
- Indrakusuma, A.D., 1978. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Malang: FIP IKIP Malang.
- Indrafachrudi, S., 1994. *Bagaimana Mengakrabkan Sekolah dengan Orangtua Murid dan Masyarakat*. Malang: IKIP Malang.
- Ikhsan, Fuad. 2003. *Dasar-dasar Kependidikan*. Jakarta: Rineka Citra.
- John Dewey. 2004. *Experience And Education, Terjemahan*, Bandung: Teraju.
- J.b.a.f. Mayor Polat. 1979. *Sosiologi Suatu Buku Pengantar Ringkas*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru.
- Jay M. Smith dan K. Fred, Skousen. 1996. *Akuntansi Intermediate*, Jakarta: Erlangga.
- Kam, Vernon. 1990. *Accounting Theori*, 2nd edition, New York: John Wiley & Sons. Inc.

- Kantor Statistik Propinsi Bengkulu, 1990. *Penduduk Usia Tunggal Propinsi Bengkulu*, Bengkulu.
- Kementerian Agama RI. 2012. *Kedudukan dan Peran Perempuan, Tafsir Al Qur'an Tematik, Edisi yang Disempurnakan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI
- Kaslan, Tohir A. 1962. *Ekonomi Selayang Pandang*. Bandung: Sumur Bandung.
- Khairiah. 1993. *Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pendapatan Keluarga Terhadap Kesempatan Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Desa Transmigrasi Harapan Makmur Bengkulu*, Palembang: IAIN Palembang
- Khairiah. 2017. *Hak Mendapatkan Ilmu dan Pengajaran, Perspektif Gender, Bunga Rampai Islam dan Gender*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Langgulung, Hasan. *Manusia dan Pendidikan*, Jakarta: Husna Zikra
- Langeveld, M.J. 1980. *Pedagogik Teoritis dan Sistematis*, Alih Bahasa Firmansyah, Bandung: Jemmars.
- Lipsey, R dan Steiner, P. 1991. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lickona, Thomas. 1992. *Educating For Character, How Our Schools Can Teach Respect And Responsibility*, New York: Bantam Books
- M. Arifin. 2000. *Ilmu Pendidikan Islam, Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan*

- Pendekatan Interdisipliner*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Mahmudah, 2017. *Majalah, Fokus Pengawasan, Tegas dan Independen, Pagari Kemenag Dari Pungli*, Nomor 54 Tahun XIV Triwulan II 2017, ww.itjen.kemenag.go.id
- Maisyaroh. 2003. *Manajemen Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Dalam, Imron, Maisyaroh dan Burhanuddin (Eds.), *Manajemen Pendidikan: Analisis Substansi dan Aplikasinya dalam Institusi Pendidikan*, Malang: UM Press.
- Mardiatmadja, B.S. 1986. *Tantangan Dunia Pendidikan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Mc. Donald. 1995. *Education Psychology*, San Francisco: Wadsworth Publising Company, Inc.
- MPR RI. 1988. *GBHN TAP MPR No. II/MPR/1988*, Sekretariat Negara Republik Indonesia
- MPR RI. 1983. *GBHN TAP MPR No. II/MPR/1983*, Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Muri Yusuf. 1982. *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhyiddin, http://www.kompasiana.com/aamuhyiddin/pendidikan-dan-kehidupan_551a195b813311f57d9de0b5 diakses hari jumat, 20 Januari 2007
- Muhammad Kamil Hasan Al-Mahami. 2012. *Al-Mausu'ah Al Qur'aniyah, (Ensiklopedia Al Qur'an) Jilid 4*, (Jakarta: Al Maktab Al 'Alamiy, Lith- Thiba'ati Wan Nasyri.
- Muhajir, Noeng. 2000. *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial, Tiori Pendidikan, Pelaku Sosial Kreatif*,

- Yogyakarta: Raka Sarasin.
- Mulyahardjo, Radja. 2006. *Pengantar Pendidikan Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-Dasar Pendidikan Pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Mudjiman, Haris. 2007. *Belajar Mandiri*. Surakarta: UNS PRESS.
- Muchtar, Sofyan. 1986. *Prinsip-Prinsip Ekonomi*. CV Danau Singkarak. Jakarta.
- Ngalim Purwanto. M. 2002. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Remadja Rosdakarya
- Ngalim, Purwanto. 1992. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nur Syam. 2014. *Dari Bilik Birokrasi, Esai Agama, Pendidikan dan Birorasi*, Jakarta: PT. Senama Sejahtera Utama.
- Oteng Sutisna. 1982. *Administrasi Pendidikan: Dasar Teoritis Untuk Praktek Profesional*, Bandung: Angkasa.
- Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses Pembelajaran
- Pirdata, Made. 2007. *Landasan Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Piaget, Jean, & Barbel Inhelder. 2010. *Psikologi Anak, Cet 1* Terj. Miftahul Jannah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- PP RI 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
- PP RI 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010

- tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
- PP RI 29 Tahun 1999, tentang Pendidikan Menengah
- PP RI 7 Tahun 1990, Tentang Pengelolaan Pendidikan Prasekolah
- PP RI 28 Tahun 1990, Tentang Pengelolaan Pendidikan Dasar
- PP RI 71 Tahun 1991, Pengelolaan Pendidikan Luar Sekolah
- PP RI 32 Tahun 2013 standar sarana dan prasarana, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013
- Popenoe, David. 1989. *Sociology*, New York: Prentice Hall Inc.
- Pranowo. 1982. *STATISTIK*, Yogyakarta: Penerbit Ananda.
- Ramayulis. 2004. *Ilmu Pendidikan Islam*. Cet. IV. Jakarta: Kalam Mulia.
- Raka Joni, T. 1985. *Strategi Belajar-Mengajar, Suatu Tujuan Pengantar*. Jakarta: P2LPTK Depdikbud.
- Ridono Aidad, 2000. *Harapan dan Partisipasi masyarakat terhadap peningkatan kualitas pendidikan*, Makalah seminar: *School and Base Education*.
- Robandi, Bambang. *Landasan Pendidikan. Modul Perkuliahan Fakultas Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia, 2005), h. 4.
- Robert M.Z. Lawang. 1985. *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Karonika.
- Rohimin dkk. 2009. *Hakikat Pendidikan. Makalah Mata Kuliah Pendidikan Nilai*, Jakarta: Pascasarjana

- Universitas Pendidikan Indonesia.
- Rohimin dkk. 2011. *Hakikat Pendidikan. Makalah Mata Kuliah Pendidikan Nilai*, Jakarta: Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Ridono Aidad. 2000. *Harapan dan Partisipasi masyarakat terhadap peningkatan kualitas pendidikan*, Makalah seminar: *School and Base Education*.
- Sadono Sukirno. 1978. *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: Bina Grafika.
- Said Aqil Siraj. 2008. *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi Bukan Aspirasi*, Banten: Pustaka Irvan.
- Saifullah, Ali. 2004. *Antra Filsafat dan Pendidikan*. Surabaya: Usaha Offset Printing.
- Sayuti, jamil. 1989. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Proyek Perkembangan Penelitian.
- Sintong Silaban. 1993. *Pendidikan Indonesia Dalam Pandangan Lima Belas Tokoh Pendidikan Swasta*, Bagian IV, Jakarta: Dasamedia Utama.
- Sicat, G dan Arndt, H. 1991. *Ilmu Ekonomi*. Jakarta: LP3es
- Sudrajat, Ahmad. 2013. www.wordpress.com/pendekatan_saintipik/ilmiah_dalam_proses_pembelajaran. [Online]. Diakses tanggal 09 Januari 2014.
- Sumardi Surya Brata. 1991. *Metode Penelitian*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Sunardi, M. dan H.D. Evers. 1985. *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Suryadharma Ali. 2013. *Paradigma Al-Qur'an, Reformasi Epistemologi Keilmuan Islam*, Malang, UIN MALIKI

PRESS.

- Suyitno. 2009. *Landasan Filosofis Pendidikan Dasar. Modul Perkuliahan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia*. Jakarta: UPI.
- Suwarno, Wiji. 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz.
- Swandika, Agung. 2011. *Aliran Nativisme*. Diunduh pada 17 Oktober 2015 pukul 11:15. Didapatkan dari <http://agungswandika.blogspot.com/2011/aliran-nativisme.html>.
- Soejono, Ag. 1987. *Aliran Baru dalam Pendidikan Bagian ke-1*. Bandung: C.V. Ilmu.
- Sondang P. Siagian. 2008. *Teori & Praktek Kepemimpinan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Supardi. 2014. *Kinerja Guru*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sumitro Djojohadikusumo. 1955. *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: PT. Pembangunan.
- Soediyono. 1984. *Pengantar Analisa Pendapatan Nasional*. Liberty. Yogyakarta.
- Tilaar, H.A.R. 2002. *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Tirtarahardja, Umar dan S.L. La Sulo. 2005. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang Ahmad. 2013. *Filsafat Manusia Sebuah Perbandingan Antara Islam dan Barat*, Jakarta: Pustaka Setia.
- Unruh, A. & Willer, R.A. 1974. *Public Relations for School*. Belmont California: Liar Siagler Inc. / Fearon

Publishers.

- Usman. 2003. *Filsafat Pendidikan*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- UU RI Nomor II Taun 1989, *Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: PT. Intan Parawira.
- UU Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pendidikan Nasional, Jakarta: Depdikbud.
- UU Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Depdiknas.
- UU RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Winarno Surakhmad, "*Guru dan Mutu*", Majalah Pendidikan Koridor, Edisi 3, Bandung: Depdiknas Propinsi Jawa barat.
- Winardi, E. 1975. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Bandung: Tarsito.
- Zahara Idris. 1987. *Dasar-dasar Kependidikan*, Padang: Angkasa Raya
- Zuhairini. 1991. *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



KHAIIRIAH alias **KHAIIRUNA**, lahir di Geunteng Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Provinsi Aceh pada tanggal 15 Mei 1968, anak ke empat dari enam bersaudara, Ayah bernama H. Muhammad H. Ali (Alm) dan Ibu bernama Hj. Musanah, menikah dengan Drs. H. Syarifuddin, MS Dosen UNIB pada Tahun 1987, dikaruniai tiga orang putra dan putri, Firdaus Muttaqi, ST, MT Alumni Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Syauqas Rahmatillah Sedang menempuh pendidikan S1 Universitas Bengkulu (UNIB), Fitria Qadriani sedang menempu S1 Universitas Bengkulu (UNIB).

Pendidikan formal yang ditempuh mulai dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Kuta Rentang lulus Tahun 1981, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Meureudu lulus Tahun 1984, Madrasah Aliyah Negeri

(MAN) Banda Aceh lulus Tahun 1987, IAIN Raden Fatah Palembang lulus Tahun 1994, S2 Program Pascasarja Manajemen Pendidikan UNIB lulus Tahun 2006, S3 Program Doktor Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) lulus Tahun 2017.

Pengalaman kerja diawali sebagai guru Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Harapan Makmur Bengkulu Utara pada 01 Maret 1997, pada Tahun 1998 mengemban amanah sebagai Kepala MTs Mambaul Ulum Talang Empat Bengkulu Utara, pada Tahun 2007 diberikan amanah sebagai kepala seksi (Kasi) Pengembangan Santri pada Bidang Pekapontren Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Tahun 2009 menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Siaran Tamaddun pada Bidang Penamas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Tahun 2010 menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Kurikulum pada Bidang Pendidikan MAPENDA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Tahun 2011 menjabat sebagai Kepala Bidang MAPENDA pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Tahun 2013 menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Madrasah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, dan pada Tahun 2014 di berikan amanah sebagai Kepala Biro Administrasi Umum Akademik da Kemahasiswaan (AUAK) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu sampai sekarang, semoga Allah SWT memberikan Keberkahan.

Pengalaman mengajar. Menjadi tenaga pengajar pada Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama

Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2016 dan menjadi tenaga pengajar pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2017 sampai sekarang.

Pengalaman Organisasi baik profesi maupun organisasi sosial kemasyarakatan, pada Tahun 1998 tergabung PGRI Talang Empat Bengkulu Utara (Kini Kabupaten Benteng), Tahun 2001 menjadi Ketua Koppontren (Koperasi Pondok Pesantren), tahun yang sama menjadi Manajer P2KER Unit Simpan Pinjam (USP) Pola Syariah Sistem Muamalat, Tahun 2002 menjadi pengurus Yayasan Al Muttaqin, Tahun yang sama 2002 dipercayakan sebagai pimpinan Pondok Pesantren Mambaul Ulum, Tahun 2004 tergabung sebagai pengurus Lembaga Pendidikan Tilawatil Quran (LPTQ), Tahun 2006 tergabung sebagai pengurus Ikatan Persatuan Haji Indonesia (IPHI), Tahun 2009 tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tahun 2010 menjadi Pembina Igra (Ikatan Guru Raudhatul Atfal), Pembina MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) MTs dan MA, Pembina MKKS MA Se-Provinsi Bengkulu, Tahun 2014 sampai sekarang menjadi pengurus FGD Biro/ Kabag PTKN Se-Indonesia. Semoga Barokallah.